



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Di dalam azas-azas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), akuntabilitas pemerintahan menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Penerapan manajemen kinerja yang baik harus dilaksanakan sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku, dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan/pengawasan sampai dengan evaluasi dalam rangkaian proses manajemen pemerintahan.

Proses evaluasi di dalam rangkaian manajemen kinerja diperlukan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi, adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2014. Penetapan Kinerja tersebut diturunkan dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setelah melalui tahapan konsensus terkait dengan pengisian target. Sedangkan RKT diambil dari matrik Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang tercantum dalam Bab IX RPJMD Kabupaten Magelang 2009-2014, pada kolom tahun 2014.

Pemerintah Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan. Oleh karena itu, pada hakikatnya apa yang dilaporkan dalam LKjiP ini merupakan laporan terhadap apa yang sudah direncanakan dalam dokumen RPJMD 2009-2014.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi

serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

3.1.1. INDIKATOR KINERJA

Kinerja diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang dilakukan melalui media Penetapan Kinerja Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2014 dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran strategis, dan juga dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya (tahun 2013).

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Interpretasi atas pencapaian sasaran strategis serta indikator makro berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran LkjIP
Tahun 2014

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75% sampai 100%	Baik
3.	55% sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Sumber : Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

- Indikator Kinerja Sasaran yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) sebagai berikut:
- Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

3.1.2. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Persentase capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2014 dibandingkan dengan persentase capaian kinerja hingga akhir periode RPJMD 2009-2014 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Persentase Capaian Kinerja per Sasaran Strategis
Kabupaten Magelang Tahun 2014

No	Misi/Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian 2014	% hingga akhir periode RPJMD
I.	Misi I Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama			
	Sasaran:			
I.1	Meningkatnya akses , pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan	21	96,88	94,18
I.2	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang	6	102,31	81,46
I.3	Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu dan teknologi di berbagai bidang, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kompetisi nasional/global	3	100,38	71,51
I.4	Makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pemerataan	26	115,50	117,42

No	Misi/Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian 2014	% hingga akhir periode RPJMD
	pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak			
I.5	Makin kuatnya karakter sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila	3	134,13	171,22
I.6	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	3	69,99	79,16
I.7	Makin berkurangnya kuantitas dan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	8	196,57	73,68
II.	Misi II Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing			
	Sasaran:			
II.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka menengah mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten/kota yang cukup maju di Indonesia	5	126,98	99,30
II.2	Makin meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih bermutu	1	15,88	20,18
II.3	Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat	8	122,33	130,32
II.4	Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor berbasis ekonomi daerah sehingga mampu menghasilkan komoditas berkualitas, berdaya saing, dan menjadi motor penggerak perekonomian	4	114,39	147,61
II.5	Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah	2	185,61	69,52
III.	Misi III Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana daerah			

No	Misi/Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian 2014	% hingga akhir periode RPJMD
	Sasaran:			
III.1	Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	1	70,76	166,49
III.2	Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru	6	103,11	110,89
III.3	Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni	4	140,10	129,60
IV.	Misi IV Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup			
	Sasaran:			
IV.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam	1	150,00	100,00
IV.2	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global	13	906,96	110,04
V.	Misi V Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis			
	Sasaran:			
V.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih	7	113,26	120,94
V.6	Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung <i>stakeholders</i> (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum	2	100,00	100,00

No	Misi/Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian 2014	% hingga akhir periode RPJMD
V.7	Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah	4	100,00	100,00
V.8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat	4	121,15	117,49
VI.	Misi VI Menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram			
	Sasaran:			
VI.1	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	4	101,37	80,59
	Jumlah	136		

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 17 sasaran strategis dari 22 sasaran strategis yang dilaksanakan pada tahun 2014 capaian kinerjanya di atas 100,00% (sangat baik). Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 9 sasaran strategis telah melampaui target yang ditetapkan tahun 2014 maupun dalam periode akhir RPJMD.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

3.2.1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO TAHUN 2014

Indikator kinerja makro yang diukur meliputi :

1. PERTUMBUHAN PDRB

Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat kemajuan ekonomi pada suatu wilayah, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin baik perekonomian. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang cenderung naik dari tahun ke tahun.

Dalam kurun waktu lima tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, kecuali pada

Tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2009-2013 (%)

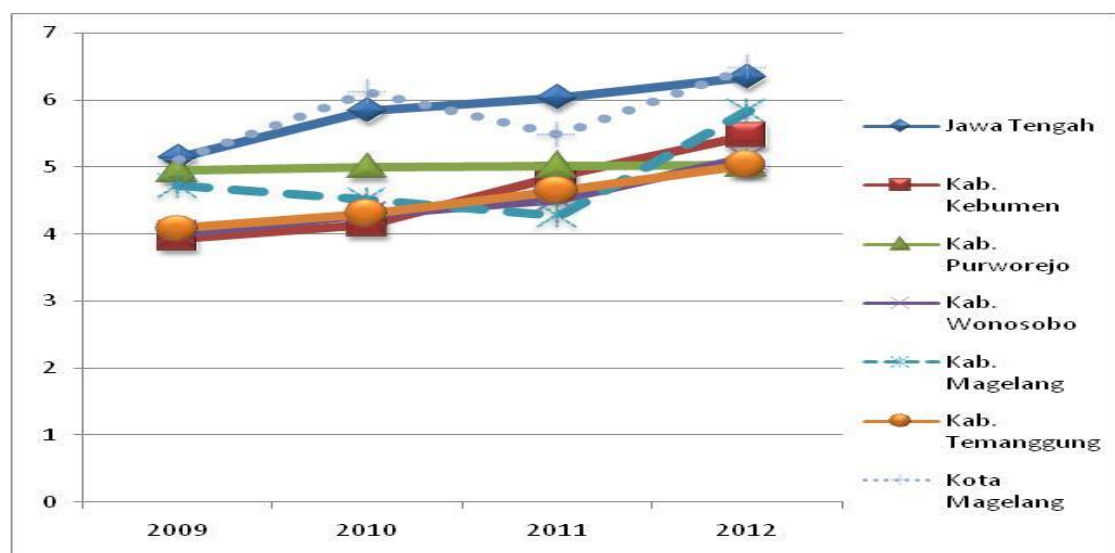
Tahun	Kabupaten Magelang	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2009	4,72	4,71	4,58
2010	4,51	5,84	6,10
2011	4,27	6,03	6,46
2012	5,84	6,34	6,23
2013	5,60	5,8	5,78
2014**	5.46	5,3	5,9

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2015

** Angka Sementara

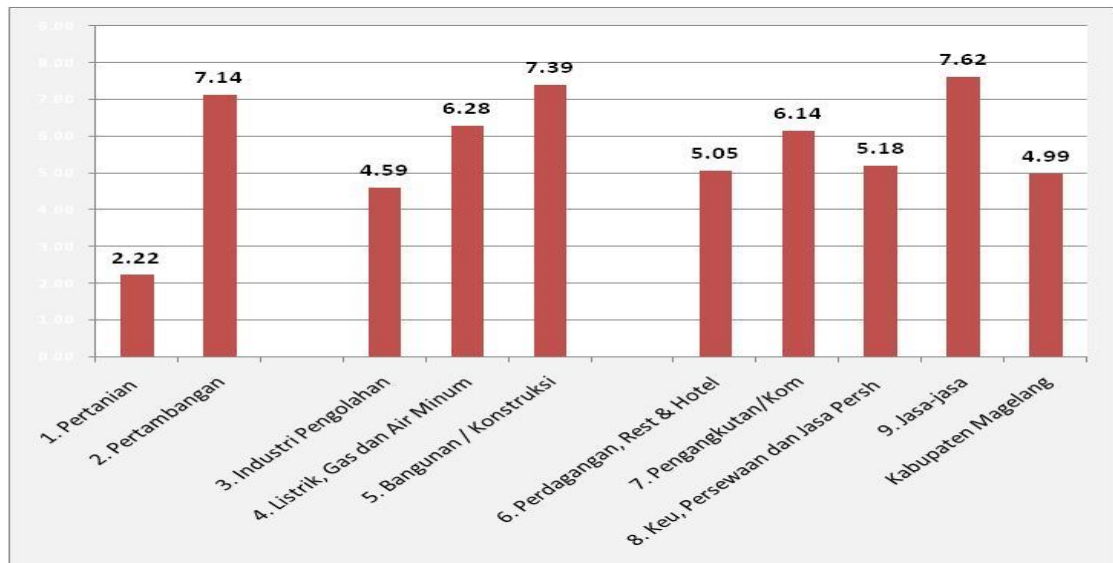
Dalam Tabel 3.3 nampak bahwa lima tahun terakhir kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun secara nasional. Perbedaan kinerja hanya terjadi pada Tahun 2009 ketika pertumbuhan ekonomi kabupaten melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi se eks Karesidenan Kedu, nampak bahwa pada Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang telah mencapai posisi terbaik kedua setelah Kota Magelang. Pada Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang, menduduki posisi terakhir atau terendah, sementara pada Tahun 2010 dan 2011 berada pada posisi ketiga.



Grafik 3.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi se Eks Karesidenan Kedu 2009-2012

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2009-2013 sebesar 4,90% rata-rata per tahun. Secara sektoral terdapat tujuh sektor yang tumbuh diatas rata-rata. Tiga sektor mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu jasa-jasa, bangunan/konstruksi dan pertambangan/galian. Sektor yang tumbuh paling rendah adalah sektor pertanian. Data perkembangan ekonomi sektoral selama lima tahun disajikan dalam Grafik 3.2 berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2014 (diolah)

Grafik 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang
Menurut Sektor Tahun 2009-2013

Jika diamati pertumbuhan sektor secara tahunan, tampak sektor pertanian sebagai sektor dominan tumbuh paling lambat, dan bahkan pada Tahun 2011 mengalami pertumbuhan minus. Sementara itu dua sektor unggulan yang lain, industri dan perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan sebagai pendukungnya, secara konsisten meningkat. Data perkembangan ekonomi sektoral Tahun 2009-2013 disajikan dalam Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang
Menurut Sektor Tahun 2009-2014 (%)

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013	2014**
1. Pertanian	3,66	1,58	-0,19	3,18	2,87	3,27
2. Pertambangan dan Penggalian	7,47	7,58	8,66	6,32	5,65	2,26
3. Industri Pengolahan	3,28	3,76	3,65	5,86	6,39	6,03
4. Listrik, Gas dan Air Minum	4,40	8,26	4,56	5,81	8,39	5,65
5. Bangunan/Konstruksi	6,74	7,06	8,48	7,08	7,57	7,65
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	3,27	4,54	3,86	6,45	7,11	6,07
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,03	6,17	5,95	7,00	6,55	7,99
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,54	4,05	4,96	5,59	7,77	6,56
9. Jasa-jasa	7,96	7,71	8,66	8,06	5,73	5,75
Kabupaten Magelang	4,72	4,51	4,27	5,84	5,60	5,46

Sumber : Tinjauan Ekonomi Kabupaten Magelang 2013
BPS Kabupaten Magelang, 2015 (** Angka Sementara)

Nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2014 Rp 12.047.100,23 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.024.777,73 dari Tahun 2010 sebesar Rp 8.022.322,50. Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2013 Rp 10.796.197,75 mengalami peningkatan sebesar Rp3.645.140,24 dari Tahun 2009 sebesar Rp7.151.057,51 sebagaimana Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2010-2014 (Rp)

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014**
1. Pertanian	2.374.670,52	2.523.850,92	2.757.335,485	3.010.214,807	3.217.423,68
a. Tanaman Bahan Makanan	1.858.336,77	1.959.213,57	2.153.490,672	2.353.155,16	
b. Tanaman Perkebunan	145.045,24	161.710,3	172.326,593	187.701,327	
c. Peternakan	222.162,44	241.442,82	261.872,610	285.766,681	
d. Kehutanan	108.024,37	115.687,86	119.804,320	129.679,630	
e. Perikanan	41.102,7	45.796,37	49.841,290	53.912,009	
2. Pertambangan dan Penggalian	203.806,88	228.875,35	250.860,614	283.701,535	306.553,95
3. Industri Pengolahan	1.443.691,68	1.602.147,38	1.810.124,090	2.023.782,529	2.260.709,41
4. Listrik, Gas dan Air Minum	54.619,98	59.013,32	64.478,514	74.169,218	81.004,65
5. Bangunan/ Konstruksi	665.087,71	745.656,97	834.813,913	936.046,740	1.058.829,87

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014**
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	1.206.640,33	1.314.423,13	1.479.010,310	1.638.870,465	1.870.515,07
7. Pengangkutan dan Komunikasi	405.250,61	444.376,89	489.396,010	543.650,496	641.493,61
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	213.796,89	229.365,52	248.702,520	281.086,654	321.517,76
9. Jasa-jasa	1.454.757,90	1.623.099,22	1.801.834,920	2.022.767,32	2.289.052,23
PDRB Kab. Magelang (Rp)	8.022.322,50	8.770.808,59	9.736.556,376	10.814.289,764	12.047.100,23
PDRB Perkapita (Rp)	6.784.073,12	7.371.214,15	7.984.900,72	8.851,975,077	9.765.055,57

Sumber : Tinjauan Ekonomi Kabupaten Magelang 2013
BPS Kabupaten Magelang, 2015 (** angka sementara)

Nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp 5.059.200,54. Nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan (ADHB) Tahun 2010-2014 disajikan dalam Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Tahun 2010-2014 (Rp)

Sektor	2010	2011	2012	2013	2014**
1. Pertanian	1.145.120,48	1.142.912,87	1.179.258,55	1.213.076,086	1.252.710,11
a. Tanaman Bahan Makanan	865.979,46	851.581,29	878.851,54	901.516,042	
b. Tanaman Perkebunan	72.180,8	76.984,72	79.927,76	83.351,217	
c. Peternakan	125.785,55	130.552,82	135.82,3	142.437,438	
d. Kehutanan	57.905,99	59.034,64	58.454,27	58.723,374	
e. Perikanan	23.268,68	24.759,4	26.204,68	27.048,016	
2. Pertambangan dan Pengalihan	115.123,12	125.092,78	132.992,83	140.505,541	143.675,38
3. Industri Pengolahan	766.616,23	794.597,72	841.170,15	894.905,717	948.886,80
4. Listrik, Gas dan Air Minum	22.199,82	23.212,99	24.561,94	26.622,469	28.126,37
5. Bangunan/ Konstruksi	373.875,83	405.580,5	434.296,87	467.176,538	502.933,10
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	598.255,34	621.357,12	661.460,76	708.485,187	751.496,33
7. Pengangkutan dan Komunikasi	232.099,52	245.909,74	263.115,36	280.351,475	302.754,79
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	112.121,22	117.687,44	124.261,96	133.913,596	142.691,88
9. Jasa-jasa	750.978,51	816.003,29	881.770,24	932.282,404	985.925,77
PDRB Kab. Magelang (Jutaan Rupiah)	4.116.390,07	4.292.354,45	4.542.888,66	4.797.318,014	5.059.200,54
PDRB Perkapita (Rp)	3.481.023,26	3.607.405,54	3.725.600,051	3.926.818,06	4.100.851,95

Sumber : Tinjauan Ekonomi Kabupaten Magelang 2013
BPS Kabupaten Magelang, 2015 (** angka sementara)

PDRB Kabupaten Magelang 2014 tetap didominasi empat sektor yang memberikan kontribusi yang terbesar, yaitu pertanian, industri, jasa-jasa dan perdagangan. Menurut perkiraan ini, struktur ekonomi Kabupaten Magelang akan mengalami kelambatan transformasi, sehingga masih tergantung pada sektor primer. Data perubahan struktur PDRB Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014, selengkapnya disajikan pada Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang
Tahun 2010-2014 (%)

Uraian	ADHK					ADHB				
	2010	2011	2012	2013	2014**	2010	2011	2012	2013	2014**
1. Pertanian	27,82	26,63	25,96	25,29	24,76	29,60	28,79	28,31	27,83	26,71
2. Pertambangan dan Penggalian	2,80	2,80	2,93	2,93	2,84	2,54	2,61	2,58	2,62	2,54
3. Industri Pengolahan	18,62	18,62	18,52	18,65	18,76	18,00	18,27	18,59	18,71	18,77
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,54	0,54	0,54	0,56	0,56	0,68	0,67	0,66	0,69	0,67
5. Bangunan/ Konstruksi	9,08	9,08	9,56	9,74	9,94	8,29	8,50	8,57	8,66	8,79
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	14,53	14,53	14,56	14,77	14,85	15,04	14,99	15,19	15,16	15,53
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,64	5,64	5,79	5,84	5,98	5,05	5,07	5,03	5,03	5,32
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,72	2,73	2,74	2,79	2,82	2,67	2,62	2,55	2,60	2,67
9. Jasa-jasa	18,24	18,24	19,41	19,43	19,49	18,13	18,51	18,51	18,70	19,00
PDRB Kab. Magelang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Tinjauan Ekonomi Kabupaten Magelang 2013
BPS Kabupaten Magelang, 2015 (** angka sementara)

2. LAJU INFLASI

Angka inflasi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Sedang yang dimaksud dengan inflasi adalah angka yang menggambarkan perubahan (dalam persentase) indeks harga konsumen (IHK) yang terjadi pada suatu periode waktu dengan periode waktu sebelumnya.

Pengertian Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menggambarkan perubahan harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum pada suatu periode waktu dengan periode tertentu yang telah ditetapkan.

Laju inflasi biasanya disebabkan antara lain oleh perubahan ketersediaan uang ditangan masyarakat (money supply) sebagai akibat dari kebijakan moneter yang diambil bank sentral, kebijakan pemerintah tentang

harga barang/jasa tertentu (pricing policy), kebijakan tentang subsidi, naik turunnya produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Laju inflasi Kabupaten Magelang antara Tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi sesuai harga-harga yang berlaku di masyarakat, namun tetap bergerak pada batas psikologis, yaitu kisaran satu digit. Data inflasi selengkapnya bisa dilihat dalam Tabel 3.8 berikut.

Laju inflasi pada level satu digit ini, menurut BPS Kabupaten Magelang, menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa di Kabupaten Magelang pada Tahun 2010-2014 masih dapat dikendalikan.

Tabel 3.8
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan
Nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Magelang
Tahun 2010 – 2014

Tahun	Kab. Magelang	Prov. Jawa Tengah	Nasional
2010	8,25	6,88	6,96
2011	2,64	2,68	3,79
2012	2,59	4,24	4,30
2013	8,49	7,99	8,38
2014	7,91	8,22	8,36

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2015

Apabila dilihat menurut kelompok pengeluaran selama periode 2010-2014 maka tingkat inflasi yang paling fluktuatif adalah kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi dan komunikasi. Terlihat bahwa kelompok bahan makanan mencapai tingkat inflasi yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lain. Kelompok transport dan komunikasi yang mencapai inflasi tertinggi pada tahun 2013 karena merupakan dampak dari kenaikan harga BBM. Data inflasi menurut kelompok pengeluaran selengkapnya disajikan dalam Tabel 3.9. berikut:

Tabel 3.9
Perkembangan Laju Inflasi Tahunan
Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Magelang
Tahun 2010 – 2014 (%)

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Umum	8.25	2.64	2.59	8.49	7,91
2.	Bahan Makanan	24.48	4.71	4.12	15.74	13,02
3.	Makanan Jadi	5.11	3.81	5.29	4.48	5,23
4.	Perumahan	0.68	0.47	1.39	3.73	7,83
5.	Sandang	3.72	4.69	2.95	-1.83	3,44

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
6.	Kesehatan	2.28	1.07	2.99	2.19	3,30
7.	Pendidikan	0.24	0.07	0.56	1.94	2,36
8.	Transport	1.62	0.28	1.52	14.72	10,48

Sumber Data : BPS Kabupaten Magelang, 2015

3. PDRB PER KAPITA

Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB per kapita memberikan informasi mengenai kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah dalam satu tahun. PDRB per kapita didapatkan dari angka PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun.

Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Magelang menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, yakni pada Tahun 2009 sebesar Rp 6.084.655,- menjadi Rp 8.851.875,- pada Tahun 2013. Demikian juga PDRB per kapita atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak sebesar harga berlaku. PDRB per kapita Kabupaten Magelang Tahun 2009-2013 selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
PDRB Per Kapita Kabupaten Magelang
Tahun 2009-2013 (Rp)

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
2009	6.084.655,82	3.351.396,72
2010	6.784.073,12	3.481.023,26
2011	7.371.214,15	3.607.406,54
2012	7.984.900,72	3.725.600,05
2013	8.851.875,08	3.926.818,06

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2014

4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM merupakan indikator komposit yang dibentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran per kapita.

Perkembangan IPM Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik dari 71,43 (2008), menjadi 73,14 (2012) dengan peningkatan sebesar 2,39.

Tabel 3.11
Perbandingan Kondisi IPM Kabupaten Magelang Tahun 2008-2012

Cakupan Wilayah	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Magelang	71,43	71,76	72,08	72,69	73,14
Jawa Tengah	71,60	72,10	72,49	72,94	73,36
Indonesia	71,17	71,76	72,27	72,77	73,29

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005-2012, Kerjasama BPS dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS Kabupaten Magelang, 2014

IPM dihitung untuk mengungkapkan status pembangunan manusia. Dari nilai IPM Tahun 2012 yang sebesar 73,14 menjadikan Kabupaten Magelang masuk kategori kelas menengah atas karena nilai IPM berkisar antara 66 s/d 79,99 (menurut skala internasional). Data terbaru dari BPS Kabupaten Magelang, IPM tahun 2013 adalah 73,67. Daerah yang masuk kategori pembangunan manusianya tinggi apabila nilai IPM-nya lebih dari 80, kategori kelas menengah kebawah apabila nilai IPM berkisar 50-65,99 dan daerah dengan kelas pembangunan manusianya rendah apabila IPM-nya kurang dari 50.

Predikat pembangunan manusia dengan kelas menengah diperoleh oleh semua kabupaten/kota di eks Karesidenan Kedu. Namun bila nilai indeksinya diperbandingkan, maka akan didapat bahwa Kabupaten Magelang menduduki posisi ke-4 se eks Karesidenan Kedu setelah Kabupaten Purworejo yang berada pada urutan ketiga, Kabupaten Temanggung pada urutan kedua, dan Kota Magelang yang berada pada urutan pertama. Sedangkan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang berada pada urutan ke 18.

Tabel 3.12
Nilai dan Peringkat IPM Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu Tahun 2012*

No	Kabupaten/Kota	Nilai PM	Peringkat Kedu	Peringkat Jateng
1.	Kab. Kebumen	71,86	5	24
2.	Kab. Purworejo	73,53	3	15
3.	Kab. Wonosobo	71,45	6	31
4.	Kab. Magelang	73,14	4	18
5.	Kab. Temanggung	74,71	2	7
6.	Kota Magelang	77,26	1	3

IPM disusun oleh tiga indikator: lama hidup yang diukur dengan Angka Harapan Hidup Ketika Lahir (e_0); pendidikan yang diukur berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) dan Angka Melek Huruf (Lit); dan standar hidup yang diukur dengan Pengeluaran Per Kapita (PPP-*Purchasing Power Parity*/paritas daya beli, dalam rupiah). Nilai dari masing-masing komponen IPM di Kabupaten Magelang Tahun 2012, sebagai berikut:

- Angka Harapan Hidup (tahun) : 70,23
- Angka Melek Huruf (persen) : 93,31
- Rata-rata Lama Sekolah (tahun) : 7,55
- Pengeluaran Riil Per Kapita disesuaikan (Rp 000) : 641,45

Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Jenis variabel atau indikator tersebut terbagi kedalam indikator input, proses dan output. Sebagai contoh: Angka Harapan Hidup merupakan indikator dampak (output) dari angka kematian bayi sebagai sasaran pembangunan. Angka kematian bayi sendiri dipengaruhi oleh cakupan imunisasi, penolong persalinan dan lain sebagainya (merupakan indikator proses).

Secara umum, Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Magelang berada di urutan ke-5 se eks Karesidenan Kedu. Angka Melek Huruf pada urutan ke-3. Rata-rata lama sekolah berada diurutan ke-3 dan Pengeluaran Riil Perkapita Penduduknya berada pada urutan ke-3. Adapun IPM secara umum berada pada peringkat ke-4. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan di setiap kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu menghasilkan output yang berbeda-beda dampaknya terhadap pembangunan manusia.

Angka harapan hidup dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dijalani seseorang hingga akhir hayat. Angka ini dapat dihitung dengan bantuan tabel kematian (*life table*) dan beberapa program paket komputer. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan “lama hidup” dan “hidup sehat”. Lama hidup seseorang tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, apabila membicarakan usia harapan hidup maka tidak akan terlepas dari pembicaraan upaya peningkatan taraf kesehatan.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Magelang Tahun 2013 adalah 70,63 tahun. Artinya, pada Tahun 2013 seorang penduduk Kabupaten Magelang akan mempunyai harapan untuk terus hidup sampai usia 70,63 tahun. Selama periode satu tahun terakhir Angka Harapan Hidup di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan, yaitu dari 70,18 tahun pada Tahun 2011 menjadi 70,23 tahun di Tahun 2012, dan meningkat menjadi 70,63 tahun di tahun 2013. Bila dibandingkan dengan Jawa Tengah, Tahun 2008 sampai Tahun 2012 Angka Harapan Hidup Kabupaten Magelang secara umum masih dibawah Angka Harapan Hidup Jawa Tengah.

Angka Harapan Hidup yang cukup tinggi tersebut merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik dan kepedulian terhadap kesehatan dengan cara merawatnya yang cukup tinggi.

Faktor kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik, diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud.

Indeks pendidikan bisa dihitung setelah didapat Angka Melek Huruf (Lit) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Berikut ini akan dibahas secara singkat tentang kedua indikator tersebut.

Kesepakatan pakar menyebutkan bahwa pada Tahun 2015 angka *enrollment* (tingkat kesertaan sekolah) disekolah dasar harus mencapai 100%. Angka melek huruf merupakan salah satu indikator dibidang pendidikan yang diukur dengan kemampuan untuk membaca dan menulis. Semakin tinggi nilai indikator ini, maka akan semakin tinggi mutu sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat berarti bagi pembangunan, baik pembangunan manusianya sendiri maupun pembangunan secara keseluruhan.

Angka Melek Huruf masyarakat Kabupaten Magelang pada Tahun 2012 sebesar 93,31%, meningkat menjadi 93,64% pada tahun 2013. Angka ini lebih tinggi dari angka melek huruf Jawa Tengah yang mencapai 90,45%, namun di wilayah eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang berada pada urutan ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Angka ini dicapai berkat upaya Pemerintah Kabupaten Magelang yang sungguh-

sungguh untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Upaya yang telah dilaksanakan tersebut diantaranya dengan mendekatkan sarana pendidikan dasar ke tempat tinggal penduduk dengan tersebarnya Sekolah Dasar (SD) ke semua desa.

Angka Melek Huruf tersebut merupakan langkah awal yang cukup baik sebagai pijakan untuk pembangunan sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Fakta terakhir menunjukkan bahwa semakin baik sumber daya manusianya, maka penguasaan terhadap ekonomi/kesejahteraan akan semakin dominan. Ini dibuktikan dengan penguasaan ekonomi oleh negara-negara maju yang sumber daya alamnya terbatas, akan tetapi karena penguasaan teknologi yang baik menjadikannya sebagai salah satu penguasa ekonomi dunia.

Indikator untuk mengukur pembangunan manusia dibidang pendidikan salah satunya adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang dipakai UNDP dalam menghitung rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk usia 25 tahun ke atas. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas ditanyakan rata-rata lama sekolahnya. Tetapi dalam pembahasan ini yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas dan penghitungan rata-rata lama sekolahnya memakai metode tidak langsung, dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Tingkat kemampuan baca tulis masyarakat yang cukup tinggi belum diimbangi dengan kesadaran untuk mengenyam pendidikan formal yang lebih panjang. Ini dibuktikan dengan tingkat lama sekolah Kabupaten Magelang Tahun 2012 dan 2013 yang baru mencapai 7,55 tahun. Meskipun angka ini lebih tinggi dibanding angka Jawa Tengah (rata-rata lama sekolah untuk Jawa Tengah sebesar 7,39 tahun), namun bila diamati se eks Karesidenan Kedu lamanya sekolah masyarakat Kabupaten Magelang terletak pada urutan yang kedua setelah Kota Magelang yang sebesar 10,36 tahun.

Dengan rata-rata lama sekolah yang sebesar 7,55 tahun, dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Magelang telah menempuh pendidikan selama 7,55 tahun atau setara menduduki bangku kelas 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Hasil penghitungan Angka Lama Sekolah untuk penduduk Kabupaten Magelang periode 2009-2013 mengalami kenaikan meskipun agak lamban. Faktor yang menyebabkan lambannya kenaikan angka rata-rata lama sekolah ini antara lain masih tingginya biaya pendidikan yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk mengikuti/melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat dan Bantuan Pendidikan, ternyata belum sepenuhnya mampu secara signifikan mengatasi mahalnya biaya pendidikan. Karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Pendidikan ternyata hanya untuk mencukupi kebutuhan minimum siswa/anak didik, sehingga perlu lebih banyak lagi program-program lain yang berpihak pada mereka yang merasa keberatan atas tingginya biaya pendidikan. Disamping itu perlu diingat pula bahwa angka rata-rata lama sekolah dihitung menggunakan dasar penduduk 15 tahun keatas yang dalam kenyataannya penduduk yang sudah tua dan untuk Kabupaten Magelang umumnya mempunyai lama sekolah yang kecil sehingga mempengaruhi lambannya kenaikan angka ini.

Terlepas dari jalannya yang lamban, faktor lain dari meningkatnya angka rata rata lama sekolah selama periode Tahun 2009 sampai Tahun 2013 ini dimungkinkan adanya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Magelang yang telah putus sekolah untuk kembali ke bangku sekolah melalui sekolah-sekolah terbuka yang ada, disamping mereka tetap bekerja untuk mencari penghasilan. Hal ini dikarenakan terbukanya kesempatan yang lebih banyak dan masyarakat semakin sadar akan arti pentingnya pendidikan.

Kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut.

Dasar penghitungan kemampun daya beli tidak secara langsung dikaitkan dengan salah satu indikator pendapatan yang sudah dikenal luas yaitu PDRB. Alasannya karena tolok ukur pendapatan daerah, produksinya tidak langsung dirasakan oleh penduduk, alasan lainnya karena pendapatan orang yang sama belum tentu mempunyai kemampuan daya beli yang sama

bila kedua orang tersebut mempunyai tempat tinggal yang berbeda. Sehingga perlu dilakukan penghitungan daya beli yang representatif.

Selain PDRB, ada beberapa indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat, seperti: Indeks PPP yang merupakan rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). Hasil evaluasi yang dilakukan dengan cara cermat didapat bahwa metode terakhir yang paling baik untuk dijadikan tolok ukur daya beli masyarakat.

Alasan mengapa rata-rata konsumsi Susenas yang ditimbang dengan IHK tidak dijadikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat adalah karena angka yang didapat hanya mencerminkan perbedaan daya beli masyarakat kota. Tetapi dalam penggunaannya angka IHK tetap digunakan sebagai *deflator* dalam penghitungan perkiraan PPP antar kabupaten/kota dalam harga konstan, sehingga angka yang disajikan dapat diperbandingkan antar daerah.

Kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Magelang pada Tahun 2012 sebesar Rp 641.450.-, kemudian meningkat menjadi Rp 644.480,- pada tahun 2013. Angka ini masih lebih tinggi dari Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Akan tetapi masih lebih rendah dari Kabupaten Kebumen dan Kota Magelang. Bila dibandingkan dengan rata-rata angka Jawa Tengah, maka pengeluaran riil per kapita Kabupaten Magelang lebih rendah, dimana rata-rata angka Jawa Tengah sebesar Rp 643.530,-.

Tabel 3.13
Nilai Komponen-Komponen IPM Kabupaten Magelang
Tahun 2009-2013

No	Komponen	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	70,07	70,12	70,18	70,23	70,63
2.	Angka Melek Huruf (persen)	91,35	91,35	93,29	93,31	93,64
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,26	7,26	7,33	7,55	7,55
4.	Pengeluaran Riil Per Kapita Disesuaikan (Rp 000)	633,26	636,96	638,16	641,45	644,48

Sumber : RPJMD Kab. Magelang 2014-2019, BPS Kabupaten Magelang 2015

5. PEMERATAAN PEMBANGUNAN

Pendapatan regional dapat diumpamakan sebagai kue regional, manakala kue regional ini dibagikan secara merata kepada seluruh penduduk

di wilayah tersebut, maka dikatakan distribusi pendapatannya merata. Sebaliknya jika pembagian kue regional tersebut tidak merata (ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar) dikatakan ada ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Metode untuk mengukur pemerataan pembangunan antar lain Teori *Gini Ratio*, Kriteria Bank Dunia dan Indeks Wiliamson.

Gini Ratio

Koefisien gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, rumus koefisien gini adalah sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10000}$$

G = *Gini Ratio*

P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i-1

k = Banyaknya kelas pendapatan

Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut :

- a. Ketimpangan taraf rendah, bila $G < 0,35$
- b. Ketimpangan taraf sedang, bila G antara $0,35 - 0,5$
- c. Ketimpangan taraf tinggi, bila $G > 0,5$

Dari hasil Susenas 2010, *Gini Ratio* di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 0,2480 yang berarti tingkat ketimpangan rendah. Dari hasil Susenas 2012, *Gini Ratio* di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 0,3250 yang berarti tingkat ketimpangan rendah. Gambaran ini mencerminkan bahwa pendapatan yang diterima masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok pendapatan relatif tidak mempunyai perbedaan yang begitu tajam, namun celah perbedaannya mulai sedikit melebar.

Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40% penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah antara 12% sampai dengan 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/sedang/menengah.
- c. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17%, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

Dari hasil Susenas 2010 menunjukkan, bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Magelang ternyata sudah menerima 26,24% dari total pendapatan. Dari hasil Susenas 2012 menunjukkan, bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Magelang ternyata sudah menerima 22,90% dari total pendapatan. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Magelang menggambarkan ketimpangan rendah atau tingkat pemerataan yang tinggi dan menunjukkan makin merata.

Adapun pemerataan pendapatan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3. berikut :

Tabel 3.14
Pemerataan Pendapatan Berdasarkan Bank Dunia 2008-2012

Indikator	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
40% berpengeluaran rendah	23,14	25,39	26,24	23,00	22,90
40% berpengeluaran sedang	36,35	38,61	38,05	35,30	34,35
20% berpengeluaran tinggi	40,51	36,00	35,71	41,70	42,74

Sumber: *Penduduk Miskin dan Pemerataan Pendapatan, BPS Kabupaten Magelang, 2012*

Indeks Williamson

Indeks Williamson pada dasarnya adalah salah satu bentuk modifikasi dari koefisien variasi, yaitu salah satu ukuran statistik untuk menghitung tingkat sebaran data. Data dengan standar deviasi yang tinggi (nilainya mendekati 1), mengindikasikan adanya variasi yang cukup tinggi atau dengan kata lain ada ketidakmerataan sebaran data.

Dengan mengasumsikan data PDRB perkapita kecamatan sebagai pendekatan dari pendapatan perkapita, metode ini dapat diaplikasikan untuk mengetahui tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan per kapita antar kecamatan. Semakin tinggi variasi datanya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya ketimpangan pendapatan antar kecamatan. Rentang nilai indeks adalah dari nol sampai satu. Idealnya, diharapkan nilai indeks yang mendekati angka nol, yang bermakna pada tingkat pemerataan pendapatan yang semakin baik.

Pada Tabel 3.15 disajikan hasil perhitungan Indeks Williamson, untuk melihat tingkat kesenjangan pendapatan antar kecamatan. Penghitungan dilakukan untuk melihat perkembangan selama Sembilan tahun terakhir berdasar data antara Tahun 2003 sampai 2011. Besar kecilnya ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Magelang.

Tabel 3.15
Indeks Ketimpangan Williamson 2009-2012

Tahun	Ketimpangan Antar Kecamatan	
	ADHK	ADHB
2009	0,4085	0,4071
2010	0,4101	0,4046
2011	NA	NA
2012	0,4096	0,4073
Rata-rata Kabupaten	0,4072	0,4105
Rata-rata Provinsi	0,7032	0,6402

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Magelang, BPS, 2013

Selama periode 2003–2011, rata-rata angka indeks ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Magelang yaitu 0,4072 secara harga berlaku dan 0,4105 secara harga konstan. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB perkapita di Kabupaten Magelang relatif merata bila dibandingkan daerah yang lebih tinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah.

Dari tabel di atas dapat dilihat juga bahwa indeks kesenjangan PDRB per kapita antar kecamatan di Kabupaten Magelang selama sembilan tahun terakhir berada pada kategori sedang yaitu pada besaran 0,4. Baik secara harga berlaku maupun konstan hampir-hampir tidak ada fluktuasi atau perkembangan yang signifikan. Hanya terlihat bahwa secara harga berlaku

nilainya lebih baik dibanding menurut harga konstan. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Magelang relatif kecil dengan kata lain tingkat pemerataan pendapatan semakin membaik.

6. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang pada kurun waktu 2009 sampai dengan 2012 mengalami penurunan sebesar 1,22%. Hal ini mengindikasikan bahwa program penurunan angka kemiskinan bisa dikatakan menunjukkan keberhasilan, meski belum terlalu signifikan.

Angka kemiskinan dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010 turun 1,05%, namun pada Tahun 2011 naik 1,04% hal ini disebabkan oleh kejadian bencana alam meletusnya Gunung Merapi pada Oktober 2010 yang menyebabkan lumpuhnya berbagai sektor pada 7 (tujuh) Kecamatan terdampak langsung yaitu Kecamatan Srumbung, Dukun, Sawangan, Salam, Muntilan, Mungkid dan Ngluwar, terutama sektor pertanian, perkebunan, industri kecil dan menengah. Hal ini yang menyebabkan banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan. Angka kemiskinan pada Tahun 2012 turun kembali pada angka 13,97%. Persentase penduduk miskin selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang
Tahun 2009-2013

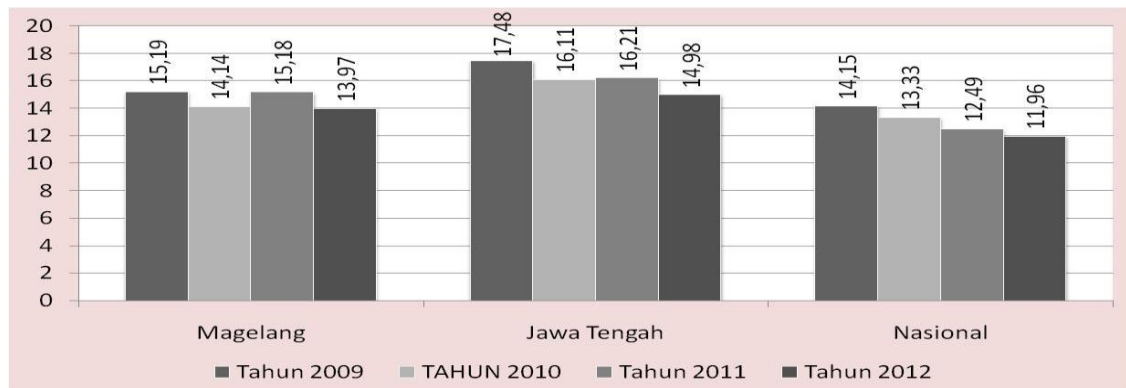
Indikator	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Penduduk miskin (%)	15,19	14,14	15,18	13,97	NA
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	176.500	167.200	179.581	166.200	NA

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, Kabupaten Magelang berada dibawah atau lebih baik dari tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, namun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, Kabupaten Magelang berada diatas atau lebih buruk dari tingkat kemiskinan nasional.

Jika dilihat dari sisi penurunan atau pengurangan angka kemiskinan, angka kemiskinan Kabupaten Magelang terlihat sejajar dengan penurunan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, penurunan angka kemiskinan Kabupaten Magelang bersifat fluktuatif, yaitu menurun pada

Tahun 2009-2010, tetapi meningkat pada Tahun 2010-2011, dan menurun lagi pada Tahun 2011-2012. Sementara pada tingkat nasional penurunan tingkat kemiskinan bersifat konsisten. Data Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009-2013 disajikan dalam Grafik 3.3 berikut:



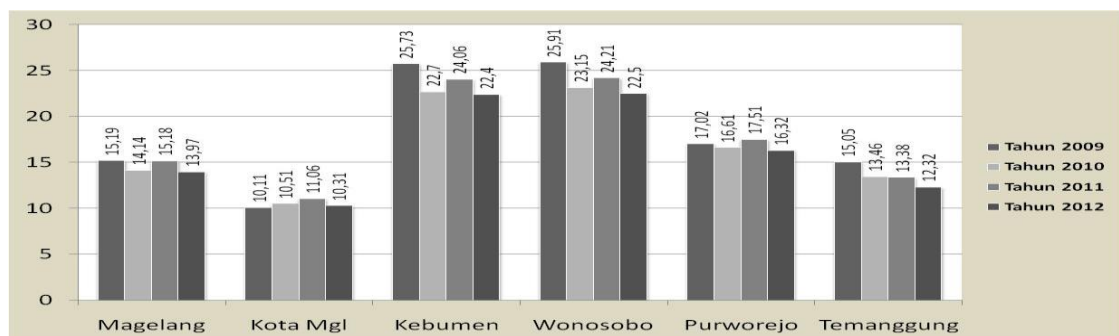
Sumber : TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Grafik 3.3

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2009-2013

Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota seeks Karesidenan Kedu, dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Magelang berada dibawah atau lebih baik dari tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen, Wonosobo dan Purworejo, namun jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang berada diatas atau lebih buruk.

Jika dilihat dari sisi penurunan atau pengurangan angka kemiskinan terlihat bahwa serupa dengan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Purworejo dan Kota Magelang, penurunan angka kemiskinan Kabupaten Magelang bersifat fluktuatif. Sementara hanya di Kabupaten Temanggung, penurunan tingkat kemiskinan bersifat konsisten. Data Perbandingan Tingkat Kemiskinan seeks Karesidenan Kedu Tahun 2009-2013 disajikan dalam Gambar 3.4 berikut:



Sumber : TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Grafik 3.4

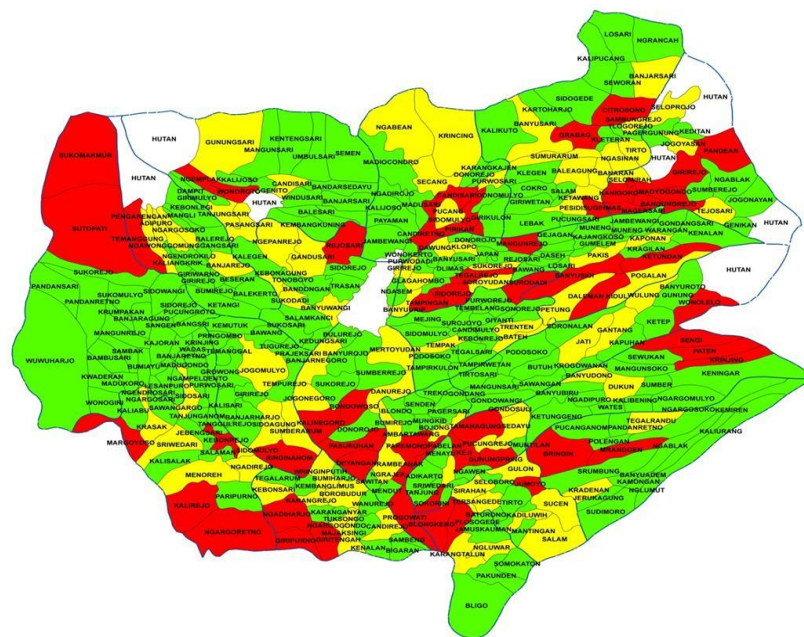
Perbandingan Tingkat Kemiskinan se-Eks Karesidenan Kedu, 2009-2013

Dari pemetaan kemiskinan yang dilaksanakan oleh TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, Kabupaten Magelang termasuk dalam kategori 'tingkat kemiskinan sedang'. Penggolongan tingkat kemiskinan oleh TKPKD Provinsi Jawa Tengah menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Tingkat kemiskinan tergolong tinggi jika angka kemiskinan lebih besar dari 26,23 persen;
- Tingkat kemiskinan tergolong sedang jika angka kemiskinan berada dalam kisaran antara 13,35 dan 26,23 persen;
- Tingkat kemiskinan tergolong rendah jika angka kemiskinan lebih kecil dari 13,35 persen.

Dalam pemetaan ini teridentifikasi bahwa terdapat lima kecamatan tergolong dalam tingkat kemiskinan 'sedang', yaitu: Kajoran (16,39 persen), Kaliangkrik (20,17 persen), Windusari (16,25 persen), Pakis (17,73 persen) dan Ngablak (14,59 persen). Sedangkan 16 kecamatan yang lain tergolong dalam tingkat kemiskinan 'rendah'.

Namun, jika dipilah pada tingkat desa, TKPKD Provinsi Jawa Tengah mengidentifikasi bahwa terdapat 56 desa tergolong dalam tingkat kemiskinan tinggi. Daftar desa yang teridentifikasi mempunyai tingkat kemiskinan tinggi disajikan dalam tabel 3.17, sedangkan letak geografis desa sangat miskin tersebut disajikan dalam Gambar 3.1. berikut:



Sumber : TPKD Prov. Jawa Tengah

Gambar 3.1
Peta Desa Dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi Tahun 2012

Tabel 3.17
Jumlah Desa yang Tegolong Dalam Tingkat Kemiskinan Tinggi
Kabupaten Magelang Tahun 2012

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Salaman	Ngargoretno	29	Mertoyudan	Bondowoso
2	Salaman	Kalirejo	30	Tempuran	Ringinanom
3	Salaman	Kebonrejo	31	Kajoran	Sutopati
4	Salaman	Margoyoso	32	Kajoran	Sukomakmur
5	Borobudur	Giripuro	33	Kaliangkrik	Temanggung
6	Borobudur	Giritengah	34	Bandongan	Rejosari
7	Borobudur	Ngadiharjo	35	Windusari	Wonoroto
8	Ngluwar	Plosogede	36	Windusari	Ngemplak
9	Ngluwar	Blongkeng	37	Secang	Candiretno
10	Salam	Jumoyo	38	Secang	Pirikan
11	Srumbung	Bringin	39	Secang	Sidomulyo
12	Srumbung	Mranggen	40	Secang	Candisari
13	Dukun	Krinjing	41	Tegalrejo	Tampingan
14	Dukun	Paten	42	Tegalrejo	Sidorejo
15	Dukun	Sengi	43	Tegalrejo	Tegalrejo
16	Muntilan	Sokorini	44	Tegalrejo	Mangunrejo
17	Muntilan	Keji	45	Pakis	Daleman Kidul
18	Muntilan	Gunungpring	46	Pakis	Ketundan
19	Muntilan	Tamanagung	47	Pakis	Banyusidi
20	Mungkid	Progowati	48	Grabag	Sugihmas
21	Mungkid	Ngrajek	49	Grabag	Grabag
22	Mungkid	Pabelan	50	Grabag	Citrosono
23	Mungkid	Paremono	51	Ngablak	Magersari
24	Sawangan	Wonolelo	52	Ngablak	Bandungrejo
25	Candimulyo	Surodadi	53	Ngablak	Madyogondo
26	Mertoyudan	Deyangan	54	Ngablak	Kanigoro
27	Mertoyudan	Pasuruhan	55	Ngablak	Girirejo
28	Mertoyudan	Kalinegoro	56	Ngablak	Pandean

Sumber : TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang telah disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan menetapkan strategi: kebijakan ekonomi makro, pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar, pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk, peningkatan keadilan dan kesetaraangender, pembangunan

sarana prasarana wilayah. Pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar dimaksud meliputi:

1. Penyediaan dan perluasan akses pangan;
2. Perluasan akses kesehatan;
3. Perluasan akses layanan pendidikan;
4. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha;
5. Perluasan akses layanan perumahan;
6. Penyediaan air bersih dan sanitasi;
7. Perluasan akses layanan tanah;
8. Perluasan akses layanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
9. Peningkatan rasa aman;
10. Perluasan akses partisipasi.

Dalam perluasan akses berpartisipasi ini terkandung maksud program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa untuk memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat miskin mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program dan kegiatan pembangunan.

7. ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI

Angka kriminalitas tercermin dari banyaknya perkara pidana yang masuk di Pengadilan Magelang. Penanganan tindak kriminal di Kabupaten Magelang masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini ditunjukkan dengan angka kriminalitas yang tertangani masih fluktuatif. Upaya yang diperlukan untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kewaspadaan dini masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18
Angka Kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Magelang
Tahun 2009-2013

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Kejahatan			Angka Kriminalitas
			Lapor	Selesai	Rasio (%)	
1	2009	1.217.671	442	NA	NA	3,63
2	2010	1.181.916	246	NA	NA	2,08
3	2011	1.196.917	220	NA	NA	1,84
4	2012	1.209.375	183	NA	NA	1,51
5	2013	1.221.681	355	NA	NA	2,91

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang, 2014

8. KESEHATAN

Kinerja makro urusan kesehatan antara lain bisa dilihat dari angka Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu(AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan Balita Gizi Buruk.

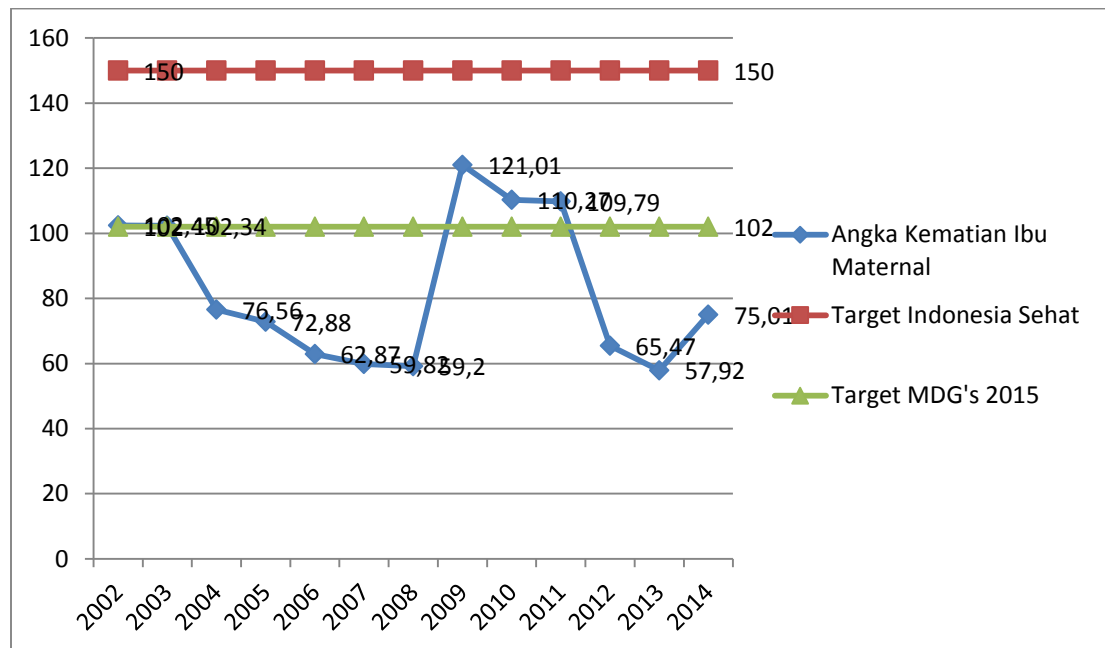
Tabel 3.19
Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2009-2014

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Angka usia harapan hidup (Tahun)	70,07	70,12	70,18	70,23	70,63	NA
Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	121,01	110,27	109,79	65,47	57,92	75,01
Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	6,34/1.000 KH	7,38/1.000 KH	7,09/1.000 KH	6,75/1.000 KH	7,27/1.000 KH	7,98/1.000 KH
Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)	6,83/1.000 KH	8,68/1.000 KH	7,94/1.000 KH	7,60/1.000 KH	8,11/1.000 KH	9,06/1.000 KH
Balita Gizi Buruk (%)	0,17	0,02	0,21	0,09	0,17	0,15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2015

- a. Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu Tahun 2009-2013, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Magelang sebesar 70,07 tahun meningkat menjadi 70,63 tahun pada tahun 2014. Meningkatnya Usia Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Magelang tersebut antara lain disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kesehatannya melalui perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Informasi mengenai tingginya AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi. Upaya untuk menurunkan kasus kematian ibu selama kurun waktu itu dilakukan melalui

forum group discussion (FGD) dan kegiatan kelas ibu hamil, sehingga kesehatan ibu hamil dapat selalu terpantau melibatkan Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak PKK Kabupaten.

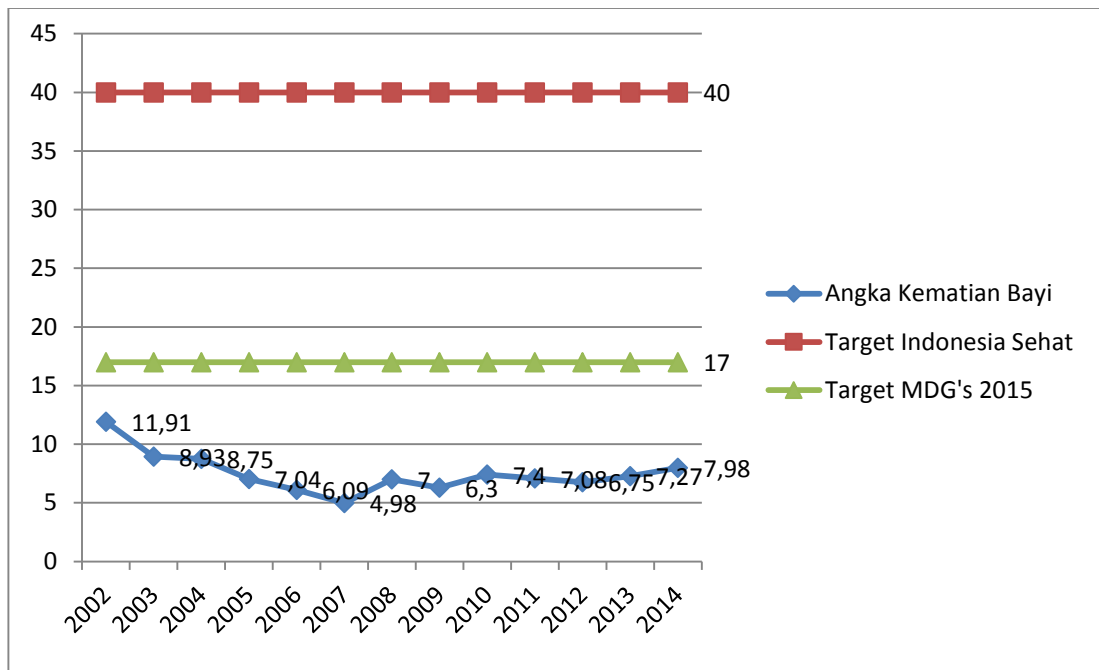


Sumber : Profil Kabupaten Magelang 2014

Grafik 3.5

Berdasarkan target capaian MDG's Kabupaten Magelang pada tahun 2009 – 2011 target capaian MDG's yang belum tercapai adalah pada indikator Angka Kematian Ibu, dimana angka kematian ibu pada tahun 2009 – 2011 masih diatas target MDG's yaitu 102/100.000 KH. Pada tahun 2014 Angka Kematian Ibu mengalami kenaikan dibanding tahun 2013 yaitu 57,92 /100.000 KH menjadi 75,01 /100.000 KH pada tahun 2014, walaupun secara target capaian MDG's sudah tercapai, namun hal ini menjadi catatan penting sebagai bahan evaluasi pada tahun-tahun mendatang.

- c. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH). Dalam kurun waktu tahun 2009-2014 AKB cenderung fluktuatif, walaupun terjadi kenaikan tidak terlalu drastis. Penanganan kematian bayi di Kabupaten Magelang telah berhasil jauh dibawah target Indonesia sehat dan target MDG's, keberhasilan ini tetap harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kejadian kematian bayi semakin menurun dari tahun ketahun. Secara detail angka kematian bayi di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada grafik berikut :



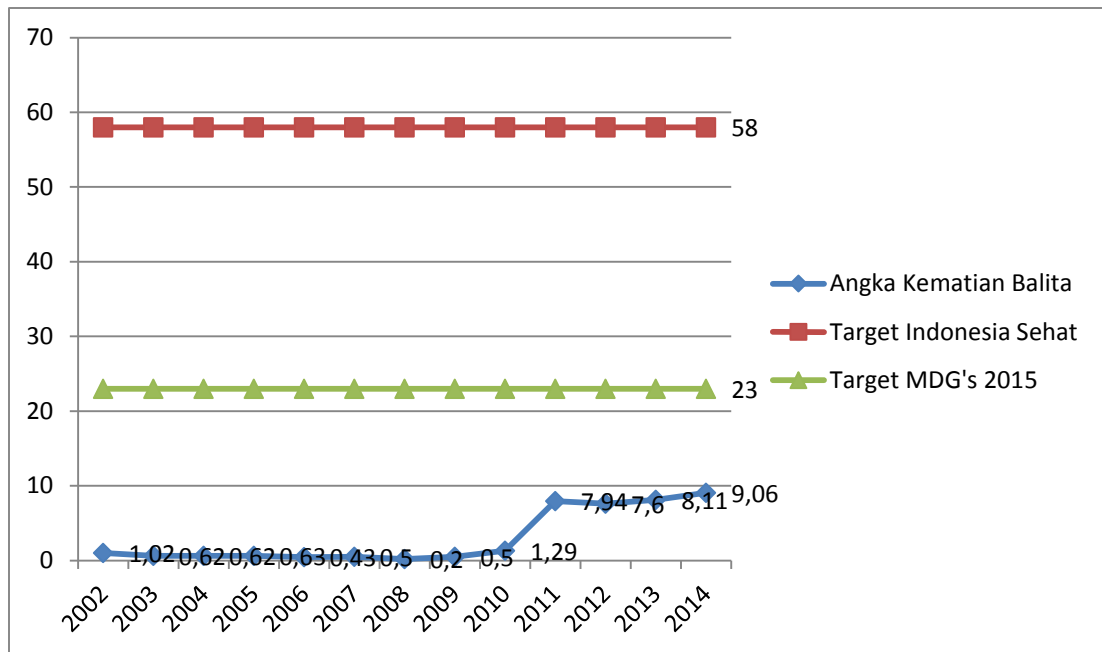
Sumber : Profil Kabupaten Magelang 2014

Grafik 3.6

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang 2002-2014

Berdasarkan grafik diatas angka kematian bayi di Kabupaten Magelang relatif stabil, walaupun pada tahun 2014 terdapat peningkatan kematian bayi namun tidak terlalu tinggi dan angka kematian bayi secara umum masih jauh dibawah target Indonesia Sehat dan MDG's.

- d. Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Sedangkan balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir, yang berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun, 11 bulan, 29 hari). Pada umumnya ditulis dengan notasi 0-4 tahun. Dalam kurun Tahun 2009-2013, AKABA cenderung mengalami kenaikan yaitu pada Tahun 2009 sebesar 6,83/1.000 KH menjadi 9,06/1.000 KH pada tahun 2014. Tingginya AKABA bisa disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yang paling banyak ditemui adalah kurangnya asupan gizi pada balita. Penanganan kematian balita di Kabupaten Magelang telah berhasil jauh dibawah target Indonesia sehat dan target MDG's, keberhasilan ini tetap harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kejadian kematian balita semakin menurun dari tahun ketahun. Grafik berikut menyajikan data AKABA di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2002-2014.



Sumber : Profil Kabupaten Magelang 2014

Grafik 3.7

Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Magelang 2002-2014

Berdasarkan grafik diatas angka kematian balita di Kabupaten Magelang relatif stabil sejak tahun 2002 s/d 2010 relatif stabil dan mengalami peningkatan pada tahun 2011, pada kurun waktu 2011 s/d 2014 terdapat peningkatan kematian balita namun tidak terlalu tinggi dan angka kematian balita secara umum masih jauh dibawah target Indonesia Sehat dan MDG's. Walaupun target MDG's telah tercapai tetap perlu dilakukan langkah-langkah untuk terus menekan angka kematian ibu dan bayi serta target MDG's lainnya, sehingga derajat kesehatan di Kabupaten Magelang semakin meningkat.

- e. Gizi buruk pada anak balita disebut juga kurang energi protein (KEP), yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari. Penyebab timbulnya gizi buruk adalah kurang makan makanan bergizi dalam waktu lama, menderita sakit kronis, dan mengalami gangguan fungsi saluran pencernaan. Balita dengan keadaan gizi buruk ditandai oleh berat badan kurang dari berat badan seharusnya, pada kartu menuju sehat (KMS) letak beratbadan berada di bawah garis merah. Dalam kurun 2009-2014 balita gizi buruk cenderung fluktuatif tetapi sejalan dengan kenaikan AKABA.

3.2.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2014

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Kabupaten Magelang Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program/kegiatan strategis untuk mencapai 22 sasaran strategis dari 31 sasaran strategis yang ada, 136 indikator kinerja dalam 6 misi Pemerintah Kabupaten Magelang 2009-2014. Pencapaian kinerja seluruh sasaran strategis pada tahun 2014 diuraikan sebagai berikut.

MISI I	:	Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama
---------------	----------	---

Sasaran Strategis I.1	:	Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan
------------------------------	----------	--

Pembangunan kesehatan memiliki arah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya dapat terwujud. Jajaran kesehatan daerah khususnya di kabupaten/kota dituntut untuk melaksanakan fungsi pokok sistem kesehatan, yaitu mengarahkan sektor kesehatan setempat, manajemen sumber daya kesehatan yang terbatas, penyediaan biaya kesehatan yang memadai dan melakukan pelayanan kesehatan.

Tujuan sistem kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tanggap/*responsive* dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan berkualitas, keadilan (*fairness*) dalam pembiayaan kesehatan hal ini sesuai dengan World Health Report Tahun 2000 (WHO). *Assesment* kinerja pada tingkat kabupaten/kota perlu dilakukan untuk menilai kinerja sektor kesehatan kabupaten/kota agar dapat dilakukan upaya membantu kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja masih rendah. Upaya tersebut dapat dilakukan provinsi maupun pusat dalam bentuk bantuan teknis dan manajemen, maupun bantuan sumber daya lainnya (sumber daya manusia, keuangan, perbekalan, obat, peralatan dan lain-lain).

Kesehatan merupakan hal mendasar yang menjadi prioritas dari Pemerintah Kabupaten Magelang. Dalam rangka memperbaiki akses, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan salah satu

Sasaran Startegis I.1 yaitu : *Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan.*

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis I.1 tersebut di atas terdiri dari 21 indikator kinerja. Secara keseluruhan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.1.
Meningkatnya Akses, Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Persen	89,3	95	88,07	92,71	95	92,71
2.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	136,10	90	127,68	141,87	95	134,40
3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	99,80	93	99,87	107,39	95	105,13
4.	Cakupan pelayanan nifas	Persen	96,20	90	97,15	107,94	95	102,26
5.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100,50	90	86,36	95,96	100	86,36
6.	Cakupan kunjungan bayi	Persen	96,50	90	104,26	115,84	100	104,26
7.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100,00	100	100	100,00	100	100,00
8.	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	72,30	90	201,02	223,36	90	223,36
9.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persen	100,00	100	100	100,00	100	100,00
10.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100,00	100	100	100,00	100	100,00
11.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	52,59	100	54,14	54,14	100	54,14

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit:							
12.	<i>Acute Flacid Paralysis rate per 100.000</i>	Persen	0,49	5	0,4	192,00	6	193,33
13.	Cakupan balita dengan pnemonia yang ditangani	Persen	91,92	80	16,35	20,44	100	20,44
14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	12,81	80	28,30	35,38	100	28,30
15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00	100	100	100,00	100	100,00
16.	Penemuan penderita diare	Persen	75,49	90	64,60	71,78	100	71,78
17.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100,00	100	58,87	58,87	100	58,87
18.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	15	14	2,35	16,79	100	2,35
19.	Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan RS di kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100,00	100	100,00
20.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang melakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100,00	100	100,00
21.	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100	100	100	100,00	100	100,00
Persentase Capaian Sasaran Strategis I.1						96,88		94,18

Tabeldi atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis I.1 : *Meningkatnya Akses, Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan* pada tahun 2014 adalah **96,88% (baik)**.

Keberhasilan ini didukung oleh capaian kinerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, di mana beberapa indikator kinerja capaiannya melebihi 100% dari target yang ditetapkan. Indikator tersebut merupakan upaya Dinas Kesehatan dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu hamil dan melahirkan serta kesehatan balita, dalam upaya menurunkan AKI, AKB, dan AKABA di Kabupaten Magelang. Keberhasilan penurunan AKI, AKB, dan AKABA diantaranya didukung keberhasilan indikator **Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani** 141,87%, **Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan** 107,39%, **Cakupan pelayanan nifas** mencapai 107,94%, **Cakupan kunjungan bayi** 118,84%, dan **Cakupan pelayanan anak balita** yang mencapai 223,36%. Keberhasilan tersebut tercapai karena adanya peningkatan peran serta masyarakat khususnya melalui pengembangan kegiatan Kelas Ibu, dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut melibatkan tokoh masyarakat, keluarga, PKK dan lembaga swadaya masyarakat bidang kesehatan serta peran aparatur di tingkat desa dan kecamatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, Cakupan pelayanan anak Balita mengalami peningkatan capaian kinerja yang sangat signifikan, dari 86,07% menjadi 223,36%.

Namun demikian, ada beberapa indikator kinerja yang tidak bisa tercapai kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. **Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat** capaian kinerjanya 54,14%. Capaian indikator ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 yang sebesar 52,59%. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pelaksana kegiatan di Puskesmas dan sektor terkait khususnya pihak sekolah, hal ini mengakibatkan cakupan penjangkaran menjadi rendah.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA capaian kinerjanya 35,38%. Capaian indikator ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 16,01%. Indikator ini tidak mencapai targetnya dikarenakan terjadinya *droup out* ketika layanan pengobatan TBC BTA harus berkelanjutan, dimana hal ini terjadi karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan individu dan keluarganya.

Cakupan balita dengan pnemonia yang ditangani capaian kinerjanya 20,44%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 6,96% dibandingkan capaian pada tahun 2013 yang sebesar 27,40%. Hal ini disebabkan karena banyak kasus pneumonia tidak dilaporkan, kebanyakan

penderita pneumonia berobat sendiri atau ke pelayanan kesehatan swasta dan kasus pneumonia yang ditemukan tidak dilaporkan.

Penemuan penderita diare capaian kinerjanya 71,78%. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 12,10% dibandingkan capaian pada tahun 2013 yang sebesar 83,88%. Hal ini disebabkan karena banyak kasus diare tidak dilaporkan, kebanyakan penderita diare berobat sendiri atau ke pelayanan kesehatan swasta dan kasus diare yang ditemukan tidak dilaporkan.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin capaian kinerjanya sebesar 58,87%. Hal ini disebabkan karena jumlah pasien miskin yang berobat menurun, selain itu terdapat kesalahan sasaran pada PPLS 2011 dan belum dilakukan pembaharuan data, hal ini mengakibatkan penerima jaminan pelayanan kesehatan warga miskin baik melalui BPJS maupun Jamkesda berkurang, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya pemanfaatan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Untuk meningkatkan capaian beberapa indikator kinerja yang belum tercapai sesuai dengan yang ditargetkan pada awal tahun, perlu dilakukan revitalisasi peran dan fungsi Desa Siaga dan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) serta keterlibatan seluruh komponen masyarakat.

Bila dibandingkan dengan target RPJMD pada akhir tahun 2014, dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja pada sasaran **Meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan**, 13 (tiga belas) diantaranya capaiannya telah sesuai dengan apa yang ditargetkan dalam RPJMD. Indikator yang telah melampaui target tersebut diantaranya **adalah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan pelayanan anak balita, dan Acute Flacid Paralysis rate per 100.000.**

Beberapa indikator kinerja yang realisasinya masih di bawah angka yang ditargetkan RPJMD 2009-2014, antara lain **Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, dan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.**

Indikator-indikator kinerja urusan kesehatan di atas merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.828/MENKES/SK/IX/2008 tentang

Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Secara garis besar pada Permenkes nomor 741 tahun 2008 ini SPM Bidang Kesehatan meliputi 18 indikator yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, yaitu :

1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
4. Cakupan pelayanan nifas
5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
6. Cakupan kunjungan bayi
7. Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
8. Cakupan pelayanan anak balita
9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin
10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat
12. Cakupan peserta KB aktif
13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit.
 - *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
 - Penemuan penderita pneumonia balita
 - Penemuan pasien baru TB BTA positif
 - Penderita DBD yang ditangani
 - Penemuan penderita diare
14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (rumah sakit) di kabupaten/kota.
17. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam.
18. Cakupan Desa Siaga.

Urusan wajib adalah urusan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum dalam kerangka untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan

perjanjian dan konvensi internasional. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Kabupaten/Kota. Dengan SPM bidang kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan *esensial* dapat dipenuhi pada tingkat paling minimal secara nasional. Sehingga akan dapat mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan diberbagai daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. SPM Bidang Kesehatan diselenggarakan daerah dalam rangka pertanggungjawaban Perangkat Daerah untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan bidang kesehatan.

Tabel 3.21
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2014

No	Indikator	Tahun	Target Nasional	Realisasi 2014	Satuan	Keterangan
1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	2015	95	88.07	Persen	Tidak Tercapai
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	2015	80	127.68	Persen	Tercapai
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	2015	100	99.87	Persen	Tidak Tercapai
4	Cakupan pelayanan nifas	2015	90	97.15	Persen	Tercapai
5	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	2010	85	86.36	Persen	Tercapai
6	Cakupan kunjungan bayi	2010	92	104.26	Persen	Tercapai
7	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	2010	100	100.00	Persen	Tercapai
8	Cakupan pelayanan anak balita	2010	90	201.02	Persen	Tercapai
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	2010	100	100	Persen	Tercapai
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	2010	100	100.00	Persen	Tercapai
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	2010	100	54.14	Persen	Tidak Tercapai
12	Cakupan peserta KB aktif	2010	70	79.70	Persen	Tercapai
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit.					
-	<i>Acute Flaccid Paralysis</i> (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	2010	≥ 2	1,31	per 100.000 Pend.	Tidak Tercapai
-	Penemuan penderita pneumonia balita	2010	100	16,35	Persen	Tidak Tercapai
-	Penemuan pasien baru TB BTA positif	2010	100	28.30	Persen	Tidak Tercapai
-	Penderita DBD yang ditangani	2010	100	100.00	Persen	Tercapai
-	Penemuan penderita diare	2010	100	64,60	Persen	Tidak

No	Indikator	Tahun	Target Nasional	Realisasi 2014	Satuan	Keterangan
						Tercapai
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	2015	100	58.87	Persen	Tidak Tercapai
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	2015	100	2.35	Persen	Tidak Tercapai
16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (rumah sakit) di kabupaten/kota	2015	100	100.00	Persen	Tercapai
17	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	2015	100	100	Persen	Tercapai
18	Cakupan Desa Siaga	2015	85	100.00	Persen	Tercapai

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang 2015

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar target nasional SPM telah terlampaui, dari 18 indikator SPM, satu diantaranya, yaitu Cakupan peserta KB aktif, diampu oleh Bapermaspuas dan KB Kabupaten Magelang.

Dari sisi anggaran, untuk melaksanakan urusan kesehatan, pada tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang mendapat target pendapatan sebesar Rp. 20,681,543,400,- dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.134.892.049.450,- yang terdiri dari dana APBD Kabupaten Magelang sebesar Rp 130,348,094,426,- , APBN sebesar 4.111.915.000,- APBD Provinsi sebesar Rp. 105,587,600,- dan Bantuan Luar Negeri sebesar 326,452,424,-.

Secara umum, bidang kesehatan masih menghadapi kendala kurangnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat, serta belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan. Oleh karena itu, strategi kebijakan di bidang kesehatan hendaknya diarahkan pada :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaranapelayanan kesehatan serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar mutupelayanan kesehatan
- b. Pengembangan kualitas sumberdaya kesehatan
- c. Peningkatan promosi kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat
- d. Peningkatan kemitraan dalam pengawasan peredaran obat termasuk makanan dan perbekalan kesehatan.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan capaian indikator kinerja bidang kesehatan adalah :

1. Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Upaya Kesehatan Masyarakat

3. Pengawasan Obat Dan Makanan
4. Promosi pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
5. Perbaikan gizi masyarakat
6. Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
9. Pelayanan kesehatan penduduk miskin
10. Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
11. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Jiwa/Paru-Paru dan RS Mata
12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
13. Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan
14. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
15. Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis I.2	:	Tercapainya penduduk tumbuh seimbang
------------------------------	---	---

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Sedangkan Keluarga Sejahtera (KS) adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (BKKBN).

Tolok ukur keberhasilan Sasaran Strategis 1.2. *Tercapainya penduduk tumbuh seimbang* terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja, yang capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.2.
Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cakupan peserta KB aktif	Persen	80,53	81	77,29	95,42	85	90,93
2.	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	Persen	75,23	77	77,29	100,38	76,3	101,30
3.	Tingkat prevalensi kesertaan KB pria	Persen	2,33	2	2,39	119,50	4,49	53,23
4.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	44,17	43	44,14	97,35	39,5	97,35
5.	Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja	Persen	100	100	100	100,00	100	100,00
6.	Bina Keluarga Balita		79,14	81,50	78,17	95,91	170,16	45,94
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis I.2</i>						102,31		81,46

Persentase Capaian Sasaran Strategis I.2. *Tercapainya penduduk tumbuh seimbang* pada tahun 2014 adalah sebesar **102,31% (sangat baik)**. Sasaran strategis I.2 memuat 6 (enam) indikator kinerja yang terkait dengan urusan keluarga berencana yang ditangani oleh Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang.

Indikator kinerja **Cakupan peserta KB aktif** pada tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 95,42%. Realisasi cakupan peserta KB aktif pada tahun 2014 sebesar 77,29% lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 80,53%. **Jika dibandingkan dengan RPJMD**, realisasi sebesar 77,29% juga masih di bawah target sebesar 85%, sehingga capaian kinerja pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 90,93%. Jika dibandingkan dengan target nasional SPM, capaian 85% pada akhir tahun 2014, telah melampaui target nasional SPM, yaitu 65%. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah peserta KB Aktif dengan jumlah pasangan usia subur atau dengan kata lain sama dengan Tingkat Prevalensi KB Aktif. Permasalahan ada pada penentuan target yang seharusnya sama tetapi dalam hal ini berbeda, se

Indikator kinerja **Tingkat prevalensi peserta KB aktif** pada tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 100,38%. Realisasi tingkat prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2014 sebesar 77,29% lebih tinggi 2,06% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 75,23%. **Jika dibandingkan dengan RPJMD**, angka sebesar 77,29% pada tahun 2014 telah melampaui angka 76,3% sebagaimana yang telah ditargetkan dalam dokumen RPJMD. Dengan demikian capaian kinerjanya pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 101,30%. Hal ini disebabkan karena strategi pelayanan KB yang dijalankan oleh Bapermas Perempuan dan KB dengan membentuk sinergi antara berbagai pihak berjalan dengan baik. Bapermas Perempuan dan KB menjalin kerjasama yang baik dengan Klinik KB yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Selain itu dukungan dari berbagai pihak seperti TNI Manunggal KB Kesehatan, Bhayangkari Manunggal KB Kesehatan, dan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan juga terus berjalan menjadi momentum rutin pelayanan KB. Unsur organisasi masa perempuan seperti Aisyiyah dan Muslimat NU juga memberikan kontribusi besar dalam proses rekrutmen akseptor KB.

Keberhasilan pencapaian target ini juga tidak lepas dari kerja keras Penyuluh Keluarga Berencana dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana. Meski rasio PLKB tidak ideal yaitu rata-rata 1 PLKB/PKB menangani 5-6 desa tetapi peran aktif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan SubPPKBD di tingkat dusun juga mendukung keberhasilan program pelayanan KB.

Tingkat Prevalensi Kesertaan KB Pria capaian kinerjanya pada tahun 2014 sebesar 119,50%. Realisasi pada tahun 2014 sebesar 2,39%, meningkat 0,06% dibandingkan realisasi tahun 2013 yang sebesar 2,33%. Namun, **jika dibandingkan dengan RPJMD**, realisasi sebesar 2,39% pada tahun 2014 masih jauh di bawah angka target sebesar 4,49%. Dengan demikian, capaian kinerja pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 53,23%. Pemerintah Kabupaten Magelang terus berupaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi kaum pria dalam mengikuti program KB di Kabupaten Magelang. Respon kaum pria dalam mengikuti program Kbcukup bagus, sehingga para akseptor KB Pria ini kemudian mendirikan Paguyuban Priyo Utomo untuk mensukseskan program KB Pria di Kabupaten Magelang.

Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, capaian kinerjanya pada tahun 2014 sebesar 97,35%. Dari data yang didapatkan dari Bapermas dan KB Kabupaten Magelang tahun 2014

tercatat 353.720 Keluarga, 156.121 diantaranya merupakan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (44,14%). Sedangkan data tahun 2013, tercatat ada 348.142 Keluarga, 153.784 adalah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (44,17%). Strategi untuk mengurangi prosentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I adalah dengan melalui program pemberdayaan agar keluarga-keluarga muda lebih mandiri. **Jika dibandingkan dengan RPJMD**, realisasi sebesar 44,14% belum sesuai dengan yang ditargetkan pada akhir periode RPJMD sebesar 39,5%, sehingga capaian kinerja untuk indikator persentase keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I adalah sebesar 97,35%.

Pengukuran indikator ini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS I untuk kemudian bisa diupayakan menjadi KS II. Pentahapan keluarga sebagaimana dikeluarkan oleh BKKBN adalah sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan KB.
2. Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
3. Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materidan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Strategi untuk mengurangi persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I adalah dengan melalui program pemberdayaan, dengan tujuan agar keluarga-keluarga muda lebih mandiri.

Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja capaian kinerjanya pada tahun 2014 sebesar 100,00%, dan capaiannya **telah sesuai dengan apa yang ditargetkan dalam RPJMD**. Dalam rangka mensosialisasikan kesehatan reproduksi remaja, Bapermaspuan dan KB

melaksanakannya langsung ke lapangan, misalnya mendatangi sekolah-sekolah, sehingga hingga akhir tahun 2014 ada 61 Kelompok Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja yang aktif di Kabupaten Magelang.

Bina Keluarga Balita capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah sebesar 95,91%. Realisasi bina keluarga Balita pada tahun 2014 adalah sebesar 78,17 mengalami penurunan sebesar 0,97 dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 79,14. **Jika dibandingkan dengan RPJMD**, realisasi pada tahun 2014 masih jauh dari angka yang ditargetkan, yaitu sebesar 170,16. Dengan demikian capaian kinerja pada akhir periode RPJMD adalah 45,94%. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran keluarga yang mempunyai balita masih rendah, sehingga diperlukan langkah-langkah sosialisasi yang lebih intensif pada tahun-tahun berikutnya.

Berikut ini adalah capaian indikator makro pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2009-2014 :

Tabel 3.23
Data Indikator Makro Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	1,62	1,64	1,6	1,6	1,6	1.73
Rasio Akseptor KB	76,6	77,8	78,8	81,8	75,2	77.29
Rasio <i>Drop Out</i> (DO) KB	8,37	7,69	8,13	7,53	17,85	7,18
Keluarga Pra Sejahtera	99.592	100.490	96.610	88.261	93.256	92.743
Keluarga Sejahtera I (KK)	57.082	57.265	58.129	59.500	60.528	63.778
Keluarga Sejahtera II (KK)	66.480	69.935	72.043	74.395	71.100	72.274
Keluarga Sejahtera III (KK)	85.740	96.000	101.488	111.562	103.436	104.423
Keluarga Sejahtera III Plus (KK)	25.752	17.780	18.825	20.073	19.822	20.902

Sumber : Bapemaspuan dan KB Kabupaten Magelang, 2015

Secara garis besar, di bidang penanganan Keluarga Berencana, Pemerintah Kabupaten Magelang masih menghadapi kendala berupa :

1. Masih tingginya *Unmetneed* angka DO, angka Komplikasi dan Kegagalan, Pernikahan Usia Dini.
2. Partisipasi Pria untuk berKB masih rendah.
3. Penetapan Perkiraan Permintaan Masyarakat dalam pelayanan KB terlalu tinggi, jauh melebihi kemampuan Pemerintah Kabupaten Magelang.
4. PUS Tua (42-49 th), yang termasuk *Unmetneed* tidak ikut KB karena sudah tidak mau ikut KB, dengan alasan sudah tua.

5. Keterbatasan Tenaga Penyuluh yang tinggal sedikit rata-rata 1 penyuluh menangani 5-6 desa bahkan ada kecamatan yang 1 Penyuluh KB membina 10 desa binaan padahal idealnya 1 penyuluh 2 desa.
6. Khusus untuk Medis Operasi Pria, animo masyarakat tidak merata di Kabupaten Magelang, hanya di daerah-daerah tertentu.

Oleh karena itu, kebijakan ke depan hendaknya diarahkan pada peningkatan dan pelembagaan keluarga kecil berkualitas melalui Program KB, serta sosialisasi dan peningkatan cakupan layanan KB.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang dalam rangka mensukseskan gerakan Keluarga Berencana adalah :

1. Program Keluarga Berencana;
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
3. Program Pelayanan Kontrasepsi;
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri;
5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
6. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.

Sasaran Strategis I.3	:	Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu dan teknologi di berbagai bidang, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kompetisi nasional/global
------------------------------	----------	---

Pembinaan olah raga di Kabupaten Magelang telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Sampai saat ini telah terbentuk sarana dan prasarana olah raga diantaranya:

1. Kepengurusan KONI di tingkat Kabupaten Magelang.
2. Mulai dibangunnya stadion olah raga pada Tahun 2012.

Pada urusan perpustakaan, perhatian pemerintah terhadap keberadaan perpustakaan diharapkan akan semakin meningkat. Ke depan, perpustakaan bukan hanya sebagai tempat untuk menyimpan koleksi buku dan majalah, namun perpustakaan lebih sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Dalam perpustakaan, selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital, dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer.

Untuk mencapai Sasaran Strategis I.3 *Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu dan teknologi di berbagai bidang, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kompetisi nasional/global*, urusan Kepemudaan dan Olahraga, serta urusan Perpustakaan ini memuat 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian-capaiannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.3.
Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu dan teknologi di berbagai bidang, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kompetisi nasional/global

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk	per 1000 pddk	0,060	0,052	0,060	115,38	0,062	96,77
2.	Keberadaan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	44.925	46.925	47.345	100,90	57.694	82,06
3.	Persentase pengunjung perpustakaan	Persen	3,41	3,50	2,97	84,86	8,32	35,70
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis I.3</i>						100,38		71,51

Secara keseluruhan, Persentase Capaian Sasaran Strategis I.3 *Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu dan teknologi di berbagai bidang, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kompetisi nasional/global* pada tahun 2014 adalah **100,38% (sangat baik)**.

Indikator kinerja **Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk** capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah sebesar 115,38%. Rasio pada tahun 2014 ini tidak berubah jika dibandingkan dengan rasio tahun 2013, yakni sebesar 0,060 per 1.000 penduduk. **Jika dibandingkan dengan RPJMD**, rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk pada tahun 2014 masih di bawah rasio yang ditargetkan, yakni sebesar 0,062.

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Magelang masih menghadapi kendala terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil pada urusan Pemuda dan Olahraga hendaknya diarahkan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana

olahraga, peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olahraga, serta peningkatan kreatifitas dan motivasi pemuda dalam pembangunan diri, masyarakat, dan bangsa.

Peningkatan kinerja pada urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan melalui **program-program pembangunan**, yaitu Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

Indikator kinerja **Keberadaan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah** capaian kerjanya pada tahun 2014 adalah sebesar 100,90%. Terjadi jumlah peningkatan koleksi buku perpustakaan, dari 44.925 Eksemplar pada tahun 2013 menjadi 47.345 Eksemplar pada tahun 2014, yang disebabkan adanya pembelian bahan pustaka tahun 2014 sebanyak 1.670 Eksemplar dan bantuan buku sebanyak 750 judul/eksemplar dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Jilid II. **Namun jika dibandingkan dengan target RPJMD**, capaian pada tahun 2014 ini adalah lebih rendah, karena RPJMD menargetkan 57.694 Eksemplar pada akhir tahun 2014, sehingga capaiannya adalah 82,06%. **Kegagalan** pencapaian target ini dikarenakan adanya kecenderungan berkurangnya anggaran untuk pengadaan buku perpustakaan. Oleh karena itu, diharapkan nantinya Pemerintah Kabupaten Magelang akan mengalokasikan anggaran yang lebih meningkat untuk pengadaan koleksi buku perpustakaan daerah.

Indikator kinerja **Persentase Pengunjung Perpustakaan** capaian kerjanya pada tahun 2014 adalah sebesar 84,86%. Pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 0,56%, dari semula 3,41% pada tahun 2013 menjadi 2,97%. Namun penghitungan capaian ini belum merepresentasikan persentase pengunjung perpustakaan yang sebenarnya di Kabupaten Magelang, karena Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang mengalami kesulitan di dalam melakukan perhitungan berapa besaran jumlah penduduk yang berusia 5 tahun ke atas di Kabupaten Magelang. Sehingga yang menjadi dasar perhitungan indikator tersebut di atas adalah jumlah kunjungan di 3 (tiga) perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dibagi dengan jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2014. Terjadinya penurunan jumlah pengunjung perpustakaan karena terjadinya kerusakan jaringan internet pada Diskominfo Kabupaten Magelang yang berpengaruh pada

layanan internet, serta sedang direhabnya gedung perpustakaan cabang Grabag selama 3 (tiga) bulan pada tahun 2014.

Berdasarkan data yang tercatat di Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang, pada tahun 2014, jumlah pengunjung perpustakaan di Muntilan, Grabag, dan Deyangan adalah 36.595 Orang, dan jumlah penduduk Kabupaten Magelang berdasarkan proyeksi BPS Kabupaten Magelang adalah 1.233.695 Jiwa. Sedangkan pada tahun 2013, jumlah pengunjung adalah 40.259 Orang, dan jumlah penduduk di Kabupaten Magelang pada akhir tahun 2013 dihitung sebesar 1.181.916 jiwa.

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan dan meningkatkan budaya baca masyarakat Kabupaten Magelang, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang mengintensifkan kegiatan Perpustakaan Keliling melalui Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca pada setiap hari, kecuali hari Jumat. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang telah memiliki 1 unit Mobil Keliling yang digunakan untuk mengunjungi SD, SMP, SMA, Puskesmas dan Unit Pelayanan Publik yang lain yang lokasinya jauh dari perpustakaan daerah yang ada, dan 1 unit Mobil Pintar yang dioperasikan pada 13 titik lokasi yang telah ditentukan sesuai jadwal.

Pemerintah Kabupaten Magelang masih menghadapi kendala terbatasnya sarana Media *Online* yang dimiliki, sehingga pengunjung perpustakaan harus mengantri agar bisa mengakses informasi dari internet. Untuk sementara Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang sudah menyediakan layanan *Wifi /hot spot* untuk mengantisipasi hal ini.

Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Magelang, dimana perkembangan IT dan internet semakin berkembang, masyarakat lebih suka mengunduh informasi yang dibutuhkan lewat layanan internet, sehingga Pemerintah Kabupaten Magelang memerlukan strategi khusus dalam rangka meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan.

Jika dibandingkan dengan RPJMD, realisasi persentase pengunjung perpustakaan pada tahun 2014 sebesar 2,97% belum sesuai dengan besaran yang direncanakan pada akhir tahun 2014, yaitu sebesar 8,32%, sehingga capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2014 adalah 35,70%. Tabel berikut memuat gambaran data yang terkait dengan perpustakaan di Kabupaten Magelang tahun 2010-2014:

Tabel 3.25
Data Perpustakaan Kabupaten Magelang, 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Keterangan
1.	Jumlah Pengunjung	26.606	41.014	41.187	40.259	36.595	
2.	Jumlah Eksemplar Koleksi	39.342	40.763	42.694	44.925	47.345	
3.	Jumlah Judul Koleksi	20.392	21.667	22.344	22.972	23.984	
4.	Jumlah Anggota	7.569	9.841	11.417	11.481	12.133	
5.	Jumlah Peminjam	10.470	19.114	15.510	15.288	13.987	
6.	Jumlah Buku yang Dipinjam	20.054	28.606	24.156	18.762	18.186	
7.	Jumlah Perpustakaan	653	668	683	698	714	
	Perpustakaan Desa	104	119	134	149	164	
	Perpustakaan Masjid	8	8	8	8	8	
	Perpustakaan Kelompok Tani	1	1	1	1	1	
	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2	2	2	2	2	Wesleyan, STTP Tegalrejo
	Perpustakaan Khusus	4	4	4	4	4	Pengadilan Agama Setwan Puskesmas Salam Puskesmas Grabab Kejaksanaan
	Perpustakaan Sekolah	529	529	529	529	529	
	Perpustakaan Keliling	2	2	2	2	2	
	Perpustakaan Umum	1	1	1	1	1	
	Perpustakaan Cabang	2	2	2	2	2	

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Magelang, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah koleksi, judul koleksi, jumlah anggota serta jumlah perpustakaan senantiasa mengalami peningkatan, sedangkan jumlah pengunjung, jumlah peminjam, dan jumlah buku yang dipinjam bersifat fluktuatif.

Namun demikian, secara umum urusan Perpustakaan masih menghadapi permasalahan terbatasnya sarana, prasarana perpustakaan daerah, serta rendahnya minat baca masyarakat. Oleh karena itu kebijakan strategis ke depan pada Urusan Perpustakaan hendaknya diarahkan untuk peningkatan kecerdasan masyarakat dengan mengembangkan minat budaya baca, peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan daerah, serta perbaikan kualitas pelayanan di perpustakaan melalui penyusunan Standar Penyelenggaraan dan Standar Pengelolaan. Program pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran strategis di atas adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Sasaran Strategis I.4	:	Makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak
------------------------------	----------	--

Pendidikan yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Indikator keberhasilan bidang pendidikan banyak menggunakan ukuran yang sudah baku, seperti angka partisipasi, karena dengan mengetahui angka partisipasi, dapat dinilai apakah suatu program/kegiatan disukai atau tidak oleh masyarakat.

Tabel 3.26

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.4.
Makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pendidikan Usia Dini (PAUD)	Lembaga	327	300	355	115,38	210	169,05
2.	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf	Persen	99,91	99,74	99,91	100,17	99,74	100,17
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persen	89,98	98,45	87,02	88,39	98,45	88,39
4.	APM SMP/MTs	Persen	57,04	89,04	62,40	70,08	94,09	66,32
5.	APM SMA/MA/SMK	Persen	33,00	35,40	36,03	101,78	35,40	101,78
6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	104,44	104,50	101,33	96,97	104,50	96,97
7.	APK SMP/MTs	Persen	79,77	96,20	83,52	86,82	96,20	86,82
8.	APK SMA/MA/SMK	Persen	47,34	47,60	50,72	106,55	47,60	106,55
9.	Angka Mengulang (AU) SD	Persen	8,01	8,25	5,93	128,00	8,25	128,12
10.	AU MI	Persen	6,59	5,30	5,34	99,25	5,30	99,25

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhd target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	AU SMP	Persen	0,36	0,20	0,36	20,00	0,20	20,00
12.	AU MTs	Persen	0,39	0,30	0,20	133,33	0,30	133,33
13.	AU SMA	Persen	0,22	0,40	0,07	182,50	0,40	182,50
14.	AU MA	Persen	0,20	1,20	0,06	195,00	1,20	195,00
15.	AU SMK	Persen	0,10	0,45	0,28	137,78	0,45	137,78
16.	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	Persen	0,26	0,10	0,13	70,00	0,10	70,00
17.	APtS SMP/MTs	Persen	0,69	1,01	0,51	149,50	1,01	149,50
18.	APtS SMA/MA/SMK	Persen	0,96	0,91	0,54	140,66	0,91	140,66
19.	Angka Kelulusan (AL) SD Negeri/Swasta	Persen	99,05	99,40	99,99	100,59	99,55	100,44
20.	AL MI Negeri/Swasta	Persen	99,96	99,05	99,98	100,94	99,05	100,94
21.	AL SMP Negeri/Swasta	Persen	99,52	93,43	99,85	106,87	93,43	106,87
22.	AL MTs Negeri/Swasta	Persen	95,84	78,83	99,84	126,65	78,83	126,65
23.	AL SMA Negeri/Swasta	Persen	99,94	94,44	99,97	105,86	94,44	105,86
24.	AL MA Negeri/Swasta	Persen	97,41	78,42	99,87	127,35	78,42	127,35
25.	AL SMK Negeri/Swasta	Persen	99,31	95,15	99,77	104,86	95,15	104,86
26.	Guru memenuhi Kualifikasi S1/D.4	Orang	10.548	5.628	11.690	207,71	5.628	207,71
Persentase Capaian SasaranStrategis I.4						115,50		117,42

Tabeldi atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis I.4 *Makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak* pada tahun 2014 adalah sebesar **115,50% (sangat baik)**. Indikator di bidang pendidikan ini memuat 26 (dua puluh enam) indikator kinerja. Dari indikator-indikator tersebut, tercatat 19 (sembilan belas) indikator dimana capaian kinerja tahunan maupun jangka menengahnya telah berhasil melampaui target. Sedangkan 7 (tujuh) diantaranya masih dibawah target tahunan maupun target jangka menengah.

Indikator kinerja yang berhasil melampaui targetnya diantaranya adalah indikator **Pendidikan Usia Dini (PAUD)**, dimana capaian kerjanya pada tahun 2014 adalah sebesar 115,38%. Jumlah lembaga PAUD

mengalami peningkatan yang cukup pesat, dimana pada tahun 2013 tercatat 327 lembaga, kemudian menjadi 355 lembaga pada tahun 2014. **Jika dibandingkan dengan RPJMD**, jumlah PAUD pada tahun 2014 tersebut telah melampaui angka yang ditargetkan dalam RPJMD sebesar 210 pada akhir tahun 2014. Dengan demikian, capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD sebesar 169,05%.

Keberhasilan peningkatan jumlah PAUD didukung oleh adanya program 1000 PAUD pada tahun 2012, yang kemudian dilanjutkan dengan Program 1 Desa 1 PAUD. Program PAUD di atas dilaksanakan agar semua anak usia dini dapat terfasilitasi untuk bersekolah dan bermain di lembaga PAUD. Agar keberhasilan di dalam mengembangkan jumlah lembaga PAUD ke depan lebih meningkat, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan lebih mengintensifkan di dalam pelibatan *stakeholders* lapisan terbawah yaitu perangkat desa untuk turut serta di dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat agar memasukkan anak usia dininya ke lembaga PAUD terdekat.

Melalui **Program Pendidikan Anak Usia Dini**, Disdikpora Kabupaten Magelang senantiasa terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga PAUD melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan PAUD, pembentukan PAUD Unggulan dan kegiatan akreditasi PAUD.

Indikator **Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK** capaian kinerjanya pada tahun 2014 sebesar 101,78%. APM SMA/MA/SMK pada tahun 2014 tercatat 36,03%, meningkat 0,63% dibandingkan tahun 2013 yang tercatat 35,40%. APM didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dengan persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah SMA/MA/SMK yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM SMA/MA/SMK berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan SMA/MA/SMK. **Jika dibandingkan dengan rencana jangka menengah**, realisasi 36,03% pada tahun 2014 telah melampaui target 35,40% sebagaimana tertulis dalam RPJMD, sehingga capaian kinerja pada akhir periode RPJMD sebesar 101,78%. Hal ini berarti bahwa rata-rata anak yang masuk sekolah SMA/MA/SMK usianya telah memenuhi syarat usia minimal yang dipersyaratkan oleh pemerintah.

Indikator **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK** capaian kinerjanya pada tahun 2014 sebesar 106,55%. APK SMA/MA/SMK pada tahun 2014 tercatat 50,72%, meningkat 3,12% dibandingkan tahun 2013 yang tercatat 47,60. APK didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. **Jika dibandingkan dengan rencana jangka menengah**, realisasi APK SMA/MA/SMK sebesar 50,72% pada tahun 2014 telah melampaui target 47,60% sebagaimana tertulis dalam RPJMD, sehingga capaian kinerja pada akhir periode RPJMD sebesar 106,55%.

Indikator Angka Mengulang (AU) SD, MTs, SMA, MA dan SMK capaian indikatornya pada tahun 2014 berturut-turut adalah 128,00%, 133,33%, 182,50%, 195%, dan 137,78%. Angka Mengulang didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid mengulang pada jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2014, terjadi penurunan jumlah murid yang mengulang pada SD, MTs, SMA, MA, dan SMK. Demikian juga **jika dibandingkan dengan rencana jangka menengah**, semua target RPJMD telah terlampaui pada akhir tahun 2014.

Indikator kinerja **Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs dan SMA/MA/SMK** pada tahun 2014 capaian kinerjanya berturut-turut adalah 149,50% dan 140,66%. Terjadi penurunan Angka Putus Sekolah pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013. Demikian juga **jika dibandingkan dengan target jangka menengah**, APtS SMP/MTs dan SMA/MA/SMK telah melampaui target RPJMD, sehingga capaian kinerja sampai pada akhir tahun 2014 berturut-turut adalah 149,50% dan 140,66%.

Indikator kinerja **Angka Kelulusan (AL) SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK** capaian kinerjanya pada tahun 2014 berturut-turut adalah 100,59%, 100,94%, 106,87%, 126,65%, 105,86%, 127,35%, dan 104,86%. Demikian juga jika dibandingkan dengan target jangka menengah, semua target telah terlampaui pada akhir tahun 2014, sehingga capaian kinerjanya sampai dengan akhir tahun 2014 berturut-turut adalah 100,44%, 100,94%, 106,87%, 126,65%, 105,86%, 127,35% dan 104,86%.

Indikator kinerja **Guru memenuhi Kualifikasi S1/D.4** pada tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 207,71%. Jumlah guru yang berpendidikan S1/D4

terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 tercatat 11.690 guru yang telah S1/D4, dari semula 10.548 orang pada tahun 2013. Keberhasilan ini disebabkan adanya bantuan Gubernur berupa beasiswa untuk melanjutkan studi ke D4/S1 serta adanya kebijakan dari pusat yang mengharuskan guru di semua jenjang pendidikan berkualifikasi minimal S1, sehingga akan terwujud Guru Profesional pada tahun 2015.

Selain faktor di atas, keberhasilan di dalam meningkatkan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1 adalah anjuran agar guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi untuk menyisihkan secara mandiri anggaran untuk melanjutkan pendidikan S1, karena jika sampai dengan tahun 2015 masih ada guru dengan tunjangan profesi namun belum S1, maka tunjangan profesinya tersebut akan dicabut.

Jika dibandingkan dengan dengan target jangka menengah, jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 telah melampaui jumlah yang ditargetkan dalam RPJMD sampai akhir tahun 2014 sebesar 5.628 orang, sehingga capaian kinerjanya sebesar 207,71%.

Sejumlah 7 (tujuh) indikator kinerja bidang pendidikan belum sesuai dengan apa yang direncanakan, yaitu indikator APM SD/MI, APM SMP/MTs, APK SD/MI, APK SMP/MTs, Angka Mengulang MI, Angka Mengulang SMP, dan Angka Putus Sekolah SD/MI.

Indikator **APM SD/MI dan APM SMP/MTs** capaian kinerjanya pada tahun 2014 berturut-turut adalah 88,39% dan 70,08%. Demikian juga **jika dibandingkan dengan target jangka menengah,** realisasi pada tahun 2014 belum sesuai dengan apa yang telah ditargetkan, sebesar 98,45% dan 94,09%, sehingga capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD sebesar 88,39% dan 66,32%. Hal ini disebabkan karena rata-rata anak yang masuk sekolah SD dan SMP usianya belum memenuhi syarat usia minimal yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Sebagaimana peraturan yang berlaku, bahwa usia anak masuk SD adalah 7 tahun, SMP adalah 13 tahun, dan SMA adalah 16 tahun.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi untuk memberikan pemahaman dan kesadaran pada orang tua siswa agar menyekolahkan anaknya pada usia sesuai yang dipersyaratkan, dan himbauan agar sekolah di dalam menerima calon siswanya agar lebih memprioritaskan anak yang telah memenuhi persyaratan umur. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor

MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/BustanulAthfal dan Sekolah/Madrasah.

Indikator kinerja **Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI dan SMP/MTs** capaian kerjanya pada tahun 2014 berturut-turut sebesar 96,97% dan 86,82%. Pada tahun 2014 tercatat APK SD/MI sebesar 101,33%, menurun 3,11% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 104,44%. Sedangkan APK SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 83,52%, mengalami peningkatan sebesar 3,75% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 79,77%. **Jika dibandingkan dengan target jangka menengah**, realisasi pada tahun 2014 belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD berturut-turut adalah 96,97% dan 86,83%.Belum tercapainya target APK SD/MI dan APK SMP/MTs ini disebabkan karena banyaknya anak lulusan SD dan SMP yang melanjutkan sekolahnya ke luar dari Kabupaten Magelang, misal ke Kota Magelang ataupun Ke Yogyakarta. Oleh karena itu, untuk antisipasinya, Pemerintah Kabupaten Magelang akan lebih meningkatkan daya tarik sekolah yang ada di Kabupaten Magelang dan meningkatkan sarana dan prasarana yang dimilikinya.

Indikator kinerja **Angka Mengulang (AU) MI dan AU SMP** pada tahun 2014 capaian kerjanya sebesar 99,25% dan 20,00%. Pada tahun 2014 AU MI mengalami penurunan sebesar 1,25% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 6,59%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan rencana jangka menengah, capaian 5,34% pada tahun 2014 belum sesuai dengan yang ditargetkan dalam RPJMD, sehingga capaian kerjanya hingga akhir tahun 2014 sebesar 99,25%. Demikian juga dengan AU SMP, realisasinya sama dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 0,36%, dan realisasi ini belum sesuai dengan angka yang ditargetkan dalam RPJMD, sebesar 0,20%, sehingga capaian kerjanya hingga akhir periode RPJMD adalah sebesar 20,00%.

Indikator kinerja **Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI** pada tahun 2014 capaian kerjanya sebesar 70,00%. Pada tahun 2014, APtS SD/MI sebesar 0,13%, menurun 0,13% dibandingkan dengan tahun 2013. Namun demikian, besaran 0,13% pada tahun 2014 ini belum sesuai dengan target jangka menengah yang direncanakan sebesar 0,10 pada akhir tahun 2014.

Berikut ini adalah perkembangan capaian indikator kinerja di bidang pendidikan dari tahun 2010-2014 :

Tabel 3.27
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Bidang Pendidikan
Kabupaten Magelang 2010-2014

No	Indikator Kinerja	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Pendidikan Usia Dini (PAUD)	Lemb	189	230	289	327	355
2.	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf	Persen	99,91	99,91	99,86	99,91	99,91
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persen	85,50	90,95	93,04	89,98	87,02
4.	APM SMP/MTs	Persen	59,33	72,12	67,81	57,04	62,40
5.	APM SMA/MA/SMK	Persen	31,12	35,64	37,05	33,00	36,03
6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	100,02	105,59	104,51	104,44	101,33
7.	APK SMP/MTs	Persen	81,27	90,28	88,86	79,77	83,52
8.	APK SMA/MA/SMK	Persen	31,12	35,64	37,05	47,34	50,72
9.	Angka Mengulang (AU) SD	Persen	7,79	7,90	7,43	8,01	5,93
10.	AU MI	Persen	5,34	5,75	5,97	6,59	5,34
11.	AU SMP	Persen	0,44	0,66	0,30	0,36	0,36
12.	AU MTs	Persen	0,84	0,63	0,21	0,39	0,20
13.	AU SMA	Persen	0,46	0,41	0,26	0,22	0,07
14.	AU MA	Persen	2,33	2,02	0,12	0,20	0,06
15.	AU SMK	Persen	0,12	0,16	0,08	0,10	0,28
16.	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	Persen	0,15	0,17	0,20	0,26	0,13
17.	APtS SMP/MTs	Persen	1,17	0,61	0,55	0,69	0,51
18.	APtS SMA/MA/SMK	Persen	0,75	0,89	0,90	0,96	0,54
19.	Angka Kelulusan (AL) SD Negeri/Swasta	Persen	97,79	99,85	100,00	99,05	99,99
20.	AL MI Negeri/Swasta	Persen	95,70	99,66	99,87	99,96	99,98
21.	AL SMP Negeri/Swasta	Persen	88,08	85,97	96,16	99,52	99,85
22.	AL MTs Negeri/Swasta	Persen	74,84	87,33	99,19	95,84	99,84
23.	AL SMA Negeri/Swasta	Persen	98,70	94,16	98,85	99,94	99,97
24.	AL MA Negeri/Swasta	Persen	72,09	83,71	98,23	97,41	99,87
25.	AL SMK Negeri/Swasta	Persen	86,56	78,14	98,95	99,31	99,77
26.	Guru memenuhi Kualifikasi S1/D.4	Orang	6.459	7.450	9.244	10.548	11.690

Sumber : Disdikpora Kabupaten Magelang, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwasecara umum urusan pendidikan masih menghadapi kendala masih rendahnya APK dan APM SMA/MA/SMK. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Magelang masih menghadapi permasalahan belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan, serta kurangnya sarana prasarana pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan strategis

pada Urusan Pendidikan yang akan diambil hendaknya diarahkan pada upaya :

- a. Peningkatan kualitas (mutu), relevansi, dan daya saing pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan yang ada;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal dan informal.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Disdikpora untuk mencapai target-target indikator kinerja di atas adalah :

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
2. Program Pendidikan Menengah;
3. Program Pendidikan Non Formal;
4. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Sasaran Strategis I.5	:	Makin kuatnya karakter sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila
------------------------------	----------	--

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Tujuh unsur kebudayaan universal meliputi kesenian, sistem teknologi, sistem organisasi masyarakat, bahasa, sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi, sistem pengetahuan, dan sistem religi. Pemerintah Kabupaten Magelang memberikan perhatian yang cukup untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Sasaran Strategis I.5 *Makin kuatnya karakter sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila* memuat 3 (tiga) indikator kinerja, yang merupakan urusan kebudayaan dimana capaian-capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.28

Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.5.

Makin kuatnya karakter sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	45	36	54	150,00	24	225,00
2.	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Sarana	18	18	25	138,89	21	119,05
3.	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	508	600	681	113,50	50% (681 Buah)	169,61
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis I.5</i>						134,13		171,22

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis I.5 *Makin kuatnya karakter sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila* pada tahun 2014 adalah **134,13% (sangat baik)**.

Capaian kinerja indikator **Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya** pada tahun 2014 adalah sebesar 150,00%. Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya pada tahun 2014 sejumlah 54 penyelenggaraan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yang sebanyak 45 penyelenggaraan. Hal ini disebabkan karena gencarnya promosi wisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pusat, maupun dengan instansi dan pihak yang terkait dengan kepariwisataan. Selain hal tersebut, semakin bertambahnya jumlah grup kesenian juga mempengaruhi jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sebagai salah satu alat pembinaan terhadap grup kesenian tersebut. Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang tahun 2015 menyebutkan bahwa ada trend kenaikan jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Magelang sebagai berikut.

Tabel 3.29
Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Kesenian
Kabupaten Magelang Tahun 2008-2014

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Grup Kesenian	880	980	1080	1180	1280	1380	1490
Jumlah Gedung Kesenian	3	3	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2008, jumlah grup kesenian setiap tahun mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2014 berjumlah 1.490 grup yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Hal ini menunjukkan keberhasilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Magelang di dalam melakukan pembinaan terhadap keberadaan dan kelestarian grup-grup kesenian yang hidup dan berkembang di Kabupaten Magelang. Sejak tahun 2012 Disparbud Kabupaten Magelang mengintensifkan pementasan/gelar kesenian yang dipusatkan di *Tourism Informatin Center (TIC)*/Mandala Wisata Borobudur ataupun di Daya Tarik Wisata yang lain, seperti di Candi Mendut dan Candi Umbul. Namun demikian, jumlah gedung kesenian tidak mengalami peningkatan, masih berjumlah 3 gedung, dari tahun 2008 hingga tahun 2014.

Jika dibandingkan **dengan RPJMD**, jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2014 sejumlah 54 kali sudah melampaui angka yang ditargetkan dalam RPJMD yaitu sejumlah 24 kali, sehingga capaian kinerja pada akhir tahun 2014 sebesar 225,00%.

Indikator kinerja **Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya** capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah sebesar 138,89%. Pada tahun 2014, jumlah sarana yang tersedia berjumlah 25 buah, jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2013 yang berjumlah 18 buah. Sarana-sarana ini dipergunakan untuk kegiatan yang menunjang kesenian, seperti pementasan dan festival. Namun sarana yang dimiliki belum memenuhi standar seperti yang disyaratkan oleh pemerintah pusat, oleh karena itu direncanakan untuk dibangun teater arena dengan sumber pembiayaan dari pusat (Tugas Pembantuan). **Jika dibandingkan dengan RPJMD**, jumlah sarana sejumlah 25 buah telah melampaui angka yang telah ditargetkan sebesar 21 buah, sehingga capaian kinerjanya sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebesar 119,05%.

Indikator kinerja **Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan** capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah sebesar hanya

sebesar 113,50%. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2014 sejumlah 681 buah dari total 803 buah atau 84,81% yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 508 buah. **Jika dibandingkan dengan RPJMD**, persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sejumlah 84,81% telah melampaui target 50% yang tercantum dalam RPJMD. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab mengapa benda, situs, dan Kawasan Cagar Budaya tidak semuanya bisa diberikan biaya perawatan/pemeliharaan. Selain itu keterbatasan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu kendala di dalam melakukan pengawasan terhadap benda, situs, dan Kawasan Cagar Budaya tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis agar capaian kinerjanya bisa meningkat pada tahun-tahun mendatang, seperti peningkatan anggaran, penambahan jumlah SDM yang menangani obyek tersebut, serta peningkatan kesadaran *stakeholders* baik pemerintah selaku pemangku anggaran dan masyarakat akan arti pentingnya nilai benda, situs, dan Kawasan Cagar Budaya bagi peradaban manusia, khususnya masyarakat di Kabupaten Magelang.

Dalam rangka pelestarian kebudayaan di Kabupaten Magelang, hendaknya pemerintah terus meningkatkan perhatiannya pada perlindungan budaya dan cagar budaya. **Kebijakan** yang diambil pada urusan kebudayaan hendaknya diarahkan pada peningkatan karakter dan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, sertapeningkatan penyelenggaraan kegiatan budaya dan seni.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan adalah :

1. Program Pengembangan Nilai Budaya;
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Sasaran Strategis I.6	:	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
------------------------------	---	---

Pengertian Pemberdayaan Perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Sedangkan definisi Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian anak menurut Undang-Undang adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Indikator kinerja yang menyangkut urusan ini lebih banyak terkait dengan pemberdayaan perempuan, sedangkan untuk indikator yang terkait dengan perlindungan anak belum termuat.

Sasaran Strategis I.6 *Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan* mencakup urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, yang capaian-capaian kinerjanya diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.6.
Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	36	38	2,33	6,13	55,10	4,23
2.	Persentase Angka Melek Huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	Persen	100	100	100	100,00	100	100,00
3.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	62,10	60	62,30	103,83	46,75	133,26
<i>Persentase Capaian Sasaran Strategis I.6</i>						69,99		79,16

Persentase Capaian Sasaran Strategis I.6 *Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan* pada tahun 2014 adalah **69,99% (cukup)**.

Indikator kinerja **Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah** capaian kinerjanya 6,13%. Hal ini disebabkan karena indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PNS perempuan, aparat desa perempuan, anggota dewan legislatif kabupaten dan desa yang perempuan dengan total pekerja perempuan pada tahun 2014. Oleh karena itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisas pada tahun 2014 juga capaiannya masih sangat rendah.

Pemberdayaan perempuan di lembaga pemerintah dimulai dari tingkatan desa, dimana perempuan di desa didorong untuk terlibat secara aktif di dalam kegiatan Posyandu dan BPD, sehingga mereka bisa belajar untuk menyalurkan aspirasi kepada pemerintah dan meningkatkan kemampuan berorganisasi. Peningkatan kemampuan berorganisasi perempuan di Kabupaten Magelang terlihat dari peningkatan jumlah perempuan yang menjabat Kepala Desa. Data dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang menyebutkan, bahwa dari 372 desa/kelurahan yang ada, 20 diantaranya (5,38%) dipimpin oleh perempuan. Dari total anggota DPRD periode 2014-2019 sejumlah 50 orang, 7 orang (14%) diantaranya adalah perempuan. Keterwakilan perempuan di dewan legislatif mengalami peningkatan sebesar 5,11% dibandingkan tahun 2013, dimana dari total anggota DPRD sejumlah 45 orang periode 2009-2014, baru 4 orang (8,89%) yang perempuan.

Indikator kinerja **Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan** pada tahun 2014 capaian kinerjanya adalah 103,83%. Partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,20%, yaitu dari 62,10% pada tahun 2013 menjadi 62,30% pada tahun 2014. **Jika dibandingkan dengan RPJMD**, realisasi sebesar 62,30% pada tahun 2014 telah melampaui angka yang ditargetkan pada akhir periode RPJMD sebesar 46,75%.

Data dari Disnakersostrans Kabupaten Magelang tahun 2014 menyebutkan bahwa jumlah angkatan kerja perempuan sejumlah 275.073 dari penduduk usia kerja perempuan sejumlah 441.508. Sedangkan tahun 2013 jumlah angkatan kerja perempuan adalah sebesar 274.126 jiwa dari penduduk usia kerja perempuan sejumlah 441.425 jiwa. Sebagai gambaran, berikut adalah tabel mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin Kabupaten Magelang, 2008-2014.

Tabel 3.31
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Magelang, 2008-2014

Jenis Kelamin	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Laki-laki	84,01	83,65	85,77	84,25	87,08	87,44	87,41
Perempuan	61,72	62,18	62,49	58,96	61,98	62,10	62,30
	72,81	72,86	74,08	71,52	74,52	74,77	74,94

Sumber: Disnakersostrans Kabupaten Magelang, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Magelang terus mengalami peningkatan. Secara umum, urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Magelang masih menghadapi permasalahan kurangnya pemberdayaan perempuan dan belum optimalnya upaya perlindungan anak, sehingga kebijakan strategis yang diambil ke depan hendaknya diarahkan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pemerintahan, serta peningkatan kualitas SDM perempuan.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapai sasaran strategis adalah :

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Sasaran Strategis I.7	:	Makin berkurangnya kuantitas dan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
------------------------------	---	---

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti pembangunan kehidupan beragama. Target pembangunan sosial diarahkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sasaran Strategis *Makin berkurangnya kuantitas dan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*, memuat urusan Sosial dengan 8 (delapan) indikator kinerja yang capaian-capaian kinerjanya diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.32
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.7.
Makin berkurangnya kuantitas dan kualitas
Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhd target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah Orsos (panti, yayasan, LSM)	Buah	31	32	39	121,88	32	121,88
2.	Persentase Penanganan PMKS	Persen	0,20	10,20	14,49	142,06	80	18,11
3.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	Persen	0,20	12	13,50	112,50	90	15,00
4.	Persentase PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	1,46	0,35	0,21	60,00	0,71	29,58
5.	Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100,00	100,00	100	100,00
6.	Persentase korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana tanggap darurat lengkap	Persen	0	5	5,16	103,20	0	200,00
7.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan	Persen	50	50	100	200,00	100	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhd target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial							
8.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	0,84	0,90	4,41	490,00	20	22,05
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis I.7</i>						196,57		73,68

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis I.7. *Makin* berkurangnya *kuantitas dan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* pada tahun 2014 adalah sebesar **196,57% (sangat baik)**. Indikator yang termuat dalam sasaran strategis ini merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Pelaksanaan program/kegiatan di bidang sosial meliputi pemberian bantuan bagi PMKS dan pemberdayaan sosial skala kabupaten.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan sosial merupakan salah satu diantara 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Namun demikian ada 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya tidak mencapai target, yaitu **Persentase PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya**, pada tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 60,00%. Hal ini disebabkan karena dari 0,35% yang ditargetkan pada awal tahun, hanya tercapai 0,21% di akhir tahun.

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan **sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial** capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah 200,00%, karena dari 50% yang ditargetkan pada awal tahun 2014, tercapai 100% pada akhir tahun 2014. Dari data Disnakersostrans Kabupaten Magelang, hanya ada 1 (satu) WKSBM, dan sudah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD pada akhir tahun 2014, 4 (empat) indikator kinerja telah sesuai dan bahkan melampaui target RPJMD, seperti **Jumlah Orsos (panti, yayasan, LSM)**, dari 32 buah yang ditargetkan menjadi 39 buah pada akhir tahun 2014. Meskipun capaian kinerja beberapa indikator pada tahun 2014 berhasil, namun jika dibandingkan dengan target RPJMD, ada 4 (empat) indikator kinerja yang capaian realisasinya belum sesuai dengan harapan.

Indikator **Persentase Penanganan PMKS** yang ditargetkan 80% pada akhir periode RPJMD, ternyata hanya tercapai 14,49%, sehingga capaian kerjanya pada akhir tahun 2014 adalah sebesar 18,11%. Demikian juga dengan indikator **Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, Persentase PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, dan Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial** dimana capaian realisasinya masih jauh dengan angka yang ditargetkan dalam RPJMD. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran di bidang sosial, keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menanganinya serta target capaian yang ditetapkan pemerintah pusat terhadap indikator SPM terlalu tinggi.

Berikut adalah gambaran PMKS menurut jenis permasalahannya di Kabupaten Magelang pada tahun 2013 dan 2014.

Tabel 3.33
PMKS menurut Jenis Permasalahannya di Kabupaten Magelang,
Tahun 2013-2014

No.	Jenis Permasalahan	2013			2014		
		Kasus	Sudah	Belum	Kasus	Sudah	Belum
1.	Anak balita terlantar	182	-	182	200	-	200
2.	Anak terlantar	7.523	55	7.468	2.313	55	2.258
3.	Anak korban kekerasan	47	-	47	5	-	5
4.	Anak nakal	87	45	42	42	-	42
5.	Anak jalanan	72	36	36	13	-	13
6.	Anak cacat	2.295	-	2.295	1.167	-	1.167
7.	Wanita rawan sosial ekonomi	369	-	369	3.994	-	3.994
8.	Wanita korban tindak kekerasan	11	-	11	11	-	11
9.	Lanjut usia terlantar	3.731	90	3.641	4.592	229	4.363
10.	a. Penderita cacat fisik	1.713	-	1.713	2.870	100	2.770
	b. Tuna netra	686	-	686	1.061	-	1.061
	c. Tuna rungu/wicara	233	-	233	1.396	-	1.396
	d. Cacat mental eks psikotik/TL	3.211	-	3.211	223	-	223

No.	Jenis Permasalahan	2013			2014		
		Kasus	Sudah	Belum	Kasus	Sudah	Belum
	e. Cacat mental retardasi	1.047	-	1.047	2.326	-	2
	f. Cacat fisik dan mental	93	-	93	430	-	326
11.	Penca bekas penyakit kronis	373	-	373	373	-	373
12.	Tuna susila	45	20	25	40	12	-
13.	Pengemis	126	-	126	92	-	92
14.	Gelandangan	7	-	7	9	-	9
15.	Bekas napi	294	-	294	228	-	228
16.	Korban penyalahgunaan NAPZA	45	-	45	34	-	34
17.	Keluarga miskin/Gakin	89.484	-	89.484	91.401	15.433	75.968
18.	Keluarga berumah tak layak huni	14.194	-	14.194		-	-
19.	Keluarga rentan	4.609	-	4.609		-	-
20.	Korban bencana alam	531	20	511	218	80	138
21.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	131.008	266	130.742	110.000	15.937	96.675
	% Penanganan		0,20			14,49	

Sumber : Disnakersostrans Kabupaten Magelang, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 110.000 PMKS menurut jenis permasalahannya, pada tahun 2014, sejumlah 15.937 kasus yang bisa ditangani. Jumlah penanganan kasus meningkat, dibandingkan pada tahun 2013, dimana dari 131.008 kasus, hanya tertangani 266 diantaranya. Persentase penanganan PMKS mengalami peningkatan, dari 0,20% pada tahun 2013 menjadi 14,49% pada tahun 2014. Namun, peningkatan persentase pada tahun 2014 disebabkan karena dimasukkannya bantuan kepada keluarga miskin/Gakin sejumlah 15.433 keluarga dalam komponen perhitungan. Keluarga miskin/Gakin yang ditangani merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH), dimana PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Untuk menghadapi banyaknya permasalahan urusan sosial di Kabupaten Magelang, maka kebijakan yang diambil ke depan hendaknya diarahkan untuk pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah sosial, peningkatan nilai-nilai religius dan penghargaan terhadap

kearifan lokal, sertapeningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada urusan sosial untuk mencapai sasaran strategis di atas adalah :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pembinaan Anak Terlantar;
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
6. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya);
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
8. Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan.

MISI II	:	Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing
----------------	----------	--

Sasaran Strategis II.1	:	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka menengah mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten/kota yang cukup maju di Indonesia
-------------------------------	----------	---

Sasaran Strategis II.1 *Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka menengah mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan dengan kabupaten/kota yang cukup maju di Indonesia*, mencakup 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Perindustrian.

Indikator kinerja ketenagakerjaan mencerminkan kesehatan ekonomi atau siklus bisnis secara keseluruhan, yang terdiri dari tingkat partisipasi angkatan kerja dan persentase pencari kerja yang ditempatkan.

Sedangkan pengertian industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Sektor industri memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian Kabupaten Magelang.

Capaian-capaian kinerja pada Urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Perindustrian ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.34**Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.1.**

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka menengah mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten/kota yang cukup maju di Indonesia

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	74,77	75	74,94	99,92	96,78	77,43
2.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	7,26	7,5	16,23	216,40	17,93	90,52
3.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	18,50	18,51	18,77	101,40	19,99	93,90
4.	Produktivitas sektor industri	Persen	80,5	80	81	101,25	72,69	111,43
5.	Kontribusi ekspor hasil industri terhadap total ekspor	Persen	97,82	85	98,53	115,92	79,97	123,21
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis II.1</i>						126,98		99,30

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran II.1 *Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka menengah mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten/kota yang cukup maju di Indonesia* pada tahun 2014 adalah sebesar 126,98% (sangat baik).

Indikator kinerja **Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2014** capaian kinerjanya 99,92%. Meskipun demikian, terjadi peningkatan partisipasi angkatan kerja pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013. Data dari Disnakersostrans Kabupaten Magelang tahun 2013 menyebutkan bahwa partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Magelang tahun 2013 adalah sebesar 74,77%, sedangkan pada tahun 2014 menjadi 74,94% (meningkat sebesar 0,17%). Partisipasi angkatan kerja diperoleh dari perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Namun, **jika dibandingkan dengan target yang tercantum dalam RPJMD 2009-2014**, realisasi partisipasi angkatan kerja masih jauh di bawah yang ditargetkan, yaitu sebesar 96,78%. Dengan kata lain, sampai dengan akhir periode RPJMD, capaian indikator **Tingkat partisipasi angkatan kerja** pada tahun 2014 baru mencapai 77,43%.Tabel berikut menyajikan rincian

partisipasi angkatan kerja berdasarkan golongan umur pada tahun 2013 dan 2014.

Tabel 3.35
Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Magelang Tahun 2013-2014

Golongan Umur	2013		2014	
	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja
15-19	114.851	39.535	115.379	39.457
20-24	67.330	48.982	67.580	49.714
25-29	82.503	61.988	83.878	63.786
30-34	103.535	81.979	104.070	82.409
35-39	85.174	74.299	85.607	75.267
40-44	96.864	86.899	97.774	86.821
45-49	81.189	77.024	81.617	77.481
50-54	70.198	64.048	70.801	64.899
55-59	49.682	40.237	49.700	40.196
60 +	132.372	85.237	132.719	86.300
Jumlah	883.697	660.781	889.123	666.331
Partisipasi Angkatan Kerja	74,77		74,94	

Sumber : Disnakersostrans Kabupaten Magelang, 2015

Indikator kinerja **Persentase pencari kerja yang ditempatkan** pada tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 216,40%. Dari target 7,5% yang ditetapkan pada awal tahun, terealisasi 16,23%. **Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD**, capaian ini sedikit di bawah angka 17,93% sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMD 2009-2014, sehingga capaian realisasinya adalah 90,52%. Sebagai gambaran, berikut ini adalah data Pencari Kerja Kabupaten Magelang 2010-2014.

Tabel 3.36
Data Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Magelang 2010-2014

Tahun	Pencari Kerja	Penempatan	Penghapusan	Sisa	% Penempatan
2010	6.739	2.952	868	2.919	43,80
2011	9.687	1.925	876	6.886	19,87
2012	4.749	2.070	827	1.852	43,59
2013	17.272	1.254	-	16.018	7,26
2014	4.141	672	-	3.469	16,23

Sumber : Disnakersostrans Kabupaten Magelang, 2015

Dengan masih rendahnya capaian-capaian indikator urusan ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka hendaknya

kebijakan strategis yang diambil pada masa mendatang diarahkan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, sertapenempatan dan perluasan kesempatan kerja.

Program-program pembangunan pada Urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran strategis adalah:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Indikator kinerja **Kontribusi sektor industri terhadap PDRB** pada tahun 2014 capaian kinerjanya adalah sebesar 101,40%. Realisasi kontribusi sektor industri tahun 2014 adalah sebesar 18,77%, mengalami peningkatan sebesar 0,27% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 18,50%. Namun demikian, **jika dibandingkan dengan target jangka menengah**, realisasi sebesar 18,77% ini belum memenuhi target sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD, yang tertera 19,99%. Dengan demikian, capaian kinerjanya sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebesar 93,90%. Tabel berikut menunjukkan perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB dari tahun 2010-2014.

Tabel 3.37

Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Magelang 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Industri Pengolahan	1.443691,68	1.602.147,38	1.810.124,09	2.023.782,53	2.260.709,41
2.	PDRB Kab. Magelang	8.022.322,50	8.770.808,59	9.736.556,37	10.814.289,76	12.047.100,23
	% Kontribusi	18,00	18,27	18,59	18,71	18,77

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2015

Indikator kinerja **Kontribusi ekspor hasil industri terhadap total ekspor** pada tahun 2014 capaian kinerjanya adalah 115,92%. Realisasi kontribusi sektor hasil industri terhadap total ekspor pada tahun 2014 adalah sebesar 98,53%, meningkat 0,71% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 97,82%. **Jika dibandingkan dengan target jangka menengah**, realisasi sebesar 98,53% telah melampaui target yang telah ditetapkan, yakni sebesar 79,97% per akhir tahun 2014, sehingga capaian kinerjanya menjadi 123,21%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Disdagsar Kabupaten Magelang, dari total ekspor tahun 2014 sebesar **102.372.675,52\$, 100.866.994,35\$** atau

98,53% di antaranya merupakan ekspor hasil industri, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.38
Kontribusi Ekspor Hasil Industri terhadap Total Ekspor (\$) Kabupaten Magelang Tahun 2013-2014

No	Komoditas	2013	2014
	<u>Industri</u>		
1.	Kayu olahan	83.351.112,19	92.095.069,96
2.	Kulit samak	2.983.081,04	3.108.911,36
3.	Alat rumah tangga dari kayu	-	-
4.	Keripik Singkong	108.416,25	132.997,50
5.	Meubel	1.949.891,63	4.732.330,44
6.	Benang tekstil	197.815,80	257.627,38
7.	Kerajinan kayu	8.448,25	90.445,86
8.	Kerajinan batu	40.000,00	32.333,33
9.	Jamu	50.941,44	228.765,97
10.	Kerajinan kaleng bekas	8.450,00	22.558,31
11.	Industri Pemadam	-	165.954,24
	Jumlah	88.698.156,60	100.866.994,35
	<u>Non Industri</u>		
11.	Daun pakis/bunga potong	1.208.855,00	1.127.993,50
12.	Sisik ikan	396.514,37	-
13.	Agropolitan	368.670,00	377.687,67
	Jumlah	1.974.039,37	1.505.681,17
	Total Industri dan Non Industri	90.672.195,97	102.372.675,52
	% Industri	97,82	98,53

Sumber : Disdagsar Kabupaten Magelang, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa industri kayu olahan dan meubel menyumbangkan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan komoditas yang lain. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2014.

Secara umum, urusan Perindustrian di Kabupaten Magelang masih menghadapi permasalahan sebagai berikut :

- a. Kurangnya daya saing produk industri kecil dan menengah;
- b. Terbatasnya SDM;
- c. Kurangnya akses permodalan industri;
- d. Belum teridentifikasinya keunggulan spasial untuk meningkatkan daya saing daerah.

Oleh karena itu, kebijakan pada Urusan Perindustrian hendaknya lebih diarahkan pada pengembangan industri kecil dan menengah, dengan membuka akses permodalan industri secara lebih mudah.

Program-program pembangunan pada Urusan Perindustrian yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
4. Program Penataan Struktur Industri;
5. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

Sasaran Strategis II.2	:	Makin meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih bermutu
-------------------------------	---	---

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Sasaran Strategis II.2 *Makin meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih bermutu* mencakup 1 (satu) urusan, yaitu Urusan Penanaman Modal, dengan 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.2.
Makin Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Lebih Bermutu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kenaikan/pe nurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Milyar	1.348.528.7 24.000	2.359.925.2 67.000	374.769.3 20.000	15,88	78,70	20,18
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis II.2</i>						15,88		20,18

Persentase capaian Sasaran Strategis II.2 *Makin Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Lebih Bermutu* pada tahun 2014 adalah **15,88%(kurang)**. Sasaran strategis ini hanya memuat 1 (satu) indikator kinerja, yaitu kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah). Pada tahun 2014, capaian kinerja indikator ini sebesar 15,88%, dimana realisasi

PMDN menurun drastis dibandingkan tahun 2013, yaitu dari angka 1.348.528.724.000 menjadi 374.769.320.000 pada tahun 2014. Meningkatnya nilai PMDN secara mencolok pada tahun 2013 disebabkan karena adanya perusahaan yang telah habis masa ijinnya, kemudian melakukan daftar ulang, sehingga nilai aset/modalnya diperhitungkan kembali.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, capaian sampai dengan akhir tahun 2014 tertulis 78,70%. Target ini harus dikoreksi kembali, karena berdasarkan formulasi perhitungan, indikator ini dihitung dengan formula:

$$\text{Kenaikan/Penurunan PMDN} = \text{Realisasi PMDN Th Evaluasi} - \text{Realisasi PMDN th sblm evaluasi}$$

Oleh karena itu, penulisan target yang tepat untuk indikator ini adalah dalam bentuk satuan Milyar Rupiah.

Data perkembangan investasi dalam tabel berikut, dengan mengabaikan angka tahun 2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi PMDN di Kabupaten Magelang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.40
Perkembangan Investasi PMDN Kabupaten Magelang 2010-2014

Tahun	Nilai Investasi (Rp)	Selisih
2010	92.219.171.669	-
2011	227.339.000.000	135.119.828.331
2012	367.748.004.294	140.409.004.294
2013	1.348.528.724.000	980.780.719.706
2014	374.769.320.000	-973.759.404.000

Sumber: BPMPPT Kabupaten Magelang, 2015

Pemerintah Kabupaten Magelang yang sudah menerapkan PTSP berusaha memperbaiki dan menyederhanakan sistem layanan perizinannya, sehingga pemohon makin dimudahkan pengurusan izinnya dengan biaya yang transparan atau bahkan gratis. Saat ini BPMPPT tengah menyempurnakan sistem ketatalaksanaan pelayanannya, seperti penyempurnaan SOP, SPP, dan SP. Dalam upayanya untuk meningkatkan PMDN, BPMPPT Kabupaten Magelang akan terus mengintensifkan sosialisasi prosedur pelayanan perizinan, penyempurnaan prosedur, pengawasan terhadap dokumen-dokumen perizinan yang telah habis masa berlakunya, melaksanakan fasilitasi dan kerjasama kemitraan usaha, monitoring dan evaluasi, serta bimbingan dan sosialisasi kebijakan pelaksanaan penanaman modal. Di bidang peraturan, Pemerintah Kabupaten Magelang juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Magelang.

Secara umum, urusan penanaman modal di Kabupaen Magelang menghadapi permasalahan belum optimalnya kewenangan pelayanan perijinan penanaman modal, belum optimalnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional/PMDN, dan belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Oleh karena itu kebijakan yang diambil ke depan hendaknya diarahkan untuk peningkatan iklim investasi daerah, serta peningkatan pelayanan administrasi investasi.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis II.2 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Sasaran Strategis II.3	:	Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat
-------------------------------	----------	---

Sasaran Strategis II.3 *Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat* terdiri dari 3 (tiga) urusan, yaitu Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Pertanian, dan Urusan Kelautan dan Perikanan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Pengertian Ketahanan Pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan bertujuan untuk mencapai kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan keamanan pangan.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan budidaya hayati termasuk bercocok tanam dan pembesaran hewan ternak. Kabupaten Magelang ditinjau dari keadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat potensial dalam mendukung pertumbuhan

perekonomian di bidang pertanian. Dengan kondisi topografi dan jenis tanah yang beragam memberikan beragam pula pilihan jenis komoditas pertanian yang dapat dikembangkan.

Sumber daya alam berupa air cukup melimpah di wilayah Kabupaten Magelang sehingga sangat berpotensi untuk pengembangan perikanan darat. Kabupaten Magelang mempunyai potensi besar sebagai sentra benih ikan. Jumlah rumah pembenihan ada 5 (lima) Balai Benih Ikan (BBI), yang terdiri dari 3 (tiga) BBI Lokal dan 2 (dua) BBI milik Pemerintah Provinsi dengan didukung 2 (dua) Pasar Ikan Pemerintah Kabupaten dan 10 (sepuluh) pasar desa/kelompok.

Ikan yang diproduksi masyarakat meliputi ikan mas, nila, tawes, lele, gurami, bawal, patin dan lainnya. Selain produksi benih ikan dan ikan konsumsi, juga terdapat pengembangan potensi ikan hias. Budidaya ikan hias yang ada antara lain ikan koi, koko, komet, silkid serta pembesaran arwana *silver* maupun arwana *red*. Produksi benih terbesar adalah benih ikan nila. Selain untuk mencukupi kebutuhan benih ikan tingkat lokal juga untuk mencukupi kebutuhan benih ikan di tingkat Jawa Tengah dan juga dikirim ke Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Sumatra dan Kalimantan. Adapun pusat perbenihan terletak di Kecamatan Mungkid, Muntilan, dan Sawangan.

Capaian-capaian pada indikator kinerja yang masuk dalam Sasaran Strategis II.3 *Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat* ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.41

Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.3.

Makin membaiknya ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ketersediaan bahan pangan (beras)	Ton	18.796	18.796	46.109	245,31	143.720	32,08
2.	Konsumsi dan keamanan pangan	Persen	83,07	83,07	85,42	102,83	83,02	102,89
3.	Distribusi pangan		121,20	121,20	121,20	100,00	108,15	112,07
4.	Produktivitas Padi	Ku/Ha	59,79	59,90	60,07	100,28	58,50	102,68
5.	Kontribusi sektor pertanian	Persen	28,76	27,50	27,97	101,71	24,33	114,96

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhadap target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	terhadap PDRB							
6.	Jumlah produksi perikanan benih	Ekor	1.014.517.500	1.050.000.000	1.202.663.380	114,54	581.267.000	206,90
7.	Jumlah produksi perikanan lauk	Kg	13.246.300	13.750.000	15.488.991,70	112,65	5.355.300	289,23
8.	Angka Konsumsi Protein Ikan	Kg/Kap /Th	13,35	14,40	14,59	101,32	14,50	100,62
<i>Persentase Capaian Sasaran Strategis II.3</i>						122,33		130,32

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis II.3 *Makin* membaiknya *ketersediaan kebutuhan pokok menuju swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat* pada tahun 2014 adalah sebesar **122,33% (sangat baik)**. Sasaran Strategis ini memuat 8 (delapan) indikator kinerja yang dilaksanakan oleh BPPKP, Distanbunhut, dan Dispeterikan Kabupaten Magelang.

Indikator kinerja **Ketersediaan bahan pangan (beras)** capaian kinerjanya pada tahun 2014 mencapai 245,31%. Pada tahun 2014 tersedia 46.109 ton beras per 1000 penduduk, meningkat 27.313 ton dibandingkan tahun 2013 yang tercatat 18.796 ton beras per 1000 penduduk. Indikator kinerja ini di dukung oleh kegiatan intensifikasi produksi padi yang dilaksanakan Distanbunhut Kabupaten Magelang dan kegiatan lumbung pangan serta SL Padi Organik oleh BPPKP Kabupaten Magelang.

Indikator kinerja **Konsumsi dan keamanan pangan** pada tahun 2014 capaian kinerjanya 102,83%. Angka pada tahun 2014 sebesar 85,42% meningkat 2,35% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 85,42%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2014 telah melampaui target RPJMD sebesar 83,02%, sehingga capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebesar 102,89%. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh program/kegiatan seperti penyusunan sumber pangan alternatif, Program Percepatan Konsumsi

Pangan, pengolahan hasil berbahan baku lokal, dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan.

Indikator kinerja **Distribusi pangan** capaian kerjanya pada tahun 2014 mencapai 100,00%. Angka pada tahun 2014 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 121,20. **Jika dibandingkan dengan target jangka menengah**, realisasi pada tahun 2014 telah melampaui target yang tercantum dalam dokumen RPJMD, yaitu sebesar 108,15, sehingga capaian kerjanya hingga akhir tahun 2014 adalah sebesar 112,07%. Distribusi pangan adalah tersedianya pangan dan pasokan pangan secara merata sepanjang waktu, baik jumlah, mutu, aman dan keragamannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh Program/Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Alur Distribusi Pangan dan Harga Pangan.

Meskipun sebagian besar indikator kinerja pada urusan Ketahanan Pangan telah melampaui target dalam RPJMD 2009-2014, namun Pemerintah Kabupaten Magelang masih menghadapi permasalahan, seperti belum optimalnya upaya-upaya penganebaran bahan pangan, dan belum optimalnya upaya-upaya pengamanan pangan. Oleh karena itu, kebijakan ke depan yang diambil hendaknya diarahkan pada pengembangan pangan berbasis potensi lokal dan diversifikasi. **Program** pembangunan yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Indikator kinerja **Produktivitas Padi** capaian kerjanya pada tahun 2014 adalah sebesar 100,28%, dimana produktivitas padi di Kabupaten Magelang adalah 60,07 Ku/Ha. Produktivitas padi meningkat 0,28 Ku/Ha jika dibandingkan produktivitas padi pada tahun 2013 yang sebesar 59,79 Ku/Ha.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD pada akhir tahun 2014, angka 60,07 Ku/Ha ini telah melampaui dari angka yang ditargetkan, yaitu sebesar 58,50 Ku/Ha, sehingga capaiannya menjadi 102,68%. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengupayakan peningkatan ketersediaan bahan pangan, utamanya padi yang merupakan bahan pangan pokok bagi masyarakat di Kabupaten Magelang.

Meningkatnya produktivitas padi di Kabupaten Magelang disebabkan berkurangnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tahun 2014, kegiatan pengendalian OPT, penggunaan pupuk yang sesuai dengan anjuran, adanya bantuan pupuk dan benih kepada kelompok tani, pelatihan SL-PTT Padi dan SRI (*Sistem Rice Intensification*), serta

pembinaan/pendampingan yang intensif kepada kelompok tani, termasuk sosialisasi sistem tanam jajar legowo.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah sebesar 101,71%, karena dari 27,50% yang ditargetkan pada awal tahun 2014 terealisasi 27,97% pada akhir tahun. Namun realisasi pada tahun 2014 ini lebih rendah dari pada tahun 2013 yang mencapai 28,76%.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, indikator **Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB** pada tahun 2014 telah jauh melampaui angka yang telah ditargetkan, yakni sebesar 24,33%.

Program-program intensifikasi dan kelembagaan petani hortikultura yang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani dan meningkatkan nilai tawar komoditas pertanian. Distanbunhut Kabupaten Magelang juga melakukan pembinaan dan pendampingan di dalam pemberian sertifikasi padi organik yang merupakan produk unggulan lokal. Tabel berikut menunjukkan data luas panen, produktivitas, dan produksi padi di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun terakhir :

Tabel 3.42
Data Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Sawah
Di Kabupaten Magelang 2010-2014

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
2010	54.767	59,83	327.650
2011	50.504	59,82	302.090
2012	57.810	59,84	345.933
2013	59.364	59,79	354.966
2014	57.579	60,07	345.883

Sumber: Distanbunhut Kabupaten Magelang, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa luasan panen panen padi selama 5 (lima) tahun terakhir fluktuatif, begitu juga dengan produksinya. Namun produktivitas padi menunjukkan peningkatan sejak tahun 2011 hingga tahun 2014.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada urusan Pertanian adalah :

- a. Semakin meningkatnya kebutuhan pemenuhan pangan masyarakat;
- b. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke non pertanian;
- c. Rendahnya daya saing produk-produk pertanian;

- d. Rendahnya akses pasar komoditas pertanian bagi petani dan kelompok tani;
- e. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani;
- f. Belum optimalnya pengembangan potensi peternakan.

Oleh karena itu, kebijakan pada Urusan Pertanian diarahkan pada Pengembangan agribisnis yang berdaya saing melalui pengembangan sumber daya pertanian, pembukaan akses pasar komoditas pertanian, penguatan kelembagaan petani, serta optimalisasi pengembangan potensi peternakan.

Program-program pembangunan pada urusan Pertanian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

Di sektor perikanan, capaian kinerja **Jumlah produksi perikanan benih** pada tahun 2014 adalah sebesar 114,54%. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan produksi perikanan benih dari semula yang ditargetkan 1.050.000.000 Ekor menjadi 1.202.663.380 Ekor pada akhir tahun 2014. **Jika dibandingkan dengan target RPJMD**, jumlah produksi perikanan benih telah melampaui angka yang ditargetkan, yakni sebesar 581.267 Ekor, sehingga capaiannya sampai dengan akhir periode RPJMD adalah 206,90%.

Jumlah produksi perikanan lauk juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 13.750.000 Kg sebagaimana yang ditargetkan pada awal tahun 2014, menjadi 15.488.991,70 Kg di akhir tahun 2014, sehingga capaian kinerja pada tahun 2014 mencapai 112,65%. **Jika dibandingkan dengan target RPJMD**, jumlah produksi perikanan lauk telah mencapai hampir 3 kali lipat, yakni dari 5.355.300 Kg menjadi 15.488.991,70 Kg, sehingga capaiannya adalah 289,23%.

Keberhasilan di bidang perikanan ini didukung oleh adanya program dan kegiatan yang berasal dari:

1. Bantuan APBD Provinsi berupa pelatihan, bantuan benih dan pakan.

2. Bantuan APBN melalui Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) berupa bantuan benih/induk, pakan dan sarana prasarana untuk paket pembesaran dan pembenihan.
3. *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berasal dari Bank Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan pembuatan pakan dan bantuan alat pembuat pakan.
4. FEDEP (BAPPEDA) berupa pelatihan peningkatan kelembagaan pada kluster perikanan

Sampai dengan akhir tahun 2014, tercatat 324 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang menjadi binaan dari Dispeterikan Kabupaten Magelang.

Indikator **Angka Konsumsi Protein Ikan** capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah sebesar 101,32 Kg/Kap/Th. Angka konsumsi protein ikan mengalami peningkatan 1,24 Kg/Kap/Th dibandingkan dengan tahun 2013, dimana pada tahun 2013 tercatat 13,35 Kg/Kap/Th dan pada akhir tahun 2014 tercatat 14,59 Kg/Kap/Th. **Jika dibandingkan dengan RPJMD**, capaian pada tahun 2014 belum sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu sebesar 17,85 Kg/Kap/Th.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dispeterikan selalu mengupayakan peningkatan konsumsi ikan di masyarakat, antara lain melalui kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, Peningkatan Mutu Olahan Hasil Perikanan dan PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam mengonsumsi ikan sebagai salah satu sumber protein hewani, dan untuk mengenalkan variasi hasil olahan produk perikanan. Tabel berikut menampilkan data produksi perikanan dan konsumsi ikan selama 5 (lima) tahun di Kabupaten Magelang.

Tabel 3.43
Data Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan
Kabupaten Magelang 2010-2014

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah produksi perikanan benih (ekor)	454.913.000	602.761.400	752.098.700	1.014.517.500	1.202.663.380
2.	Jumlah produksi perikanan lauk (Kg)	4.448.000	3.590.200	4.712.386	8.307.800	15.488.991,70

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
3.	Angka Konsumsi Protein Ikan (Kg/Kap/Th)	12,66	12,50	12,88	13,35	14,59

Sumber: Dispeterikan Kabupaten Magelang, 2015

Dari tabel di atas, terlihat bahwa semua indikator pada urusan Kelautan dan Perikanan realisasinya senantiasa mengalami peningkatan. Namun demikian kebijakan yang diambil adalah tetap meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan, serta memasyarakatkan gemar makan ikan sehingga Angka Konsumsi Ikan per kapita meningkat.

Program-program pembangunan pada Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
2. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan;
3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
4. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar.

Sasaran Strategis II.4	:	Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor berbasis ekonomi daerah sehingga mampu menghasilkan komoditas berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian
-------------------------------	----------	---

Sasaran Strategis II.4 *Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi daerah sehingga mampu menghasilkan komoditas berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian* terdiri dari 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Urusan Perdagangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Sedangkan Usaha Kecil Menengah adalah istilah yang mengacu pada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Perdagangan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dan diharapkan dapat berfungsi dan mempunyai peranan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Posisi Kabupaten Magelang yang berada pada poros jalan Yogyakarta-Semarang menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang ramai dilintasi. Hal inilah yang menimbulkan peluang perdagangan barang dan jasa.

Capaian-capaian kinerja pada Sasaran Strategis II.4 ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.44

Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.4.

Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor berbasis ekonomi daerah sehingga mampu menghasilkan komoditas berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase koperasi aktif	Persen	73	76	77,30	101,71	90,00	85,89
2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	70	80	98,08	122,60	98,00	100,08
3.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	10,77	16,09	18,50	114,98	16,09	114,98
4.	Ekspor bersih perdagangan	\$	88.304.242,79	85.000.000	100.528.807,73	118,27	34.724.477,14	289,50
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis II.4</i>						114,39		147,61

Tabel di atas menunjukkan persentase capaian sasaran strategis II.4 *Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor berbasis ekonomi daerah sehingga mampu menghasilkan komoditas berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian* pada tahun 2014 adalah sebesar **114,39 (sangat baik)**.

Indikator kinerja **Persentase Koperasi Aktif** pada tahun 2014 capaian kinerja pada tahun 2014 mencapai 102,95%, karena dari 76% persen koperasi aktif yang ditargetkan pada awal tahun 2014, pada akhir tahun 2014 bisa mencapai 78,25%. **Namun jika dibandingkan dengan target RPJMD**, capaian persentase koperasi aktif sebesar 78,25% pada tahun 2014 masih di bawah angka yang telah ditargetkan dalam RPJMD, yaitu sebesar 90,00%. Berikut ini tabel yang memuat data perkembangan persentase koperasi aktif di Kabupaten Magelang, 2010-2014 :

Tabel 3.45
Perkembangan Persentase Koperasi Aktif
Di Kabupaten Magelang 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Koperasi	545	544	549	576	570
2.	Koperasi Aktif	410	411	418	445	446
3.	Koperasi Tidak Aktif	135	133	131	131	124
4.	% Koperasi Aktif	75,23	75,55	76,14	77,26	78,25

Sumber : Disperinkop dan UMKM Kabupaten Magelang, 2015

Indikator kinerja **Persentase Usaha Mikro dan Kecil** capaian kinerjanya pada tahun 2014 mencapai 122,60%. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, persentase usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan sebesar 28,08%, karena pada tahun 2013 tercatat 70%, sedangkan tahun 2014 tercatat 98,08%. Data dari Disperinkop dan UMKM Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa pada tahun 2014 terdapat 104.600 UMK dari total 106.650 UMKM (98,08%). **Jika dibandingkan dengan RPJMD**, capaiannya adalah sebesar 100,08% karena realisasi tahun 2014 yang sebesar 98,08% telah melampaui angka yang ditargetkan yaitu sebesar 98,00%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil jerih payah Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM dalam upayanya untuk memperkuat perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Disamping keberhasilan-keberhasilan yang telah diuraikan di atas, masih ada permasalahan lain terkait dengan penanganan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, diantaranya masih rendahnya pengelolaan manajemen koperasi, kurangnya akses permodalan, terbatasnya akses dan informasi pasar, serta belum adanya pusat perdagangan bersama/UMKM Center. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil hendaknya diarahkan untuk peningkatan mutu dan kualitas produk koperasi dan UMKM, serta peningkatan pembinaan lembaga perkoperasian dan UMKM.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mencapai Sasaran Strategis II.4 adalah :

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Indikator kinerja **Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB** capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah 114,98%. Kontribusi sektor ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2013, dimana pada tahun 2013 tercatat 10,77% kemudian pada tahun 2014 menjadi 18,50%. **Jika dibandingkan dengan RPJMD**, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB telah melampaui angka yang telah ditargetkan, yaitu 16,09%, sehingga capaiannya pada akhir periode RPJMD adalah 114,98%.

Indikator kinerja **Ekspor Bersih Perdagangan** capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah 118,27%. Pada tahun 2014, ekspor bersih perdagangan Kabupaten Magelang tercatat \$100.528.807,73, senantiasa meningkat karena pada tahun 2013 tercatat \$ 88.304.242,79, dan pada tahun 2012 \$ 76.027.306,85.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, ekspor bersih perdagangan Kabupaten Magelang telah melampaui nilai yang telah ditargetkan, yaitu sebesar \$34.724.477,14, sehingga capaian pada akhir periode RPJMD sebesar 289,50%. Berikut ini merupakan data komoditas ekspor dari Kabupaten Magelang beserta nilainya selama tahun 2013 dan 2014. Sumbangan terbesar ekspor bersih perdagangan berasal dari industri kayu olahan.

Tabel 3.46
Komoditas Eksport Kabupaten Magelang Tahun 2013-2014 (\$)

No	Komoditas	2013	2014	Selisih
1.	Kayu Olahan	83.351.112,19	92.095.069,96	8.743.957,77
2.	Kulit Samak	2.983.081,04	3.108.911,36	125.830,32
3.	Alat Rumah Tangga dari Kayu	-	-	-
4.	Daun pakis/Bunga Potong	1.208.855,00	1.127.993,50	-80.861,50
5.	Keripik Singkong	108.416,25	132.997,50	24.581,25
6.	Meubel	1.949.891,63	4.732.330,44	2.782.438,81

No	Komoditas	2013	2014	Selisih
7.	Benang Tekstil	197.815,80	257.627,38	59.811,58
8.	Sisik Ikan	396.514,37	-	-396.514,37
9.	Kerajinan Kayu	8.448,25	90.445,86	81.997,61
10.	Kerajinan Batu	40.000,00	32.333,33	-7.666,67
11.	Jamu	50.941,44	228.765,97	177.824,53
12.	Kerajinan Kaleng Bekas	8.450,00	22.558,31	14.108,31
13.	Agropolitan	368.670,00	377.687,67	9.017,67
14.	Industri Pemadam	-	165.954,24	165.954,24
	Jumlah Ekspor	90.672.195,97	102.372.685,52	11.700.489,55
	Jumlah Import	2.367.953,18	1.843.877,79	-524.075,39
	Jumlah Ekport Bersih	88.304.242,79	100.528.807,73	12.224.564,94

Sumber : Disdagsar Kabupaten Magelang, 2015

Tujuan ekspor dari Kabupaten Magelang meliputi Korea, Jepang, Hongkong, Thailand, India, Singapura, Australia, Malaysia, Belanda, Inggris, Amerika, Taiwan, China, Arab Saudi dan Belgia. Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Magelang diantaranya adalah pembinaan yang intensif terhadap usaha-usaha yang berorientasi ekspor, monitoring dan koordinasi dengan eksportir, serta ditemukannya komoditas baru yang berorientasi ekspor.

Secara umum, urusan Perdagangan masih menghadapi permasalahan terbatasnya sarana prasarana perdagangan yang memadai, sehingga kebijakan ke depan hendaknya diarahkan pada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kegiatan ekonomi dan pengembangan perdagangan terutama revitalisasi pasar tradisional, yang mendorong pertumbuhan produk unggulan lokal.

Program-program pembangunan pada Urusan Perdagangan yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Strategis II.4 adalah sebagai berikut:

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima/Asongan;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan.

Sasaran Strategis II.5	:	Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah
-------------------------------	----------	--

Sasaran Strategis II.5 *Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah* terdiri dari Urusan Pariwisata, dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Pariwisata menjadi salah satu penopang kegiatan ekonomi di Kabupaten Magelang. Kontribusi sektor pariwisata dihitung dengan pendekatan kontribusi sector hotel, restoran, parkir dan hiburan. Keempat kegiatan tersebut sangat terkait dengan pariwisata, khususnya sebagai fasilitas penunjang bagi wisatawan.

Tabel 3.47

Capaian Kinerja Sasaran Strategis II.5.

Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah kunjungan Wisata	Orang	3.909.593	3.900.000	3.921.463	100,55	4.427.310	88,57
2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	8,86	3	8,12	270,67	16,09	50,47
<i>Persentase Capaian Sasaran Strategis II.5</i>						185,61		69,52

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis II.5 *Makin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah* pada tahun 2014 adalah sebesar **185,61% (sangat baik)**. Sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dimana semua capaian kinerjanya pada tahun 2014 lebih dari 100,00%.

Indikator kinerja **Jumlah kunjungan Wisata** pada tahun 2014 capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah sebesar 100,55%. Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Magelang, dari 3.909.593 orang pada tahun 2013 menjadi 3.921.463 orang pada tahun 2014.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Kabupaten Magelang banyak melakukan kegiatan-kegiatan intensifikasi potensi wisata dan promosi dalam bentuk kerja sama dengan pihak ketiga seperti biro-biro perjalanan, ataupun menyelenggarakan kegiatan seperti *Road Show* dan *Java Promo*. Berikut adalah data kunjungan wisata selama 6 tahun terakhir.

Tabel 3.48
Data Kunjungan Wisata Kabupaten Magelang 2009-2014

No	Tahun	Jumlah	Peningkatan (%)
1.	2014	3.921.463	0,30
2.	2013	3.909.593	10,43
3.	2012	3.540.329	33,89
4.	2011	2.644.194	-9,58
5.	2010	2.924.307	-6,67
6.	2009	3.133.172	

Sumber : Disparbud Kabupaten Magelang, 2015

Indikator **Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD** capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah 270,67%. Pada tahun 2014, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 8,12%, menurun 0,74% dibandingkan tahun 2013, dimana capaian pada tahun tersebut sebesar 8,86%. Jika dibandingkan dengan RPJMD, capaian pada tahun 2014 sebesar 8,12% masih jauh di bawah angka target RPJMD pada akhir tahun 2014 sebesar 16,09%. Tabel berikut menunjukkan perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Magelang tahun 2010-2014.

Tabel 3.49
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD
Kabupaten Magelang 2010-2014

Tahun	PAD	Sektor Pariwisata						%
		Retribusi Obyek Par.	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Parkir	Pajak Hiburan	Total	
2010	76.057.772.876	2.470.714.495	4.640.457.948	1.697.703.056	191.030.800	131.874.645	9.131.780.944	12,01
2011	90.458.918.422	2.636.802.150	4.377.288.220	1.812.943.168	194.023.400	160.343.924	9.181.400.862	10,15
2012	123.722.781.349	4.033.206.295	5.769.718.741	3.135.782.354	433.045.201	271.746.797	13.643.499.388	11,03
2013	173.253.651.914	4.124.431.035	6.641.038.262	3.593.410.841	545.507.650	447.774.200	15.352.161.988	8,86
2014	242.112.665.092	4.089.796.544	9.415.372.689	4.828.337.167	553.108.536	765.241.112	19.651.856.048	8,12

Sumber : DPPKAD Kabupaten Magelang, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa total pendapatan dari sektor pariwisata senantiasa mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir, namun persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena total PAD Kabupaten Magelang yang selalu meningkat setiap tahun.

Dari uraian-uraian di atas, secara umum urusan Pariwisata masih menghadapi permasalahan kurangnya sarana dan prasarana pariwisata, kurangnya SDM pelaku pariwisata, serta kurangnya manajemen pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu kebijakan pada urusan Kepariwisataan diarahkan pada :

1. Peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata, kelembagaan dan SDM kepariwisataan;
2. Peningkatan promosi kepariwisataan;
3. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif.

Program-program pembangunan pada Urusan Kepariwisataan yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan Program Pengembangan Kemitraan.

MISI III	:	Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana daerah
-----------------	----------	---

Sasaran Strategis III.1	:	Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
--------------------------------	----------	---

Sasaran Strategis III.1 *Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat* memuat 1 (satu) urusan, yaitu Urusan Perhubungan.

Urusan Perhubungan terkait dengan transportasi, dimana transportasi memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas penduduk maupun barang. Sarana transportasi berupa moda angkutan umum maupun kendaraan pribadi dapat menjangkau ke seluruh wilayah kabupaten. Permasalahan pada pelayanan umum urusan perhubungan yaitu terjadinya fenomena penurunan *loadfactor* penumpang pada penggunaan angkutan umum dan terjadi kecenderungan peningkatan penggunaan kendaraan pribadi.

Tabel 3.50**Capaian Kinerja Sasaran Strategis III.1.**

Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah angkutan darat dibanding dengan jumlah penumpang	Persen	18,60	17,00	21,97	70,76	65,56	166,49
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis III.1</i>						70,76		166,49

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis III.1 *Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat* pada tahun 2014 adalah **70,76 (cukup)**. Sasaran strategis III.1 hanya memuat 1 (satu) indikator, yaitu **Jumlah angkutan darat dibanding dengan jumlah penumpang**, dimana pada tahun 2014 capaian kinerjanya adalah 70,76%. Data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa pada tahun 2014 tercatat jumlah rit 757.724 dan jumlah penumpang sebesar 3.448.751 orang, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.51

Jumlah Angkutan Umum dan Penumpang di Kabupaten Magelang 2014

No	Jenis Kendaraan	Rit	Penumpang
1.	Bus Besar	33.452	133.808
2.	Bus Malam	38.942	116.826
3.	Bus Sedang	188.369	565.107
4.	Bus Kecil	174.378	697.512
5.	Non Bus	322.583	1.935.498
	Jumlah	757.724	3.448.751

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, 2015

Bila dibandingkan dengan target RPJMD, angka realisasi pada tahun 2014 sebesar 21,97% telah melampaui angka yang ditargetkan yaitu 65,56%. Namun indikator kinerja ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Hal ini disebabkan karena kecenderungan jumlah angkutan darat dan jumlah penumpang yang semakin menurun dari tahun ke tahun, sehingga pembilang dan penyebut dalam formula indikator kinerja di atas makin berkurang, yang

menyebabkan hasil pembagiannya makin besar. Faktor penyebabnya adalah semakin banyaknya orang bepergian dengan menggunakan kendaraan/motorpribadi, yang dirasa lebih nyaman dan lebih cepat sampai ke tempat tujuan dibanding dengan menggunakan angkutan darat.

Diperlukan strategi di bidang perhubungan untuk meningkatkan rasio Jumlah angkutan darat dibanding dengan jumlah penumpang, seperti perbaikan pelayanan di bidang transportasi sehingga penumpang merasa nyaman, dan penambahan jaringan trayek sehingga mempermudah penumpang untuk menjangkau tempat-tempat tujuannya. Ke depan, pengisian target ini bisa disesuaikan dan dihitung lagi dengan melihat kondisi dan *trend* dalam penggunaan alat transportasi oleh masyarakat, ketersediaan angkutan umum, dan fasilitas transportasi dan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Magelang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa urusan perhubungan masih menghadapi kendala kurangnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan, sehingga kebijakan ke depan hendaknya diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan pelayanan angkutan sertapengendalian dan pengamanan lalu lintas.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada urusan Perhubungan untuk mencapai Sasaran Strategis III.1 tersebut di atas adalah:

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Sasaran Strategis III.2	:	Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru
--------------------------------	----------	--

Sasaran Strategis III.2 *Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru* memuat 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Pekerjaan Umum, dan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana dasar bagi warga masyarakat pada urusan pekerjaan umum meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, jaringan irigasi, bendungan, serta penyediaan air bersih. Kabupaten Magelang merupakan daerah agraris dengan topografi pegunungan, sehingga ketersediaan jaringan jalan dan jembatan yang baik sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran transportasi antar wilayah.

Sumber daya mineral adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya mineral di Kabupaten Magelang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian (bahan galian golongan C).

Tabel 3.52

Kinerja Sasaran Strategis III.2.

Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69,02	70	65,32	93,31	70	93,31
2.	Persentase luas irigasi kabupaten baik	Persen	51,96	57,02	56,14	98,46	50	112,28
3.	Persentase rumah tangga bersanitasi	Persen	67,25	81	76,00	93,83	60	126,67
4.	Persentase kawasan yang masih terjadi genangan	Persen	0	0	0	100,00	3	100,00
5.	Persentase pertambangan tanpa ijin/liar	Persen	100	30	17	143,33	30	143,33
6.	Persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Persen	2,62	2,83	2,54	89,75	2,83	89,75
<i>Persentase Capaian Sasaran Strategis III.2</i>						103,11		110,89

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja Sasaran III.2 *Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung*

berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru pada tahun 2014 adalah **103,11% (sangat baik)**.

Indikator kinerja **Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik** pada tahun 2014 adalah sebesar 93,31%. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2014 adalah 579,935 Km atau 65,32% dari total panjang jalan kabupaten, yakni 87,83%. Kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 dimana panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 69,02%. Berikut data mengenai kondisi jalan kabupaten periode 2010-2014.

Tabel 3.53
Panjang Jalan menurut Keadaannya, 2010-2014

No	Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi							
			Baik	%	Sedang	%	Rusak Ringan	%	Rusak Berat	%
1.	2010	641,11	453,29	70,70	147,77	23,05	17,4	2,71	29,65	4,62
2.	2011	836,835	533,1618	63,71	191,87	22,93	90,1082	10,77	21,695	2,59
3.	2012	836,835	544,5618	65,07	191,87	22,93	87,1082	10,41	13,295	1,59
4.	2013	836,835	577,6118	69,02	168,845	20,18	77,8832	9,31	12,495	1,49
5.	2014	887,83	579,935	65,32	195,67	22,04	91,015	10,25	21,205	2,39

Sumber : DPU dan ESDM Kabupaten Magelang, 2015

Dari tabel di atas, kondisi jalan rusak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena tingkat layan jalan Kabupaten Magelang yang cukup tinggi tidak sepadan dengan kelas jalan yang ada. Sebagai contoh kondisi jalan di sekitar Gunung Merapi mengalami kerusakan lebih cepat dikarenakan beban kendaraan yang melewatinya tidak sebanding dengan kelas jalan yang ada. Di satu sisi, anggaran pemeliharaan jalan kabupaten terbatas. Artinya, pemeliharaan jalan tidak sebanding dengan kerusakan jalan yang terjadi.

Status ruas jalan di Kabupaten Magelang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/206/KEP/25/2014 tentang Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Bupati Magelang ini, terdapat 204 ruas jalan yang tersebar di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang.

Faktor yang paling berpengaruh pada kerusakan jalan adalah kondisi jalan kabupaten yang relatif sempit dengan lebar rata-rata 3 meter dan beban layan kendaraan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ada. Di samping itu umur jalan kabupaten yang sudah cukup lama tidak ditingkatkan (overlay) untuk mengembalikan kondisi jalan. Kerusakan jalan yang ada di Kabupaten

Magelang di antaranya terkelupas/segregasi, retak buaya, aus dan retak alur, *pothole*/lubang, dan *sliding*. Kegiatan yang pemeliharaan dan peningkatan jalan yang dilaksanakan selama ini adalah *overlay*/peningkatan jalan dan pelebaran jalan.

Indikator kinerja **Persentase luas irigasi kabupaten baik** pada tahun 2014 capaian kinerjanya 98,46%. Sampai dengan tahun 2014, persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah 56,14%, meningkat 4,18% dibandingkan kondisi tahun 2013 yang mencapai 51,96%. **Jika dibandingkan dengan target jangka menengah**, kondisi luas irigasi kabupaten baik pada tahun 2014 sebesar 56,14% telah melampaui angka yang ditargetkan sebesar 50% pada akhir tahun periode RPJMD, yaitu 50%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DPU dan ESDM Kabupaten Magelang, hingga tahun 2014 terdapat 993 daerah irigasi, dengan luas areal 35.693,45 Ha, dengan rincian 10.345 Ha kondisi baik, 9.802 Ha kondisi rusak ringan, 6.703 kondisi rusak sedang, dan 8.844 kondisi rusak berat. Kondisi irigasi yang baik akan mempengaruhi tingkat produktivitas pertanian utamanya padi di Kabupaten Magelang yang merupakan produk unggulan.

Indikator kinerja **Persentase rumah tangga bersanitasi** pada tahun 2014 capaian kinerjanya adalah 93,83%. Berdasarkan realisasinya, terjadi peningkatan persentase rumah tangga bersanitasi, dari 67,25% pada tahun 2013, menjadi 76% pada tahun 2014. Angka ini diperoleh dengan membandingkan jumlah rumah tangga bersanitasi layak dengan jumlah total rumah tangga yang ada. DPU dan ESDM Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa rumah tangga bersanitasi layak pada tahun 2014 berjumlah 255.779 KK dari total 336.432 KK. **Jika dibandingkan dengan target jangka menengah**, realisasi pada tahun 2014 telah melampaui angka yang ditargetkan pada dokumen RPJMD, yaitu 60%, sehingga capaian kinerja hingga akhir periode RPJMD adalah 126,67%.

Indikator kinerja **Persentase kawasan yang masih terjadi genangan** pada tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 100%. Realisasi ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, karena tidak terjadi genangan di seluruh wilayah Kabupaten Magelang setelah terjadinya hujan. Data dari DPU dan ESDM Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa terdapat 15.000 m² yang berpotensi menimbulkan genangan, namun tidak menimbulkan genangan cukup lama setelah terjadinya hujan. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi tahun 2014 telah melampaui besaran yang ditargetkan dalam dokumen RPJMD, yaitu 3% per akhir tahun 2014.

Secara umum , urusan pekerjaan umum masih menghadapi kendala-kendala di antaranya:

- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan;
- b. Adanya kerusakan jalan dan jembatan;
- c. Rasio jaringan irigasi yang masih relatif kecil dan adanya kerusakan bangunan irigasi akibat dari letusan Gunung Merapi;
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.

Oleh karena itu, kebijakan pada urusan Pekerjaan Umum, hendaknya diarahkan pada:

- a. Pembangunan, pemberdayaan, pemerataan, dan aksesibilitas pada infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi;
- b. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan konservasi sumberdaya alam secara konsisten dan berkelanjutan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan;
- c. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam, seperti letusan gunung berapi, banjir,tanah longsor dan kekeringan.

Program-program pembangunan dalam urusan Pekerjaan Umum adalah :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
3. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
7. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
9. Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
11. Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi;
12. Program Pengembangan Data/Informasi Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air.

Indikator kinerja **Persentase pertambahan tanpa ijin/liar** pada tahun 2014 capaian kinerjanya adalah sebesar 143,33%. Pada tahun 2014 terjadi

pengurangan persentase pertambangan yang tidak berijin, menjadi 17% dari semula 100% pada tahun 2013. Urusan pertambangan dan penertiban usaha pertambangan di Kabupaten Magelang di atur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengusahaan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi tahun 2010, Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2011 tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2011 tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Usaha Pertambangan pada Kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, serta Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Berbasis Mitigasi Bencana di Kawasan Gunung Merapi Kabupaten Magelang. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai Oktober 2014 urusan pertambangan ditarik ke Provinsi Jawa Tengah.

Jika dibandingkan dengan rencana jangka menengah, realisasi 17% pertambangan yang tidak berijin telah melampaui angka yang ditargetkan dalam dokumen RPJMD pada tahun 2014, yaitu 30%, sehingga capaian kinerjanya sampai dengan akhir tahun 2014 adalah 143,33%.

Indikator kinerja **Persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB** pada tahun 2014 capaian kinerjanya adalah 89,75%. Pada tahun 2014, kontribusi sektor pertambangan tercatat 2,54%, dimana kontribusi sektor ini menurun 0,08% dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar 2,62%. Kontribusi sektor pertambangan banyak didukung dengan pertambangan Galian C berupa pasir dari daerah sekitar Gunung Merapi. Tabel berikut menunjukkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB dari tahun 2010-2014.

Tabel 3.54
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (Juta Rupiah)
Kabupaten Magelang 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Sektor Pertambangan	203.806,88	228.875,35	250.860,61	283.701,53	306.553,95
PDRB Kabupaten	8.022.322,50	8.770.808,59	9.736.556,37	10.814.289,76	12.047.100,23
% Kontribusi	2,54	2,61	2,58	2,62	2,54

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2015

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DPU dan ESDM Kabupaten Magelang, terdapat banyak potensi bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Magelang, diantaranya tras (42,22 juta ton), tanah lia (2.531.900 m³), batu gamping, marmer (340.000 m³), andesit (58,5 juta ton), sirtu (33.327 juta ton), kaolin, oker (25.200 ton) dan mangan (600 ton).

Secara umum, urusan Energi dan Sumber Daya Mineral masih menghadapi permasalahan belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan dan mineral, sehingga kebijakan yang diambil hendaknya diarahkan pada :

1. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan mineral, yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
2. Pemanfaatan potensi sumberdaya energi baru terbarukan;
3. Pembinaan dan pengembangan bidang kelistrikan.

Program-program pembangunan pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan;
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
4. Program Pengembangan Geologi Daerah;
5. Program Pengembangan Energi Alternatif.

Sasaran Strategis III.3	:	Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni
--------------------------------	---	---

Penyelenggaraan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan merupakan tanggung jawab pemerintah berdasarkan penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang didahului proses pendataan dengan melibatkan peran masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor

188.45/498/KEP/25/2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Magelang.

Tabel 3.55
Kinerja Sasaran Strategis III.3.
Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase kawasan kumuh	Persen	2,79	2,00	0,08	196,00	0,80	190,00
2.	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	Persen	57,00	60	58,80	98,00	90	65,33
3.	Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh	Persen	6,1	5	0,08	198,40	1,62	195,06
4.	Rasio rumah layak huni	Persen	55,94	78	53,04	68,00	78	68,00
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis III.3</i>						140,10		129,60

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran III.3 *Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni* pada tahun 2014 adalah sebesar **140,10% (sangat baik)**. Sasaran Strategis ini terkait dengan ukuran keberhasilan di bidang perumahan.

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Untuk mengukur keberhasilan dibidang pengurangan kawasan kumuh maupun luasan lingkungan permukiman kumuh, digunakan satu ukuran, yaitu kawasan permukiman kumuh perkotaan, dimana melalui Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/498/KEP/25/2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Magelang, bahwa kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Magelang adalah seluas 85,09 Ha, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.56
Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
Kabupaten Magelang Tahun 2014

No	Kawasan	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Cikalan	Desa Banyurojo	Mertoyudan	20,71
2.	Soka	Desa Mertoyudan	Mertoyudan	10,36
3.	Jayan	Desa Borobudur	Borobudur	2,28

No	Kawasan	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Luas (Ha)
4.	Sempon	Desa Keji	Muntilan	11,54
5.	Pandansari	Desa Pucungrejo	Muntilan	15,14
6.	Semawe	Desa Sokorini	Muntilan	7,29
7.	Tegal Arum	Desa Tamanagung	Muntilan	4,87
8.	Kembangan	Desa Madusari	Secang	6,05
9.	Secang	Kelurahan Secang	Secang	6,85
Total				85,09

Sumber : Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/498/KEP/25/2014 tentang Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Magelang

Dengan memperhatikan Keputusan Bupati tersebut di atas, maka Indikator kinerja **Persentase kawasan kumuh** dan **Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh** dihitung dari perbandingan antara luasan kawasan kumuh (85,09 Ha) dengan total luas lahan di Kabupaten Magelang (108.573 Ha). Dari hasil pengukuran, maka didapatkan hasil bahwa capaian kinerja Persentase kawasan kumuh pada tahun 2014 adalah 196,00%, sedangkan capaian kinerja Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2014 adalah 198,40%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, kedua indikator tersebut telah melampaui target dalam RPJMD, yaitu sebesar 0,80% dan 1,62%, sehingga capaian kinerja hingga akhir tahun 2014 adalah sebesar 190,00% dan 195,06%.

Indikator kinerja **Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih** pada tahun 2014 capaian kerjanya sebesar 98,00%. Meskipun demikian, realisasi rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2014 sebesar 58,80%, meningkat 1,80% dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 57,00%. Data dari DPU dan ESDM Kabupaten Magelang menyebutkan, dari jumlah rumah tangga 336.432 KK, 196.624 KK diantaranya telah menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Jika diperhitungkan jumlah jiwa, sebanyak 725.399 Jiwa dari total 1.233.695 Jiwa (asumsi BPS Kabupaten Magelang, 2014) telah menggunakan air bersih. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi 58,80% pada tahun 2014 masih jauh di bawah angka yang ditargetkan, yaitu 90% per akhir tahun 2014, sehingga capaian kerjanya sampai dengan akhir periode RPJMD adalah sebesar 65,33%.

Indikator kinerja **Rasio rumah layak huni** pada tahun 2014 capaian kerjanya 68,00%. Terjadi penurunan rasio rumah layak huni, dari 55,94% pada tahun 2013 menjadi 53,04% pada tahun 2014. **Jika dibandingkan dengan target jangka menengah**, realisasi sebesar 53,04% pada tahun

2014 masih jauh di bawah angka yang ditargetkan, yaitu sebesar 78%, sehingga capaian kinerja hingga akhir periode RPJMD adalah sebesar 68,00%. Data dari DPU dan ESDM yang bekerja sama dengan Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa pada tahun 2014 total rumah yang ada di Kabupaten Magelang berjumlah 318.984 unit, dan 149.795 unit (46,96%) diantaranya masuk dalam kategori rumah tidak layak huni. Anggaran untuk menangani rumah tidak layak huni di Kabupaten Magelang berasal dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN.

Meskipun urusan perumahan mencatat beberapa keberhasilan, namun secara umum, masih menghadapi permasalahan seperti :

- a. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna air bersih yang layak dan berkelanjutan;
- b. Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- c. Tingginya angka rumah tidak layak huni.

Oleh karena itu, kebijakan pada urusan perumahan hendaknya diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman di masyarakat. Sedangkan **Program-program** pembangunanyang dilaksanakan pada urusan perumahan adalah Program Pengembangan Perumahan, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan.

MISI IV	:	Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup
----------------	----------	--

Sasaran Strategis IV.1	:	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam
-------------------------------	----------	---

Kinerjaurusan penataan ruang dapat dilihat dari indikator yaitu Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. Pada saat ini ruang terbuka hijau masih tersedia cukup luas. Lahan pertanian sawah terdapat 36.974 ha, lahan kering perkebunan 41.923 ha. Sedangkan untuk ruang terbuka hijau publik yang sudah dimiliki dan tersebar di kawasan perkotaan luasnya mencapai 20,6 ha. Sasaran Strategis IV.1 *Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah* memuat 1 (satu) urusan, yaitu Urusan Penataan Ruang, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.57
Kinerja Sasaran Strategis IV.1.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi
tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Persen	20%	20%	30%	150,00	30%	100,00
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis IV.1</i>						150,00		100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja **Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB** pada tahun 2014 adalah 150,00%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi sebesar 30% pada tahun 2014 sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu sebesar 30%, sehingga capaian kinerja hingga akhir periode RPJMD adalah sebesar 100,00%. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada suatu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. RTH yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah.

Kebijakan Urusan Penataan Ruang pada Pemerintah Kabupaten Magelang hendaknya diarahkan pada perencanaan dan pengendalian tata ruang danpeningkatan kualitas pelayanan, karena selama ini urusan pentaan ruang masih menghadapi kendala seperti banyaknya alih fungsi lahan pertanian teknis ke non pertanian tidak berijin. **Program-program** pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Strategis IV.1 adalah Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang, dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sasaran Strategis IV.2	:	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global
-------------------------------	----------	---

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda , daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi semua perikehidupan dan kesejahteraan

manusia serta makhluk hidup lain. Sasaran Strategis IV.2 *Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global* mencakup Urusan Lingkungan Hidup.

Kinerja urusan lingkungan hidup antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator kinerja Persentase penanganan sampah, Cakupan pengawasan terhadap pengawasan AMDAL, Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk dan lain-lainnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.58
Kinerja Sasaran Strategis IV.2.
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase penanganan sampah	Persen	19	19	21,10	111,05	57	37,02
2.	Cakupan pengawasan terhadap pengawasan AMDAL	Persen	80	75	100,00	133,33	90	111,11
3.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	0,43	0,40	0,44	110,00	0,16	275,00
4.	Pengelolaan limbah B3	Persen	73,33	80	80	100,00	100	80,00
5.	Pengelolaan limbah B3 yang diawasi	Persen	58,75	60	60	100,00	52,94	88,23
6.	Penegakan hukum lingkungan	Persen	80	60	167,67	277,78	90	186,30
7.	Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air)	Persen	100	100	100	100,00	100	100,00
8.	Pengendalian potensi sumber pencemaran air	Persen	58,75	60	60	100,00	90	60,00
9.	Sampling pemantauan kualitas air sungai dan/atau danau secara berkala	Persen	100	100	100	100,00	100	100,00
10.	Pelaksanaan penetapan status mutu air	Persen	9	18	24	132,01	18,18	132,01
11.	Persentase	Persen	0,074	0,20	20,57	10.286,	100	20,57

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhd target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan /atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan					00		
12.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	4.498,30	2.450	3.438,01	140,33	2.450	140,33
13.	Kerusakan kawasan hutan	Persen	0	3	0	100,00	3	100,00
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis IV.2</i>						906,96		110,04

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis IV.2Meningkatnya *pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global* pada tahun 2014adalah sebesar 906,96% (sangat baik). Capaian kinerja yang tinggi ini disebabkan karena indikator kinerja **Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan /atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan**capaian kinerjanya sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena perubahan perhitungan indikator tersebut yang mengacu peraturan dari pusat.

Indikator **Persentase penanganan sampah** capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah sebesar 111,05%. Berdasarkan data yang diperoleh dari DPU dan ESDM Kabupaten Magelang pada tahun 2014 volume sampah yang ditangani adalah 141.985 m³ dari keseluruhan volume produksi sampah sebesar 672.915 m³ sehingga persentase penanganan sampah adalah 21,10%. Persentase ini mengalami peningkatan sebesar 2,10% dibandingkan pada tahun 2013, dimana volume sampah yang ditangani adalah 134.502 m³, sedangkan volume produksi sampah adalah 707.905 m³, sehingga persentase penanganan sampah adalah 19%.

Jika dibandingkan dengan RPMD, capaian ini masih jauh di bawah angka yang telah ditargetkan, yaitu sebesar 57%, sehingga capaian kinerjanya sampai dengan akhir periode RPJMD adalah sebesar 37,02%. Pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampai dengan akhir tahun 2014, karena keterbatasan sarana dan prasarana, Pemerintah

Kabupaten Magelang baru bisa menangani sampah pada 7 (tujuh) kecamatan dari 21 kecamatan yang ada. Berikut adalah data mengenai persentase penanganan sampah di Kabupaten Magelang.

Tabel 3.59
Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Magelang Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Produksi Sampah (m ³)	Sampah Ditangani (m ³)
1.	Muntilan	78.532	134.583	28.397
2.	Mertoyudan	111.948	126.347	26.659
3.	Grabag	85.097	96.038	20.264
4.	Secang	79.822	90.117	19.015
5.	Mungkid	72.919	82.311	17.367
6.	Salaman	69.087	78.004	16.459
7.	Borobudur	58.034	65.515	13.824
	Jumlah	555.439	672.915	141.985
	% Penanganan Sampah			21,10

Sumber: DPU dan ESDM Kabupaten Magelang, 2014

Melalui **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014 antara lain penyediaan sarana dan sarana pengelolaan persampahan, penanganan kebersihan lingkungan kota Muntilan, pemeliharaan kebersihan lingkungan kota Mungkid, rehab TPA Pasuruhan, pemeliharaan TPSS, pembuatan TPSS di Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, pengadaan tong sampah beroda, dan penyusunan Naskah Akademik pengelolaan persampahan untuk persiapan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

Indikator kinerja **Cakupan pengawasan terhadap pengawasan AMDAL(UPL-UKL)** capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah sebesar 133,33%. Cakupan pengawasan pada tahun 2014 sebesar 100%, meningkat 20% dibandingkan pada tahun 2013 dimana cakupan pengawasannya sebesar 80%. **Jika dibandingkan dengan target jangka menengah**, realisasi tahun 2014 telah melampaui target 90% sebagaimana tercantum dalam RPJMD.

Indikator kinerja **Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk** pada tahun 2014 capaian kinerjanya adalah 110,00%. Berdasarkan data dari DPU dan ESDM Kabupaten Magelang pada tahun 2014 daya tampung TPS/TPSS 546 m³. Daya tampung TPS/TPSS pada

tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 16 m³ karena penambahan 1 (satu) TPSS di Desa Sidoagung Kecamatan Tempuran, dimana pada tahun 2013 tercatat bahwa daya tampung TPS adalah 530 m³. Jumlah penduduk pada tahun 2014 adalah 1.241.188 jiwa (angka proyeksi BPS Kabupaten Magelang). Indikator ini dihitung dengan rumus *daya tampung TPS (m³)/jumlah penduduk*. Oleh karena itu rasio TPS per satuan penduduk adalah 0,44.

Jika dibandingkan dengan RPJMD, realisasi tahun 2014 sebesar 0,44 lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 0,16, sehingga capaian pada akhir periode RPJMD adalah 275,00. TPSS yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang berjumlah 28, yang tersebar di 10 kecamatan, yaitu sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini

Tabel 3.60
Daftar TPSS di Kabupaten Magelang, 2014

No	Nama TPSS	Volume (m ³)
1.	TPSS Tape Ketan Muntilan	40
2.	TPSS Wonosari Muntilan	40
3.	TPSS Gunung Pring Muntilan	40
4.	TPSS Gatak Gamol Muntilan	50
5.	TPSS Sayangan Muntilan	30
6.	TPSS Sleko Muntilan	20
7.	TPSS Pasar Burung Muntilan	20
8.	TPSS Ponalan Muntilan	30
9.	TPSS Taman Agung Muntilan	8
10.	TPSS Pasar Sayur Muntilan	30
11.	TPSS Pasar Gedhe Muntilan	20
12.	TPSS Blambangan Blabak Mungkid	8
13.	TPSS Pasar Blabak Mungkid	7
14.	TPSS Blondo Mungkid	6
15.	TPSS Setda Kabupaten Magelang	10
16.	TPSS Borobudur 1	10
17.	TPSS Borobudur 2	10
18.	TPSS Salaman	30
19.	TPSS Mertoyudan 1	20
20.	TPSS Mertoyudan 2	7
21.	TPSS Mertoyudan 3	40
22.	TPSS Secang 1	6
23.	TPSS Secang 2	6
24.	TPSS Grabag 1	10
25.	TPSS Grabag 2	10
26.	TPSS Ketep Sawangan	6
27.	TPSS Payaman Secang	16

No	Nama TPSS	Volume (m ³)
28.	TPSS Sidoagung Tempuran	16
	Jumlah	546

Sumber: DPU dan ESDM Kabupaten Magelang, 2015

Indikator kinerja **Pengelolaan limbah B3 yang diawasi** pada tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 100,00%. Data yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa dari total 80 perusahaan yang ada, yang diawasi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang baru 48 perusahaan, dan 22 perusahaan diantaranya telah memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk Limbah B3. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi pada tahun 2014 belum sesuai dengan apa yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja hingga akhir tahun 2014 sebesar 80,00%.

Indikator kinerja **Pengendalian potensi sumber pencemaran air** pada tahun 2014 capaian kinerjanya 100,00%. Dari 80 perusahaan yang ada, yang diawasi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sebanyak 48 perusahaan dan yang sudah mampu mengelola limbah cairnya adalah 35 perusahaan. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi tahun 2014 sebesar 60% masih jauh dari angka yang ditargetkan, yaitu sebesar 90% pada akhir tahun 2014, sehingga capaian kinerjanya sebesar 60,00%.

Indikator **kinerja Prosentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan /atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan** pada tahun 2014 capaian kinerjanya adalah 10.286,00%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2014, verifikasi luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan /atau tanah untuk produksi biomassa adalah 19.552,81 Ha atau 20,57%, dengan kategori 1 dan 2 (potensi kerusakan ringan dan sedang. Luasan yang ditetapkan status kerusakannya mengalami peningkatan yang signifikan, karena pada tahun 2013, luasan yang ditetapkan status kerusakannya baru 70 Ha, namun dengan kategori PR5 (kerusakan sangat parah). **Jika dibandingkan dengan target jangka menengah**, angka ini masih jauh dari angka yang ditargetkan dalam RPJMD, yaitu sebesar 100%. Kecamatan dengan potensi kerusakan tinggi adalah Kecamatan Sawangan, Dukun, dan Pakis.

Permasalahan yang dihadapi untuk menetapkan status kerusakan lahan adalah berupa keterbatasan jumlah SDM yang menangani indikator ini dan keterbatasan anggaran. Untuk menangani indikator ini dibutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang sangat besar. Diharapkan, ke depan perhatian

Pemerintah Kabupaten Magelang lebih besar dengan penyediaan anggaran dan dukungan SDM, karena indikator ini masuk ke dalam salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja **Rehabilitasi hutan dan lahan kritis** pada tahun 2014 capaian kinerjanya sebesar 140,33%. Hutan yang dimaksudkan di sini adalah hutan rakyat. Terjadi peningkatan luasan hutan dan lahan kritis yang ditangani, dari 4.498,30 Ha pada tahun 2013 menjadi 3.438,01 Ha pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi pada tahun 2014 telah melampaui luasan yang ditargetkan, yaitu 2.450 Ha, sehingga capaian kinerjanya hingga akhir tahun 2014 adalah 140,33%. Berikut merupakan tabel yang memuat data luasan hutan rakyat dan lahan kritis di Kabupaten Magelang tahun 2010-2015.

Tabel 3.61
Data Luasan Hutan Rakyat dan Lahan Kritis
Kabupaten Magelang 2010-2014

No	Uraian	Potensi	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Hutan Rakyat (Ha)	39.480,00	19.276,00	20.063,50	20.613,50	23.505,70	25.224,70
2.	Lahan Kritis (Ha)		33.101,21	31.014,08	29.081,13	24.392,93	23.132,54

Sumber : Distanbunhut Kabupaten Magelang, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa luasan hutan rakyat senantiasa mengalami peningkatan, dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan suatu keberhasilan antara Distanbunhut Kabupaten Magelang selaku pembina dan masyarakat selaku pengelola. Tabel di atas juga menunjukkan masih terdapatnya potensi hutan rakyat yang belum tergarap, diharapkan dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat, maka potensi hutan rakyat seluas 39.480,00 Ha akan dimanfaatkan.

Lahan kritis di Kabupaten Magelang juga semakin berkurang dari tahun ke tahun. Kegiatan rehabilitasi, penghijauan, penanaman bibit maupun bantuan pupuk terus dilaksanakan, terutama difokuskan pada daerah-daerah yang rawan bencana longsor dan lahan kritisnya masih luas, seperti Kecamatan Salaman, Borobudur, Kajoran, Kaliangkrik, dan Pakis. Sampai dengan tahun 2014, tercatat 2.324.256 Batang bibit yang ditanam untuk luasan 5.810,64 Ha, sebagaimana ditunjukkan dalam atabel berikut ini :

Tabel 3.62
Realisasi Penanaman Bibit Kabupaten Magelang Tahun 2014

No	Jenis Bantuan	Jumlah Bibit (Batang)	Luasan (Ha)
1.	Perkebunan	122.050	305,13
2.	TPH	10.220	25,55
3.	SDPH	20.000	50,00
4.	BP2KP	2.650	6,63
5.	Kehutanan	1.375.202	3.438,01
6.	TNI/POLRI	252.514	631,29
7.	BLH	71.481	178,70
8.	BPDASSOP	66.139	165,35
9.	Swadaya/CSR	404.000	1.010
	Total	2.324.256	5.810,64

Sumber : Distanbunhut Kabupaten Magelang, 2015

Indikator kinerja **Kerusakan kawasan hutan** pada tahun 2014 capaian kerjanya adalah 100%. Data dari Distanbunhut Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa tidak ada kawasan hutan yang mengalami kerusakan sampai dengan tahun 2014, yang dimaksud dengan hutan disini adalah hutan negara, yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan-hutan ini masuk dalam pengawasan pemerintah. Luas kawasan hutan di Kabupaten Magelang adalah 9.930,821 Ha atau sekitar 9,15% dari total luas Kabupaten Magelang.

Dari uraian di atas, secara umum urusan lingkungan hidup masih menghadapi permasalahan seperti masih rendahnya cakupan wilayah pelayanan persampahan, rasio TPS yang masih rendah, serta kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan bencana alam maupun pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan pada urusan lingkungan hidup hendaknya diarahkan pada pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan hidup, melalui peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian polusi dan konservasi.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada urusan Lingkungan Hidup adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
7. Program Peningkatan Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Program Pengembangan Kapasitas dan Kemampuan Laboratorium Lingkungan;
9. Program Antisipasi Dampak Perubahan Iklim;
10. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pertamanan.

MISI V	:	Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis
---------------	----------	---

Sasaran Strategis V.1	:	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih
------------------------------	----------	--

Sasaran Strategis V.1 *Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih*, terdiri dari 3 (tiga) urusan, yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Kearsipan, dan Urusan Pertanahan.

Kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD.

Kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Mengingat arti pentingnya, Pemerintah Kabupaten Magelang menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kearsipan. Urusan ini memuat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Persentase pengelolaan arsip sesuai aturan/secara baku dan Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola kearsipan.

Pada Urusan Pertanahan, seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan hak atas tanah maka kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum tentang pemilikan hak atas tanah cenderung meningkat, hal ini ditunjukkan dengan makin bertambahnya jumlah tanah yang bersertifikat, meskipun peningkatannya masih kecil.

Tabel 3.63
Kinerja Sasaran Strategis V.1.
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan
yang baik dan bersih

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyusunan Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
2.	Penyusunan Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
3.	Persentase pengelolaan arsip sesuai aturan/secara baku	Persen	81,61	82,00	100,00	121,95	90,6	110,38
4.	Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola kearsipan	Keg.	176	100	116	116,00	50 Lokasi (Keg)	232,00
5.	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	33,55	33,65	52,11	154,86	50	104,22
6.	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	100	100	100	100,00	100	100,00
7.	Penyelesaian izin lokasi	Persen	80	80	80	100,00	80	100,00
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis V.1</i>						113,26		120,94

Persentase CapaianSasaran Strategis V.1 *Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih* pada tahun 2014 adalah **113,26% (sangat baik)**. Secara umum, Kabupaten Magelang berhasil di dalam pencapaian kinerja Sasaran V.1 ini, karena semua indikator kinerja persentase capaiannya minimal 100,00%.

Indikator kinerja **Penyusunan Buku "Kabupaten Dalam Angka"** dan **Penyusunan Buku "PDRB Kabupaten"** setiap tahun senantiasa dilaksanakan oleh BAPPEDA yang bekerja sama dengan BPS Kabupaten Magelang.

Kebijakan Urusan Perencanaan Pembangunan diarahkan untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerahdanpeningkatan kualitas kelembagaan perencanaan pada setiap SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada urusan Perencanaan Pembangunan adalah :

1. Program Pengembangan Data/ informasi;
2. Program Kerjasama Pembangunan;
3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

Indikator kinerja **Persentase pengelolaan arsip sesuai aturan/secara baku** capaian kerjanya pada tahun 2014 ini adalah 121,95%. Data dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa pada tahun 2014 semua SKPD telah menerapkan arsip sesuai aturan. Sedangkan pada tahun 2013, dari 60 SKPD (termasuk 8 bagian yang ada di Setda) yang ada di Kabupaten Magelang, 49 diantaranya sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku (81,61%).

Jika dibandingkan dengan RPJMD, persentase pengelolaan arsip sesuai aturan/secara baku pada tahun 2014 telah melampaui angka yang ditargetkan, yaitu sebesar 90,6%, sehingga capaian pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 110,38%.

Indikator kinerja **Jumlah kegiatan pembinaan petugas pengelola kearsipan** capaian kerjanya pada tahun 2014 adalah 116,00%. Dari 100 lokasi/obyek yang ditargetkan pada awal tahun 2014, terealisasi 116 lokasi/obyek berdasarkan UPP dimana petugas arsipnya memperoleh pembinaan. Sedangkan pada tahun 2013 tercatat 176 lokasi/obyek, yang terdiri dari 90 desa dan 150 satuan kerja/unit. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi pada tahun 2014 telah melampaui angka yang ditargetkan dalam dokumen RPJMD, yaitu 50 lokasi.

Secara umum, urusan Kearsipan masih menghadapi permasalahan terkait dengan sistem administrasi kearsipan, sehingga kebijakan Urusan

Kearsipan hendaknya diarahkan untuk memperbaiki sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dan pelestarian arsip daerah.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan pada urusan kearsipan adalah :

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
- b. Program Penyelamatan Data dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;
- c. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

Indikator kinerja **Persentase luas lahan bersertifikat** capaian kerjanya pada tahun 2014 adalah sebesar 154,86%. Pada tahun 2014, dari total lahan seluas 108.573 Ha, yang sudah disertifikasi adalah 56.581 Ha, atau 52,11%, meningkat 18,56% dibandingkan tahun 2013. Peningkatan capaian kinerja ini didukung oleh Program Pasca Bencana, Program Nasional (Prona), *Land Reform* (legalisasi aset) dan redistribusi tanah. Ke depan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Magelang akan senantiasa berkoordinasi dengan BPN dan melakukan fasilitasi di dalam meningkatkan persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Magelang.

Dari uraian di atas, urusan pertanahan masih menghadapi permasalahan masih banyaknya kepemilikan tanah yang belum bersertifikat. Dengan kata lain, jumlah tanah yang bersertifikat belum sebanding dengan luasan lahan yang ada di Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, ke depan, kebijakan pada urusan pertanahan, hendaknya diarahkan pada peningkatan administrasi dan pelayanan pertanahan, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pensertifikatan tanah.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada urusan pertanahan adalah :

1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah;
2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
3. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.

Sasaran Strategis V.6	:	Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung Stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum
------------------------------	----------	--

Sasaran Strategis V.6 memuat 1 (satu) urusan, yaitu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.64

Kinerja Sasaran Strategis V.6.

Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung Stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda	Buah	8 Buah	8 Buah	8 Buah	100,00	8 Buah	100,00
2.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis V.6</i>						100,00		100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis V.6 Terwujudnya *keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung Stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umumpada* tahun 2014 adalah sebesar 100,00% (baik).

Indikator kinerja **Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda** capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah 100,00%. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pemda tersebar di setiap SKPD, yaitu SIPKD (DPPKAD), SPIPISE (BPMPPT), SIPPD (BAPPEDA), SIAK (Disdukcapil), SIMPEG (BKD dan Diskominfo), CAT System (BKD), LPSE (Diskominfo), dan Website Pemerintah Kabupaten Magelang yang diampu oleh Diskominfo. Jika dibandingkan dengan RPJMD, pada akhir tahun 2014, indikator ini telah terlampaui. Diharapkan dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepentingan birokrasi, Pemerintah Kabupaten Magelang akan terus menambah Sistem Informasinya.

Indikator kinerja **Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat** telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Magelang. Hal ini dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat (*stakeholders*), dimana Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan upaya-upaya untuk menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga jarak antara pemerintah dan

masyarakat semakin dekat. Upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan diantaranya dengan melakukan survei, untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Hasilnya berupa Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, dari situ bisa dilakukan kajian dan evaluasi untuk lebih menyempurnakan pelayanan terhadap masyarakat.

Pada tahun 2014, dalam rangka mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, telah dilaksanakan survei IKM terhadap 64 UPP dengan Metode Penilaian Mandiri, dengan nilai IKM sebesar **76,084 (kategori baik)**. Ke-64 UPP tersebut terdiri dari 4 dinas, 4 lemtekda, 1 bagian, 21 kecamatan, 5 kelurahan, dan 29 UPT Puskesmas. Pelaksanaan survei IKM ini sesuai dengan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 serta SE Menpan dan RB No: 4 /Menpan dan RB/03/2013 tentang Pelaksanaan Survei IKM pada seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun.

Meskipun capaian-capaian indikator kinerja pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian telah sesuai dengan apa yang ditargetkan dalam RPJMD, namun masih menghadapi permasalahan kurang efektif dan efisiensinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga kebijakan yang diambil ke depan hendaknya diarahkan pada :

- a. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- b. Peningkatan manajemen pemerintahan daerah guna peningkatan efektivitas dan efisiensi;
- c. Pengembangan pusat data dan informasi yang dapat diandalkan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Program-program pembangunan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah;

7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
11. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
12. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
13. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
14. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
15. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
16. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
17. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
18. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
19. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
20. Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian;
21. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.

Sasaran Strategis V.7	:	Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah
------------------------------	----------	---

Kinerja urusan perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD.

Tabel 3.65
Kinerja Sasaran Strategis V.7.
Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah
dalam mendukung pembangunan daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tersedianya dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhd target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan							
2.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
3.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
4.	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd	Persen	100%	100%	100%	100,00	100%	100,00
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis V.7</i>						100,00		100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis V.7 Meningkatnya *kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah* pada tahun 2014 sebesar **100,00% (baik)**, sama seperti capaian kinerja pada tahun sebelumnya, yaitu 100,00%. Artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang telah berhasil menyusun dokumen-dokumen perencanaan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di tingkat atasnya serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan kerja tahunan.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang telah berhasil merealisasikan semua indikator kinerja sesuai dengan yang ditargetkan dalam RPJMD. Semua dokumen yang dibutuhkan dalam urusan pembangunan daerah sudah ada, yang meliputi tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan, dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan, dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan, dan penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd.

Kebijakan Urusan Perencanaan Pembangunan diarahkan untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas kelembagaan perencanaan pada setiap SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada urusan Perencanaan Pembangunan adalah :

1. Program Pengembangan Data/ informasi;
2. Program Kerjasama Pembangunan;
3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

Sasaran Strategis V.8	:	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat
------------------------------	----------	---

Sasaran Strategis V.8 *Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat* mencakup 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Urusan Komunikasi dan Informasi.

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Persentase Kepemilikan KTP, Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk, dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Sedangkan Urusan Komunikasi dan Informasi terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Website milik pemerintah. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih sehingga informasi yang diperoleh bisa dimengerti dan dipahami. Sedangkan informasi adalah segala sesuatu yang mempunyai arti dan nilai bagi penerima informasi. Proses penanganan komunikasi dan penyampaian informasi dilaksanakan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Capaian-capaian kinerja Sasaran V.8 pada tahun 2014 ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.66**Kinerja Sasaran Strategis V.8.**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Kepemilikan KTP	Persen	83,42	85	82,98	97,62	100	82,98
2.	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	Persen	23,00	25	46,74	186,96	25	186,96
3.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	100,00	Sudah	100,00
4.	Website milik pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Ada	100,00
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis V.8</i>						121,15		117,49

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis V.8 *Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat* pada tahun 2014 adalah sebesar **121,15% (sangat baik)**. Sasaran strategis ini memuat 4 (empat) indikator kinerja, dimana semua indikator kinerja capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah sangat baik.

Indikator kinerja **Persentase Kepemilikan KTP** capaian kinerjanya pada tahun 2014 adalah 97,62%. Persentase kepemilikan KTP mengalami sedikit penurunan, di mana pada tahun 2013 tercatat 83,42% penduduk wajib KTP yang memiliki KTP, dan pada tahun 2014 tercatat 82,98%. Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang menyebutkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2014 tercatat jumlah penduduk yang wajib KTP adalah 997.698 jiwa, dan yang sudah mempunyai KTP adalah 827.894 jiwa atau 82,98%.

Jika dibandingkan dengan RPJMD, persentase kepemilikan KTP belum memenuhi apa yang telah ditargetkan, yaitu 100%. Hal ini disebabkan karena pembuatan e-KTP terkendala beberapa persoalan, yaitu :

- a. Data penduduk wajib KTP masih harus ditingkatkan validitasnya. Hal ini disebabkan karena dalam data tersebut masih terdapat data penduduk yang meninggal, data ganda, dan data penduduk yang merantau;
- b. Dari semua penduduk wajib e KTP yang telah melakukan perekaman data, masih ada yang sampai sekarang belum menerima e KTP. Hal ini

disebabkan karena sampai dengan tahun 2014, proses pencetakan e KTP masih dilakukan oleh pemerintah pusat.

Indikator kinerja **Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk** mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari angka 23,00% pada tahun 2013 menjadi 46,74% pada tahun 2014. Sedangkan capaian kerjanya pada tahun 2014 tercatat 186,96%. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan kesadaran warga yang cukup tinggi untuk memiliki akte kelahiran, disamping banyaknya urusan/kepentingan yang mensyaratkan keberadaan akte kelahiran, seperti untuk mendaftar haji maupun sekolah.

Jika dibandingkan dengan RPJMD, kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk sebesar 46,74% telah melampaui angka yang ditargetkan sebesar 25%, sehingga capaian pada akhir periode RPJMD adalah 186,96%.

Tabel berikut memuat data kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Magelang per akhir tahun 2014.

Tabel 3.67
Data Kependudukan di Kabupaten Magelang 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk Wajib KTP	938.867	1.004.585	1.022.799	986.210	997.698
Penduduk ber KTP	343.431	416.098	461.189	822.714	827.984
Persentase Kepemilikan KTP	36,58	41,22	45,09	83,42	82,98
Akte Kelahiran	53.336	51.071	21.727	28.633	10.743

Sumber: *Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2015*

Dari tabel di atas terlihat bahwa setiap tahun persentase kepemilikan KTP menunjukkan peningkatan, kecuali pada tahun 2014 yang mengalami sedikit penurunan. Melalui **Program Penataan Administrasi Kependudukan**, Disdukcapil Kabupaten Magelang adalah terus melakukan sosialisasi secara intensif untuk memberikan kesadaran pada masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan akte kelahiran. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan di dalam pelayanan akte kelahiran, sesuai dengan Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang, dimana, bayi berusia 0-60 hari tidak dikenakan biaya pembuatan akte kelahiran, dan bagi yang berusia lebih dari 60 hari dikenakan sanksi Rp 25.000,00.

Sejak tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Magelang sudah menerapkan e-KTP (**Penerapan KTP Nasional berbasis NIK**), namun hingga saat ini, masih terkendala berupa :

1. Orang yang sudah meninggal, namun datanya belum terhapus

2. Data Ganda
3. Penduduk yang sedang merantau, dan lain-lain.

Hal ini tentunya mempengaruhi kualitas data kependudukan. Diperlukan upaya yang lebih keras untuk memaksimalkan capaian kinerja pelaporan kematian, dan membangun sistem pelaporan peristiwa kependudukan yang meliputi (lahir, mati, pindah, datang) sejak dari desa, kecamatan, sampai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi, hendaknya kebijakan yang diambil diarahkan pada pembangunan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih berkualitas.

Indikator kinerja Website milik pemerintah pada tahun 2014 capaian kerjanya 100,00%. Pemerintah Kabupaten telah meluncurkan situs web resmi pemerintah dengan nama www.magelangkab.go.id. Secara umum, meskipun indikator kinerja pada urusan Komunikasi dan Informasi telah tercapai targetnya, namun Pemerintah Kabupaten Magelang masih menghadapi permasalahan berupa terbatasnya akses informasi yang didapat masyarakat, dan kurangnya sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika. Oleh karena itu kebijakan pada Urusan Komunikasi dan Informasi diarahkan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan informasi dan komunikasi serta peningkatan SDM pengelola komunikasi dan informasi.

Program-program pembangunan pada urusan Komunikasi dan Informasi yang dilaksanakan adalah:

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
2. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
3. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.

Misi VI	:	Menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram
----------------	----------	--

Sasaran Strategis VI.1	:	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
-------------------------------	----------	---

Sasaran Strategis VI.1 *Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku*, mencakup Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pelaksanaan urusan ini bertujuan untuk menciptakan kondusifitas di wilayah Kabupaten Magelang.

Tabel 3.68
Kinerja Sasaran Strategis VI.1.
Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2013	2014			Target akhir RPJMD 2014	% Realisasi terhdp target RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	6	6	5	83,33	12	41,67
2.	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	6	6	6	100,00	12	50,00
3.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	Persen	105	100	105	105,00	95	110,53
4.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Persen	80	80	93,73	117,16	78	120,17
<i>Persentase Capaian SasaranStrategis VI.1</i>						101,37		80,59

Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Sasaran Strategis VI.1 *Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku* pada tahun 2014 adalah sebesar **101,37% (sangat baik)**. Sasaran strategis ini memuat 4 (empat) indikator kinerja.

Indikator kinerja **Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah** pada tahun 2014 capaian kerjanya adalah 83,33%. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 6 kegiatan dalam setahun. Melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Kabupaten Magelang selama tahun 2014 telah melaksanakan upaya-upaya pembinaan politik daerah, diantaranya sosialisasi pemantapan budaya politik dengan peserta pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pendidikan politik bagi elemen masyarakat, pemberian bantuan keuangan Partai Politik, serta kemitraan perpolisian masyarakat.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, capaian kinerjanya baru mencapai 41,67% karena jumlah kegiatan politik yang ditargetkan sejumlah 12 (dua belas) kegiatan per tahun, sedangkan realisasinya, Kesbangpol Kabupaten Magelang baru bisa melaksanakan kegiatan tersebut sejumlah 5 (lima) kegiatan per tahun.

Indikator kinerja **Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP** pada tahun 2014 capaian kinerjanya 100,00%. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Magelang juga melakukan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diantaranya mengadakan penyuluhan dan fasilitasi mengenai kepengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun, **jika dibandingkan dengan target RPJMD**, capaiannya baru 50,00%, karena dalam RPJMD, ditargetkan 12 (dua belas) kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, sedangkan realisasinya baru terlaksana 6 (enam) kegiatan per tahun.

Program-program yang dilaksanakan oleh Kesbangpol dalam melakukan kegiatan pembinaan politik daerah dan pembinaan LSM, Ormas dan OKP adalah Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan Program Pendidikan Politik Masyarakat. Sedangkan untuk meningkatkan frekuensi kegiatan pembinaan politik dan organisasi kemasyarakatan, diperlukan adanya penambahan anggaran.

Indikator kinerja **Cakupan petugas perlindungan masyarakat** pada tahun 2014 capaian kinerjanya adalah 105,00%. Berdasarkan data yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang, pada tahun 2014 tercatat ada 11.492 anggota Linmas dari 10.966 RT yang ada di Kabupaten Magelang. Sesuai dengan target nasional, diharapkan bahwa keberadaan Linmas adalah 1 orang di setiap RT. Sehingga cakupan petugas Linmas adalah 105. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah anggota Linmas pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 12 orang.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, cakupan petugas Linmas di Kabupaten Magelang telah melampaui angka yang ditargetkan yaitu 95%, sehingga capaian cakupan petugas Linmas sampai dengan akhir tahun 2014 adalah 110,53%.

Tabel berikut menunjukkan data Cakupan Petugas Linmas di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 3.69
Cakupan Petugas Linmas Kabupaten Magelang 2010-2014

No	Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Petugas Linmas	11.485	11.475	11.462	11.475	11.492
2.	Jumlah RT	10.966	10.966	10.966	10,966	10.966
3.	Cakupan Petugas Linmas	105	105	105	105	105

Sumber: Satpol PP Kabupaten Magelang, 2015

Indikator kinerja **Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)** pada tahun 2014 capaian kinerjanya adalah 117,16%, dengan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 93,73%, meningkat 13,73% dibandingkan tahun 2013. **Dibandingkan dengan RPJMD**, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 capaiannya sebesar 120,17%, karena dari angka yang ditargetkan sebesar 78%, terealisasi 93,73%. Berikut adalah data kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3.70
Jumlah Kegiatan Trantib Tahun 2009-2014

No	Kegiatan	Tahun/Jumlah					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	PAM Demo	8	7	7	14	12	7
2.	Operasi Pasar dan PKL Rutin	90	159	106	159	126	104
3.	Operasi Pasar dan PKL terpadu	9	67	82	9	21	16
4.	Patroli Wilayah	41	123	189	257	172	152
5.	Miras	140	179	94	55	19	21
6.	PGOT	15	32	17	33	35	24
7.	Asusila	99	103	27	44	19	21
8.	Pelajar dan PNS	48	102	37	55	25	24
9.	Yustisi	2	-	1	-	-	-
10.	Represif Non Yustisi	77	90	39	43	25	24
11.	Operasi Parkir	9	67	30	43	42	52
	Jumlah	538	929	629	712	496	445

Sumber: Satpol PP Kabupaten Magelang, 2015

Pada tahun 2009 dan 2010, kegiatan trantib yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Magelang difokuskan pada penyelesaian pelanggaran miras, selanjutnya pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 difokuskan pada patroli wilayah dan penertiban PKL, yaitu di daerah Muntilan dan kawasan Mendut. Pada tahun 2014, jumlah kegiatan trantib mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada bulan Maret-April 2014, semua aparat petugas Satpol PP diwajibkan untuk piket/terlibat dalam

penertiban kegiatan penambangan di daerah sekitar Gunung Merapi. Keterlibatan tersebut masih berlanjut hingga akhir tahun, sehingga kegiatan trantib menjadi berkurang.

Meskipun capaian kinerjanya pada tahun 2014 sudah sesuai dengan yang diharapkan, namun selama ini Satpol PP Kabupaten Magelang menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Tingkat eselonisasi yang belum sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga berdampak pada kekurangan jumlah personil.
2. Belum memiliki PPNS
3. Kurangnya Diklat SDM anggota Satpol PP dan Satlinmas
4. Kurangnya sarana dan prasarana, seperti keterbatasan mobil patroli yang dimiliki. Padahal, idealnya, berdasarkan standar SPM, setiap kecamatan dalam 1 hari idealnya dilakukan patroli sebanyak 3 kali.
5. Terbatasnya jumlah anggaran.

Selain melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin, di dalam melaksanakan penyelesaian pelanggaran K3, Satpol PP Kabupaten Magelang menggalang kerjasama berupa operasi gabungan dengan POLRI/TNI, Disdagsar, DPU dan ESDM, BLH, Diperinkop dan UMKM, Dinas Perhubungan, Disnakersostrans, Desa dan Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Magelang.

Dari uraian capaian kinerja di atas, meskipun beberapa kinerja telah mencapai keberhasilan, namun secara umum, urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri masih menghadapi permasalahan-permasalahan seperti:

- a. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
- b. Belum optimalnya pengendalian terhadap kondisi rawan bencana;
- c. Kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- d. Terbatasnya anggaran, personil dan perlengkapan penegakan hukum;
- e. Potensi kerawanan keamanan

Oleh karena itu, kebijakan pada urusan ini diarahkan untuk :

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam organisasi masyarakat dan politik
- b. Pengembangan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik
- c. Perlindungan masyarakat
- d. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan penanggulangan bencana.

Program-program pembangunan pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan adalah:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
2. Program Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
8. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

3.3. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN TAHUN 2014

3.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan mendasarkan pada Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - 1) Pajak daerah;
 - 2) Retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Dana bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK). Dana Alokasi Umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lain lain Pendapatan yang sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, pinjaman Daerah. Lain lain pendapatan terdiri dari dana hibah dan dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan /lembaga dalam negeri atau perseorangan, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau kekurangan solvabilitas.

Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- 2) Penerimaan pinjaman daerah;
- 3) Dana cadangan daerah; dan
- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit penghasil pendapatan daerah dan satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mengelola pendapatan transfer baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten / Kota yang lain. Peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan ada kenaikan setiap tahun. Disamping upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perlu juga penyertaan modal dari pihak ketiga ataupun masyarakat sebagai upaya diversifikasi di bidang pendapatan.

Pengelolaan pendapatan asli daerah bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan daerah dalam menggali pendanaan otonomi daerah sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Pada Anggaran Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, maupun yang berasal dari Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah. Perubahan Pendapatan Daerah terkait dengan upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Penyesuaian alokasi pendapatan dari Pemerintah atasan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi.

3.3.1.1. Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah diarahkan pada seluruh komponen PAD, Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari obyek-obyek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya memaksimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Ekstensifikasi dilakukan dengan menggali obyek-obyek yang berguna menambah penerimaan daerah.

Kegiatan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui:

1. Penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang diawali dengan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan serta penetapan;
2. Peningkatan pelayanan melalui perijinan satu pintu;
3. Peningkatan prasarana dan sarana pendukung, SDM;
4. Peninjauan kembali terhadap dasar hukum pungutan pajak dan retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa maupun penyusunan perda baru;
5. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi)
6. Sosialisasi kepada masyarakat

Tingkat penerimaan pajak dan retribusi daerah ditentukan oleh kebijakan pendapatan dan efektifitas administrasi pendapatan. Kebijakan pendapatan meliputi penetapan besarnya tarif, penentuan obyek, pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan piutang pajak serta retribusi. Sedangkan efektifitas administrasi pendapatan meliputi efektifitas pendataan, penetapan, pemungutan pajak dan retribusi.

3.3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

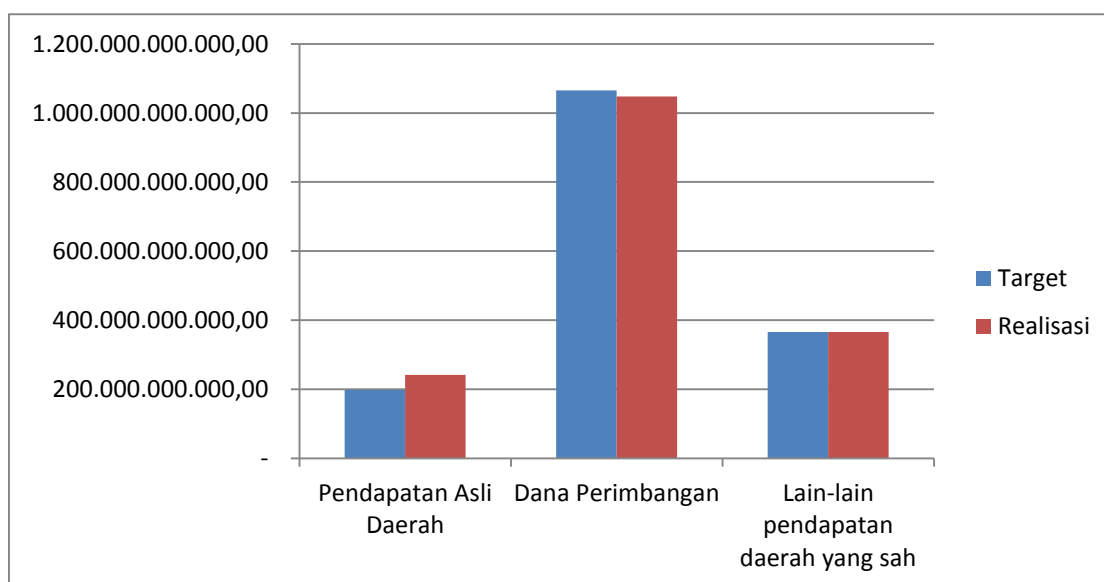
Target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 1.629.324.429.389,00 dengan realisasi Rp.1.655.682.331.731,00 atau mencapai 101,62 %, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.71
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2014 (dalam rupiah)

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN	
				2014	2013
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	198.117.604.676,00	242.456.523.967,00	122,38	119,92
2.	Dana Perimbangan	1.065.590.847.313,00	1.047.440.614.157,00	98,30	97,96
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	365.615.977.400,00	365.785.193.607,00	100,05	104,49
	Jumlah	1.629.324.429.389,00	1.655.682.331.731,00	101,62	101,40

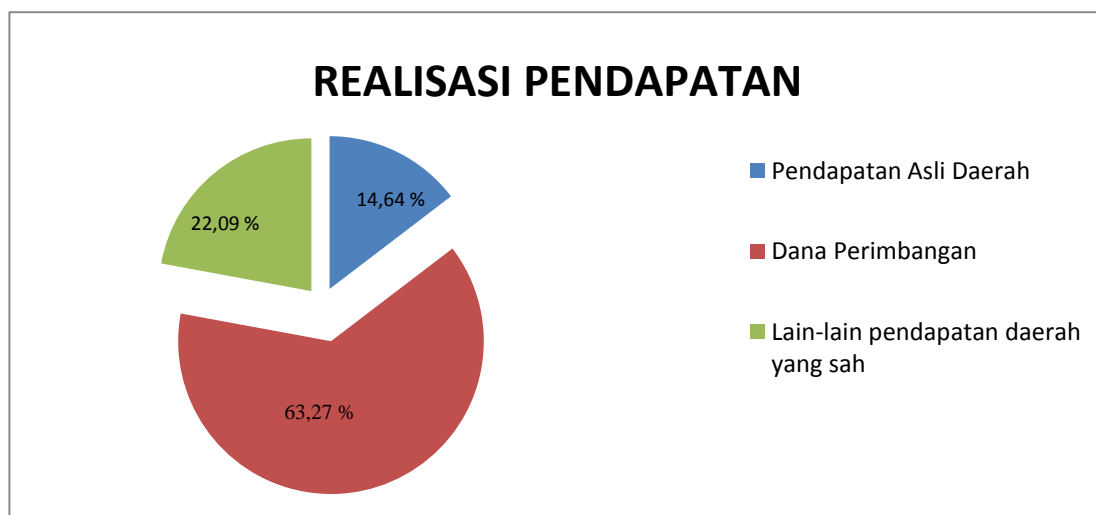
Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang adalah sebesar 101,62%, meningkat sebesar 0,22% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 101,40%.

Perbandingan antara target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Magelang tahun 2014 secara grafis dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2014

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.655.682.331.731,00 dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 242.456.523.967,00 (14,64%), Bagian Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.047.440.614.157,00 (63,27%) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.365.785.193.607,00 (22,10%). Komposisinya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.2
Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014

3.3.1.3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan utama pendapatan daerah antara lain :

1. Terbatasnya sumber pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan dari Pemerintah Pusat dan provinsi
2. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana.

Solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengatasi permasalahan pendapatan daerah adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan pada seluruh komponen PAD.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pemungutan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN) dan PPh pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perhitungan alokasi dana perimbangan

- c. Penggalangan dana pembangunan yang bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Infrastruktur sarana dan prasarana

3.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

3.3.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertumpu pada kepentingan publik, dengan mengedepankan aspek-aspek efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, peningkatan kinerja serta peningkatan pelayanan dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman daerah, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.

Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) adalah belanja daerah, yang dipergunakan untuk memadai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan dan urusan pilihan yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah.

Belanja Daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah. Guna mengoptimalkan pelaksanaannya maka perlu dikaji kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan pemerintah daerah agar potensi yang terbatas dapat dimanfaatkan secara tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran.

Agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran daerah secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APBD pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah rakyat kepada eksekutif dan legislatif untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan. Bertitik tolak pada hal tersebut, maka APBD Kabupaten Magelang dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut :

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dan DPRD kepada rakyat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APBD kepada masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama

terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

2) Disiplin Anggaran

Anggaran Daerah disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat di daerah sesuai dengan target dan sasaran pembangunan daerah. Anggaran yang tersedia pada setiap rekening / pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja / pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas / plafon anggaran yang ditetapkan.

3) Keadilan Anggaran

Pemerintah Daerah di dalam menetapkan besaran pajak dan retribusi harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di daerah, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

4) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan yang relatif masih terbatas untuk memberikan pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3.2.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah tahun 2014, dari anggaran sebesar Rp.2.002.563.832.687,00 terealisasi sebesar Rp.1.655.218.179.802,00 (82,65%), dengan rincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah sebagai berikut:

a) Belanja tidak langsung dengan anggaran sebesar Rp.1.174.657.339.419,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.035.368.250.293,00 (88,14 %)

Belanja tidak langsung terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja dianggarkan sebesar Rp.955.693.909.252,00 telah terealisasi sebesar Rp.889.340.550.538,00 (93,06 %)

2. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp.44.720.998.500,00 telah terealisasi sebesar Rp.43.450.618.035,00 (97.16 %)

3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang kepada individu dan atau keluarga, masyarakat dan lembaga non pemerintah yang bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum dan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pada APBD Tahun Anggaran 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp.13.457.970.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.12.285.362.660,00 (91.29%)

4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pendapatan provinsi kepada kabupaten atau pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2014, pemerintah kabupaten Magelang mengalokasikan Belanja Bagi Hasil atas pengelolaan Ketep Pass sebesar Rp.1.314.494.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.314.494.000,00 (100%).

5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / kota dan Pemerintah Desa

Bantuan Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten / kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten / kota kepada pemerintah desa

dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan daerah.

Pada APBD Tahun Anggaran 2014, Bantuan keuangan dilokasikan sebesar Rp.89.094.795.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.88.073.727.060,00 (98,85 %).

6. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengambilan atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

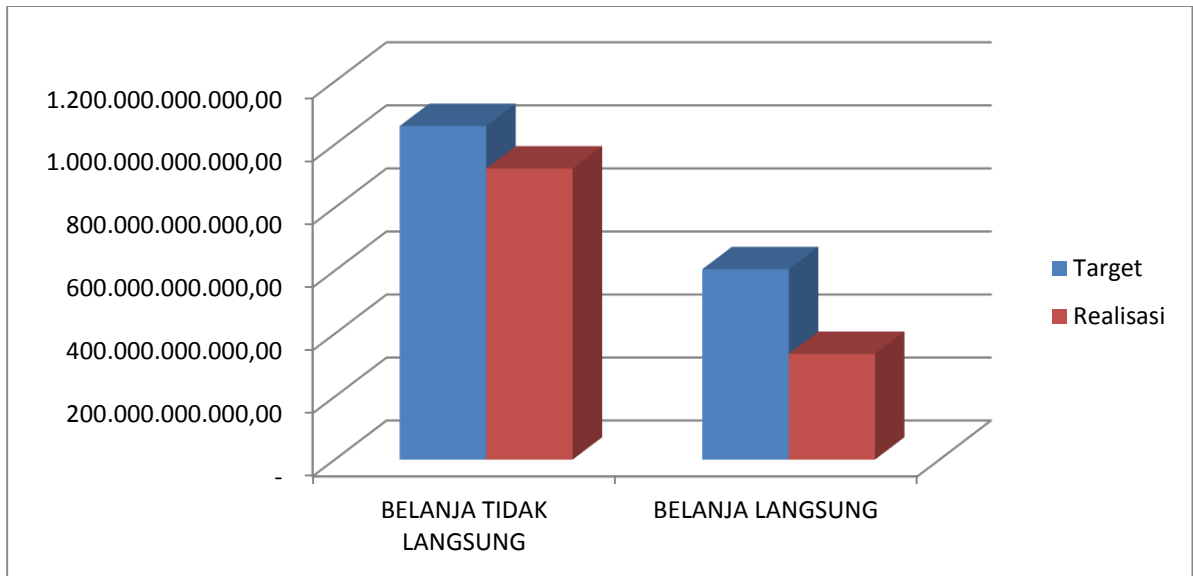
Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu: untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Secara geografis Kabupaten Magelang merupakan daerah rawan bencana maka setiap tahun selalu mengalokasikan belanja tidak terduga.

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.70.375.172.667,00 telah terealisasi sebesar Rp.903.498.000,00 (1,28 %).

- b) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.827.906.493.268,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 619.849.929,00 (74,87 %)

Perbandingan antara target dan realisasi belanja langsung maupun belanja tidak langsung dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014

3.3.2.3. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan belanja daerah pada Tahun 2014 jika dilihat dari realisasi anggaran terealisasi sebesar 82,65 %.Belanja yang tidak terealisasi disebabkan oleh adanya efisiensi belanja dan tidak terlaksananya program / kegiatan.

Efisiensi anggaran tetap memperhatikan capaian target kinerja yang sudah ditetapkan, artinya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan tetap terjaga. Program dan kegiatan yang tidak dapat direalisasikan yaitu adalah beberapa kegiatan dari komponen DAK pendidikan.

Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengatasi permasalahan belanja adalah melakukan perencanaan program dan kegiatan yang lebih akurat, peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi serta melaksanakan prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan serta efisiensi dan efektifitas.

3.3.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Anggaran defisit terjadi ketika anggaran belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan, dan sebaliknya anggaran surplus terjadi ketika anggaran belanja lebih kecil daripada anggaran pendapatan.

3.3.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD dianggarkan berdasarkan estimasi dan diperhitungkan dalam perubahan APBD berdasarkan peraturan daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Besarnya SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran pada Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya merupakan hasil perhitungan SiLPA yang telah diaudit oleh BPK.

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Pencairan Dana Cadangan Tahun 2014 digunakan untuk Pembangunan gedung DPRD

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah / BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dalam rangka menutup anggaran pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat.

e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang telah diberikan pemerintah Kabupaten kepada masyarakat maupun BUMD.

f. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pembayaran piutang.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk Pembangunan Pasar Muntilan, Pembangunan RSUD Daerah dan Pembangunan Pasar Secang.

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Investasi yang dilakukan pemerintah daerah antara lain investasi jangka panjang yang bersifat permanen, yaitu bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Penyertaan modal pemerintah daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

c. Pemberian pinjaman daerah

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat atau BUMD.

3.3.3.2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Secara garis besar realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.72

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014

No.	PEMBIAYAAN	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)
1	2	3	4	5
A	Penerimaan Pembiayaan	429.034.403.298	429.092.003.548	57.600.250
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	417.324.403.298	417.324.403.298	0
2	Pencairan Dana Cadangan	11.500.000.000	11.500.000.000	0
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	210.000.000	267.600.250	57.600.250
4	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0

No.	PEMBIAYAAN	Target	Realisasi	Selisih Lebih (Kurang)
1	2	3	4	5
B	Pengeluaran Pembiayaan	55.795.000.000	55.795.000.000	0
1.	Pembentukan Dana Cadangan	46.000.000.000	46.000.000.000	0
2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	9.585.000.000	9.585.000.000	0
3	Pembayaran Pokok Hutang	0	0	0
4	Pemberian Pinjaman Daerah	210.000.000	210.000.000	0
5.	Pembayaran pengembalian pajak	0	0	0
	Pembiayaan Netto	373.239.403.298	373.297.003.548	57.600.250

3.3.4. Pengelolaan Tugas Pembantuan (APBN)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota/Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan (Pasal 1 ayat 11). Adapun rincian penjelasan dana tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan (Pasal 1 ayat 15).
2. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa (Pasal 1 ayat 16).
3. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa (Pasal 1 ayat 17).

Selain Peraturan Pemerintah tersebut diatas, ada beberapa Peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, diantaranya:

1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat 9 DIPA Tugas Pembantuan dari 5 Kementerian yang diterima pada 7 SKPD dengan total anggaran Rp. 27.329.203.000. Anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 26.419.590.900 (96,67%) dan realisasi fisik sebesar 99,66%.

Tabel 3.73
Tugas Pembantuan yang Diterima Kabupaten Magelang Tahun 2014

No	Kementerian	SKPD Pelaksana /No.DIPA	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	
				(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kementerian Dalam Negeri	Bappeda 010.06.4.031954/2014	250.000.000	230.600.500	92,24	92,24
		Disdukcapil 010.08.4.031959/2014	1.302.100.000	992.228.538	76,20	76,20
2.	Kementerian Pertanian	Distanbunhut 033.05.5.502868/2014	1.909.500.000	1.66.523.925	86,23	99,93
		BPPKP 018.11.4.039071/2014	801.500.000	799.033.300	99,69	100
3.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi 026.04.4.039560/2014	525.520.000	493.455.750	93,90	100
4.	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan 024.03.4.039561/2014	2.680.350.000	2.678.908.100	99,95	99,95
		024.04.4.0319/2014	1.431.565.000	1.180.788.000	82,48	100

No	Kementerian	SKPD Pelaksana /No.DIPA	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	
				(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
5.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
		040.05.4.035515/2014	1.170.000.000	1.059.796.268	90,58	100
		023.15.4.031958/2014	1.500.000.000	1.444.813.760	96,32	100
JUMLAH			11.570.535.000	10.526.128.141	90,97	95,14

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Magelang, 2015

Adapun rincian program dan kegiatan pada DIPA berdasarkan SKPD pelaksana tugas pembantuan sebagai berikut :

a. Bappeda

Program Bina Pembangunan Daerah (010.06.06) dilaksanakan dengan Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah. Dalam Pelaksanaan kegiatan berupa penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk penanaman tanaman semusim dan tanaman buah-buahan yaitu durian, pete, klengkeng, manggis, alpokat. Dengan luas areal 16,8 ha. Adapun lokasi penanaman di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran, Desa Kebonagung

b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Melaksanakan Program Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu dengan outcome yang diharapkan adalah tertib database kependudukan berbasis NIK nasional dan pelayanan dokumen kependudukan, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan dan tersedianya regu.

Pelaksanaan kegiatan berupa pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu. Output kegiatan ini adalah laporan penyelenggaraan adminduk.

c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan

Pada tahun 2014 Distanbunhut melaksanakan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan. Output kegiatan ini adalah pengembangan kawasan tanaman buah seluas 5 ha dan Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (GAP) di lokasi Kelompok Tani (KT) Sido Makmur Kecamatan Srumbung; Sekolah Lapang *Good Handling Practice* (GHP) di KT Ngudi

Luhur Kecamatan Srumbung dan penyediaan sarana prasarana di Kecamatan Srumbung.

- 2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan. Output kegiatan adalah pengembangan kawasan tanaman florikultura, Sekolah Lapang GAP, Sekolah Lapang GHP serta sarana prasarana budidaya dan pasca panen. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Grabag oleh KT Sidomukti, KT Eko Brayon, KT Sido Harjo, KT Sido Asri, KT Sumber Berkah.
- 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan. Kegiatan ini berupa sekolah lapang GAP di KT Margi Lestari Kecamatan Dukun serta pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat di Kecamatan Tempuran dan Salaman.
- 4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Berupa penataan dan pengelolaan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura (1 laporan) serta penataan dan pengelolaan perencanaan, keuangan dan perlengkapan, kepegawaian pengembangan hortikultura (2 dokumen); layanan perkantoran (12 bulan).

d. BPPKP

Pada tahun 2014 BPPKP melaksanakan program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan :

- 1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
Output kegiatan adalah terlaksananya pemantauan dan pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan. Pada kegiatan ini terdapat 1 desa mandiri pangan yang diberdayakan (Desa Candirejo Kecamatan Borobudur) serta lokasi penanganan rawan pangan SKPG di Kabupaten Magelang.
- 2) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar. Output kegiatan yang diharapkan adalah tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi dan penganekaragaman konsumsi pangan. Dilaksanakan dengan pendampingan P2KP (Percepatan Penganeka ragaman Konsumsi Pangan) pada 30 desa di 14 kecamatan.

- 3) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Dilaksanakan dengan 12 kali laporan bulanan.
- e. Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dilaksanakan dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja berupa padat karya infrastruktur. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Krijing Kecamatan Kajoran dan Desa Kemutuk Kecamatan Tempuran.
- f. Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan melaksanakan 2 DIPA dengan 2 program, yaitu
1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 29 puskesmas
 2. Program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan; kegiatan ini mempunyai output pengadaan alat kesehatan di pelayanan medik dasar sebanyak 4 unit dan layanan perkantoran selama 3 bulan layanan.
- g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Melaksanakan 2 DIPA dengan 2 program yaitu
- 1) Program Pengembangan Destinasi Wisata pada Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata. Output dari kegiatan adalah fasilitasi / pendukung amenities / fasilitasi pariwisata. Pelaksanaan kegiatan berupa penataan Taman Rekreasi Mendut (lanjutan) di Kelurahan Mendut Kecamatan Mungkid dan revitalisasi panggung pertunjukan di Kawasan Borobudur Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur.

Program Pengembangan Budaya dengan kegiatan pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Pelaksanaan kegiatan berupa revitalisasi dan pengadaan sarana penunjang Museum H. Widayat.

A. DANA URUSAN BERSAMA

Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2014 menerima 2 DIPA Dana Urusan Bersama pada 2 SKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 27.194.911.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.149.016.750 (99,83%) dan realisasi fisik sebesar 100% dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.74
Anggaran Dana Urusan Bersama yang Diterima
Kabupaten Magelang Tahun 2014

No	Kementerian	SKPD/ No. DIPA	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				Rp	%	%
	Kementerian Dalam Negeri	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 010.05.5.039562/2014	25.009.911.000	24.964.016.750	99,82	100
	Kementerian Pekerjaan Umum	DPU dan ESDM 033.05.5.502868/2014	2.185.000.000	2.185.000.000	100	100
Jumlah			27.194.911.000	27.149.016.750	99,83	100

Sumber BAPPEDA Kabupaten Magelang , 2015

Adapun rincian program dan kegiatan dana urusan bersama yang diterima Kabupaten Magelang berdasarkan SKPD pelaksana dana urusan bersama sebagai berikut :

a. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) yang dilaksanakan pada 19 kecamatan. Outcome program yang ingin dicapai adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi poses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis.

b. DPU dan ESDM

Melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara. Output kegiatan ini adalah keswadayaan masyarakat P2KP (PNPM-MP) di 27 desa/kelurahan di Kecamatan Muntilan dan Mertoyudan.

B. KANTOR PUSAT

DPU dan ESDM Kabupaten Magelang pada tahun 2014 melaksanakan 2 kegiatan kewenangan Kantor Pusat dari Kementerian

Pekerjaan Umum dengan nama Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Kab. Magelang kode Satker 502866, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.75
Anggaran Kantor Pusat yang Diterima
Kabupaten Magelang Tahun 2014

No	Kementerian	SATKER/No.DIPA	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
				(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kementerian Pekerjaan Umum	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Magelang 033.05.1.502866/2014 Rupiah murni 033.05.1.502866/2014 PHLN	5.000.000.000	5.000.000.000	100	100
			2.095.000.000	2.095.000.000	100	100
Jumlah			7.095.000.000	7.095.000.000	100	100

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Magelang, 2015

DPU dan ESDM sebagai satuan kerja Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Magelang melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan 2 kegiatan yaitu:

1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman. Outputnya adalah Infrastruktur perdesaan. Dalam pelaksanaannya Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dilaksanakan pada 50 desa di 18 kecamatan tahap I. Total anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000 sehingga masing-masing desa memperoleh anggaran Rp. 100.000.000, untuk tahap II menunggu APBN-P 2015.

2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada DIPA 033.05.1.502866/2014 tanggal 5 Desember 2013 dana yang tersedia adalah Rp. 2.070.000.000. Terdapat 2 belanja yang dikuasakan kepada satuan kerja Pembangunan Infrastruktur Kab. Magelang berupa Belanja Sosial Program Pamsimas (Pamsimas regular APBN) sebesar Rp. 1.320.000.000 untuk SPAM Perdesaan di 6 desa; Tanggal 02 Oktober 2014 menerima revisi tambahan anggaran dengan DIPA No: 033.05.1.502866/2014 revisi ke 02 sebesar Rp. 775.000.000 untuk Belanja Sosial Hibah Insentif Desa Program Pamsimas (Pamsimas HID) sebesar Rp. 450.000.000 untuk SPAM

Perdesaan di 3 desa dan untuk Belanja Sosial Hibah Program Pamsimas (Pamsimas HKP) sebesar Rp. 350.000.000 untuk 4 desa. Tujuan program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan masyarakat di pinggiran kota. Secara lebih rinci program Pamsimas bertujuan untuk: (1) Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat; (2) Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan; (3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat; (4) Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

3.4. PRESTASI YANG DIRAIH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014

Berikut adalah daftar prestasi yang diraih Kabupaten Magelang selama tahun 2014 :

1. Juara I Lomba Kampung Iklim Tingkat Nasional;
2. Juara II Lomba Ikan Hias Tingkat Nasional;
3. Penghargaan Adibakti Mina Bahari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Pokdakan “Sido Makmur” Kabupaten Magelang atas Prestasi sebagai Juara III Kategori Pokdakan Ikan Hias.
4. Juara I Kategori Pembudidaya Ikan Hias Tingkat Provinsi oleh Pembudidaya Ikan Hias “Sido Makmur” Desa Menayu, Muntilan Kab. Magelang.
5. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Magelang sebagai Badan Publik Kategori Kinerja dalam Ketaatan Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik; (Diskominfo)
6. Juara I Lomba Rancang Busana Batik Tingkat Provinsi (Disperinkop, FEDEP)
7. Juara II Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi atas nama Dwi Astuti, S.Sos, MM; (Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah)
8. Penyaji Unggulan Ke 2 Festival Tari Keprajuritan Nusantara Tingkat Nasional (Disparbud)

9. Penyaji Harapan II Festival Dalang Remaja Dulongmas se Jawa Tengah (Disparbud)
10. Juara Umum Mas Kepribadian Jawa Tengah Tahun 2014.
11. Penghargaan Travel Club Tourism Award 2014 Kategori The Best Achievement Gold dari Kementerian Parekraf .
12. Juara I Stan Pameran Desa Wisata Tingkat Jawa Tengah oleh Desa Wanurejo Tingkat Jawa Tengah
13. Juara Atribut dalam Lomba karya Tulis Ilmiah tentang Cagar Budaya Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
14. Juara Favorit Duta Saka Pariwisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah
15. Juara II Eskplorasi Cagar Budaya Permainan Kebudayaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
16. Juara Harapan I Eksplorasi Permainan Kebudayaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
17. Juara Harapan I Ajang Kreasi Kesenian Tingkat Provinsi Jawa Tengah
18. Juara I Festival Film Dokumenter tentang Cagar Budaya Tingkat Provinsi Jawa Tengah
19. Juara II Festival Teater Tingkat DIY dan Provinsi Jawa Tengah
20. Juara II Lomba Pengelolaan Jaringan Irigasi Tingkat Provinsi a.n. Sdr. Delson Ka. UPT DPU dan ESDM Wilayah Salaman (DPU)
21. Juara I Mantri Pengairan Tingkat Provinsi a.n. Sdr. Bambang UPT DPU dan ESDM Wilayah Salaman (DPU)
22. Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI berupa “Paramadana Madya Nugraha” sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi.(Disperinkop n UMKM)
23. Juara I Koperasi Award dari Kementerian Koperasi dan UKM RI kepada KPRI “Berkah” Muntilan Kategori Koperasi Jasa. (Disperinkop n UMKM)
24. Penghargaan Madya Koperasi dari Gubernur Jawa Tengah Kepada Bupati Magelang atas keberpihakannya pada koperasi. (Disperinkop n UMKM)
25. Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM berupa KSP Award 2014 kepada KJKS BMT “BIMA” Kategori Pelayanan Pinjaman Sektor Produksi Terbaik. (Disperinkop n UMKM)
26. Juara Harapan I Pemilihan Pelaksana Terbaik Posyandu Tingkat Provinsi atas nama Desa Mranggen, Srumbung, Kab. Magelang

27. Juara Harapan III Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah atas nama Desa Deyangan, Mertoyudan, Kab. Magelang
28. Juara III Lomba Pelaksana Terbaik Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah atas nama Desa Pucungrejo, Muntilan, Kab. Magelang.
29. **Bidang Ketahanan Pangan**, diperoleh penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Tengah, yaitu :
 - a. Kelompok Wanita Tani (KWT) “Melati”, Ds Wonogiri, Kajoran, Kab. Magelang sebagai Juara III
Kategori Pelaku Ketahanan Pangan : Kelompok Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - b. Wartono, Ds. Wonogiri, Kajoran, Kab. Magelang sebagai Juara I
Kategori Pelaku Ketahanan Pangan : Kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.
 - c. Supariyo, Desa Mangli, Kaliangkrik, Kab. Magelang sebagai Juara II
Kategori Pemangku Ketahanan Pangan

Bidang Penyuluhan :

30. Juara I Balai Penyuluhan Pertanian Peternakan Perikanan dan Kehutanan (BP3K) berprestasi Tingkat Nasional diraih oleh BP3K Grabag Kab. Magelang
31. Juara I Pusat Pelatihan Penyuluhan Perdesaan Swadaya (P4S) Kelas Pemula Tingkat Nasional;
32. Juara III Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Tingkat Nasional;
33. Juara III Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) Tingkat Provinsi;
34. Juara II Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Tingkat Provinsi;
35. Juara III Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM) Tingkat Provinsi;
36. Juara III Gapoktan Berprestasi Tingkat Provinsi.

Tabel 3.76
Prestasi yang Diraih di Bidang Pendidikan Kabupaten Magelang 2014

Siswa Berprestasi Tingkat SMU

No.	Nama Siswa	Asal Sekolah	Tingkat	Nama Lomba/Bidang Prestasi	Juara	
1	Kiki Setiyowati	SMA Negeri 1 Ngluwar	Provinsi Jateng	- Geguritan Tahun 2013	3	Provinsi
			Provinsi Jateng	- Sasorah Putri tahun 2014	2	Provinsi
2	Febri Arya Budi Wicaksono	SMA Negeri 1 Ngluwar	Provinsi Jateng	- Geguritan tahun 2014	3	Provinsi
3	Baskoro	SMA PI Van Lith Muntilan	Internasional Exhibition For Young Inventors (IEYI 2014)	- Electronic Wet Floor Sign	Silver Medal	International
			Internasional Exhibition For Young Inventors (IEYI 2014)	- Smart Water Date 2	Broze Medal	International
			Penghargaan Khusus Nasional Young Inventors Award (NYIA) Ke 7 Tahun 2014	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Judul Karya Jingkaton)	Nasional	
4	Lucia Veka Leanandra	SMA PI Van Lith Muntilan	Kemendikbud / 2014	Ujian Nasional Matematika (IPS)	Nilai 10,00	Nasional
5	Afifah Ari Arsiwi	SMA Negeri 1 Kota Mungkid	Provinsi Jateng tahun 2014	Juara 1 Kumete 48 Kg SMA Putri	1	Provinsi
6	Rina Herawati	SMA Negeri 1 Muntilan	Kemendikbud / 2014	Ujian Nasional Matematika (IPS)	Nilai 10,00	Nasional
7	Akhmad Badriyanto	SMA Negeri 1 Salaman	Kejurda Atletik Daerah TK Jateng	Juara I Lari 300 m Putra	I	Provinsi
			Kejurda Atletik Daerah TK Jateng	Juara III Lari 1500 m Putra	III	Provinsi
			Popda Tingkat Provinsi Jateng	Juara III Lari 1500 m Putra	III	Provinsi
			Borobudur Internasional 10 K tahun 2014	Juara I Lari Borobudur 10 K Tahun 2014	I	Pelajar
8	Risqi Dwi Kurniawan	SMA Negeri 1 Salaman	Kejurda Atletik Daerah TK Jateng	Juara III Lari 300 m Putra	III	Provinsi
			Kejurda Atletik Daerah TK Jateng	Juara III Jalan Cepat	III	Provinsi
			Borobudur Internasional 10 K tahun 2015	Juara II Lari Borobudur 10 K Tahun 2014	II	Pelajar
9	Andhika Setya Wardhana	SMA Negeri 1 Salaman	Kejurda Atletik Daerah TK Jateng	Juara III Atletik Lompat Jauh Putra	III	Provinsi
10	M. Gilang Ramadhan	SMA Negeri 1 Salaman	Kejurda Atletik se Eks Karesidenan Kedu Tahun 2014	Juara I Tolah Peluru Putra	I	Kares

No.	Nama Siswa	Asal Sekolah	Tingkat	Nama Lomba/Bidang Prestasi	Juara	No.
11	Syah Riani Moniwati	SMA Negeri 1 Muntilan	Universitas Negeri Yogyakarta	Juara III Tingkat Nasional Lomba karya Tulis Ilmiah 2014	III	Nasional
12	Kukuh Ugie Sembodo	SMA Negeri 1 Muntilan	Universitas Negeri Yogyakarta	Juara III Tingkat Nasional Lomba karya Tulis Ilmiah 2014	III	Nasional
13	Mutiara Sakina	SMA Negeri 1 Muntilan	DBL Indonesia	Juara I Jawa Tengah Basket Tree on tree 2014	I	Provinsi
14	Dyah Ayu Gita S	SMA Negeri 1 Muntilan	DBL Indonesia	Juara I Jawa Tengah Basket Tree on tree 2014	I	Provinsi
15	Jiehan Nabila	SMA Negeri 1 Muntilan	DBL Indonesia	Juara I Jawa Tengah Basket Tree on tree 2015	I	Provinsi
16	Yuli Astuti N	SMA Negeri 1 Muntilan	DBL Indonesia	Juara I Jawa Tengah Basket Tree on tree 2016	I	Provinsi
17	Tjandra Santoso	SMA Negeri 1 Muntilan	Kejurda Jateng Karate Pelajar 14	Juara II Komite 63 Kg Tingkat Jateng	II	Provinsi
			Kejurda Jateng Karate Pelajar 15	Juara II Kata Perorangan TKJateng	II	Provinsi
			Kejurda sunan Kalijaga CUP Pelajar 14	Juara II Kata Perorangan UIN Sunan Kalijaga	II	Pelajar
			Kejurda UNY CUP Karate Pelajar 14	Juara II Kata Perorangan UNY	II	Pelajar
18	GUSNADI WIYOGA	SMA Taruna Nusantara	Kemendikbud / 2014	Ujian Nasional (Mapel Matematika)	Nilai 10,00	Nasional
19	WEDAR PANJI MARDYANINGSIH	SMA Taruna Nusantara	Kemendikbud / 2014	Ujian Nasional (Mapel Fisika)	Nilai 10,00	Nasional
20	MUHAMMAD AMIN ZAIM	SMA Taruna Nusantara	Kemendikbud / 2014	Ujian Nasional (Mapel Fisika)	Nilai 10,00	Nasional
21	ELVINA RIAMA KUSUMAWARDHANI	SMA Taruna Nusantara	Kemendikbud / 2014	Ujian Nasional (Mapel Fisika)	Nilai 10,00	Nasional
22	SUKMA PRILANTASARI	SMA Taruna Nusantara	Kemendikbud / 2014	Ujian Nasional (Mapel Biologi)	Nilai 10,00	Nasional
23	NEO ADITYA KUNTAR	SMA Taruna Nusantara	Kemendikbud / 2014	OSN	Perunggu	Nasional
			LOPI /2014	Pra OSN	II	Nasional
			Dinas Pendidikan Jateng / 2014	OSP	Pering 5	Provinsi

No.	Nama Siswa	Asal Sekolah	Tingkat	Nama Lomba/Bidang Prestasi	Juara	No.
24	MUHAMMAD SYAHRUL NIZAM	SMA Taruna Nusantara	LIPI /2014	IEYI (International Exhibition for Young Inventors)	Bronze Medal	Internasional
			Dinas Pendidikan Jateng /2013	OPSI	I	Provinsi
			Yamaha Kompas /2013	Lomba matematika	I	Provinsi
			Univ. Atma Jaya Yogya /2013	Bridge design	I	Nasional
			Astra International tbk. /2013	Astra Honda Motor Best Student	II	Provinsi
25	RADIYYA DWI SAPUTRA	SMA Taruna Nusantara	UNSW Global Australia / 2014	ICAS	High Distinction	Internasional
			science MUAR Malaysia / 2014	Matematika	III	Internasional
			science MUAR Malaysia / 2014	Cultural Performance	I	Internasional
			UNS Surakarta / 2014	Kompetisi Matematika	II	Jateng DIY
			Univ. Sanata Dharma / 2014	LCC Matematika	III	Provinsi
26	FEBRIANANDA WIDA PRAMUDITA	SMA Taruna Nusantara	UNSW Global Australia / 2014	ICAS	High Distinction	Internasional
27	MUHAMMAD NUR BADRUDDIN	SMA Taruna Nusantara	UNSW Global Australia / 2014	ICAS	Distinction	Internasional
			UGM Yogyakarta / 2014	Top Challenge of physics	III	Provinsi
28	DENNY DHARMA SAPUTRA	SMA Taruna Nusantara	UNSW Global Australia / 2014	ICAS	Distinction	Internasional
29	DEWINKA ANUGERAHENI	SMA Taruna Nusantara	UNSW Global Australia / 2014	ICAS	Distinction	Internasional
30	SKETSA NADA ALFAINSANA	SMA Taruna Nusantara	science MUAR Malaysia / 2014	The Quranic Recitation Competition	II	Internasional
			science MUAR Malaysia / 2014	Cultural Performance	I	Internasional
31	PURCA RIO WILLY YOSEPH	SMA Taruna Nusantara	science MUAR Malaysia / 2014	Public Speaking Competition	I	Internasional
			science MUAR Malaysia / 2014	Cultural Performance	I	Internasional

No.	Nama Siswa	Asal Sekolah	Tingkat	Nama Lomba/Bidang Prestasi	Juara	No.
32	MUHAMMAD AZMI FAUZI	SMA Taruna Nusantara	science MUAR Malaysia / 2014	The Quranic Recitation Competition	III	Internasional
			science MUAR Malaysia / 2014	Cultural Performance	I	Internasional
33	FARADITA MAUDY SARI	SMA Taruna Nusantara	UNSW Global Australia / 2014	ICAS	Distinction	Internasional
34	ALISA ARDITA SARI	SMA Taruna Nusantara	Surya University / 2014	InaSEC	I	Nasional
35	MUHAMMAD ARIQ RAFII RAMADHAN	SMA Taruna Nusantara	Dinas Pendidikan Jateng / 2014	OPSI	I	Provinsi
36	LINGGIS GALIH WASESO	SMA Taruna Nusantara	Univ. Atma Jaya Yogya / 2014	Bridge design	II	Nasional
			Dinas Pendidikan Jateng / 2014	OPSI	I	Provinsi
37	MAWAR CHATARINA	SMA Taruna Nusantara	Dinas Pendidikan Jateng / 2014	OPSI	II	Provinsi
38	ALPHA RHESA JANITRA	SMA Taruna Nusantara	Dinas Pendidikan Jateng / 2014	OPSI	II	Provinsi
39	IMMACULATA TITIS WINIATI	SMA Taruna Nusantara	UGM Yogyakarta / 2014	ISOC	I	Nasional
			UGM Yogyakarta /2013	BIG ISOC (Midle orienteering)	III	Nasional
			UGM Yogyakarta /2013	BIG ISOC (Sprint orienteering)	III	Nasional
40	KRISWAHYU YUDHO W	SMA Taruna Nusantara	UPI /2013	LCTB	I	Nasional
			IPB / 2014	Agribusiness Festival	I	Nasional
			UPI / 2014	LCTB	I	Nasional
41	YOHANES K.A PINANDITO	SMA Taruna Nusantara	IPB /2013	Economics Contest	I	Nasional
			UNY / 2014	LCCA	II	Provinsi
			Dinas Pendidikan Jateng / 2014	OSP	IV	Provinsi
42	IVAN PRADIPTA M.	SMA Taruna Nusantara	LOPI / 2014	Pra OSN	I	Nasional
43	ALFIN HARJUNO DWIPUTRO	SMA Taruna Nusantara	UNAIR Surabaya /2013	Seleksi Daerah Yogyakarta Olimpiade Farmasai Nasional	I	Provinsi
			UNAIR Surabaya /2013	Olimpiade Farmasai Nasional	III	Nasional
			UPI Bandung / 2014	LCTB	I	Nasional
			IPB /2013	Agribusiness Festival	I	Nasional

No.	Nama Siswa	Asal Sekolah	Tingkat	Nama Lomba/Bidang Prestasi	Juara	No.
44	BAGUS AJI WIDYA RANDHIKA	SMA Taruna Nusantara	UNS Surakarta / 2014	Olimpiade Geografi	I	Jateng DIY
45	AMELIA PARAMITA MAHANANI	SMA Taruna Nusantara	UNS Surakarta / 2014	Olimpiade Geografi	I	Jateng DIY
46	GIDION IVAN ARLY	SMA Taruna Nusantara	Universitas Trisakti /2013	Lomba debat	I	Nasional
			UNY / 2014	Lomba debat	II	Provinsi
			AKRB Yogyakarta / 2014	Lomba presenter TV	I	Jawa- DIY
			SMA N 8 Yogyakarta / 2014	Lomba debat Bahasa Indo	I	Provinsi
			UNNES / 2014	Lomba debat	III	Provinsi
47	RIUNG GARENDRA ARGATAMA	SMA Taruna Nusantara	UGM Yogyakarta / 2014	ISOC	I	Nasional
48	ADE AMALIAH FITRIAN	SMA Taruna Nusantara	UGM Yogyakarta / 2014	ISOC	Best Fairplay	Nasional
49	SHOLAHUDIN IZZA FALIH	SMA Taruna Nusantara	SMAN 3 Semarang /2013	Lomba debat parlemen	III	Provinsi
50	NOGATI CHAIRUNNISA	SMA Taruna Nusantara	SMA N 8 Yogyakarta / 2014	Lomba debat Bahasa Indo	I	Provinsi
			UNY / 2014	Lomba debat	II	Provinsi
			UNNES / 2012	lomba debat	III	Provinsi
51	ADIRA KURNIAWAN FIRDAUS	SMA Taruna Nusantara	UNNES / 2014	Australasian debate Championship 2014	II	Provinsi
52	ANDINI ADHA PUTRI SATIAWAN	SMA Taruna Nusantara	SMA N 8 Yogyakarta / 2014	Lomba debat Bahasa Indo	I	Provinsi
			UNY / 2014	lomba debat	II	Provinsi
			Universitas Trisakti /2013	lomba debat	III	Nasional
53	MARK CHRISTOPHER FAIRLEY	SMA Taruna Nusantara	univ. Satya Wacana / 2014	Debate competition	I	Provinsi
54	DHAIFAN ATTALAH ANDA LUBIS	SMA Taruna Nusantara	UNNES / 2014	Australasian debate	II	Provinsi
55	BAGUS HIMAWAN	SMA Taruna Nusantara	SMA N 8 Yogyakarta / 2014	Debate competition	I	Provinsi
56	SALSABILA SILIWANGI SURTIWA	SMA Taruna Nusantara	UNNES / 2014	Australasian debate	II	Provinsi
			Univ. Satya Wacana / 2014	Debate competition	I	Provinsi
57	ELSA PUTRI HARDIYANTI	SMA Taruna Nusantara	SMA N 8 Yogyakarta / 2014	Debate competition	I	Provinsi

No.	Nama Siswa	Asal Sekolah	Tingkat	Nama Lomba/Bidang Prestasi	Juara	No.
58	M. WYNDHAM HARYATA PERMANA	SMA Taruna Nusantara	UDINUS / 2014	Japanese cerdas cermat competition	II	Provinsi
59	KHALIF REMALDY BRIANTINO	SMA Taruna Nusantara	UDINUS / 2014	Japanese cerdas cermat competition	III	Provinsi
60	RIVENIA TYAS PUTRI	SMA Taruna Nusantara	UDINUS / 2014	Japanese cerdas cermat competition	II	Provinsi
61	KARTIKO AGUNG PRAMUDITO	SMA Taruna Nusantara	UDINUS / 2014	Japanese cerdas cermat competition	II	Provinsi
62	BETARI AYU PRAMITA	SMA Taruna Nusantara	Dinas Pendidikan Jateng / 2014	OSP	V	Provinsi
63	KEVIN ALEXANDER SIDOMULYO	SMA Taruna Nusantara	UPI Bandung / 2014	LCTB	I	Nasional
64	M. HARI ADITYA MAULANA	SMA Taruna Nusantara	UGM Yogyakarta / 2014	Best Design line follower contest	I	Nasional
65	MUHAMMAD FIKRI HAFIYA	SMA Taruna Nusantara	Science MUAR Malaysia / 2014	Cultural Performance	I	Internasional
			SMA N 8 Yogyakarta / 2014	Debate competition	I	Provinsi
66	LUQMAN YUSUF BHAROTO	SMA Taruna Nusantara	Univ. Sanata Dharma / 2014	LCC Matematika	III	Provinsi
67	ANGGORO WISNU ADI WIKANTO	SMA Taruna Nusantara	Univ. Sanata Dharma / 2014	LCC Matematika	III	Provinsi
68	ANDIKA PANDU NUGROHO	SMA Taruna Nusantara	UNY / 2014	LCC AKuntansi	III	se-Jawa
69	SULTAN ZEIN MALIAN	SMA Taruna Nusantara	UNY / 2014	LCC AKuntansi	III	se-Jawa
70	GODFRIED JUNIO SEBASTIAN	SMA Taruna Nusantara	UNY / 2014	LCC AKuntansi	III	se-Jawa
71	AMALIA ADINUGRAHA ARI SAKTI	SMA Taruna Nusantara	Science MUAR Malaysia / 2014	Cultural Performance	I	Internasional
			UDINUS / 2014	Japanese cerdas cermat competition	II	Provinsi

Prestasi Tingkat SMK

No.	Nama Siswa	Asal Sekolah	Tingkat	Nama Lomba/Bidang Prestasi	Juara	
1		SMK Muh 2 Mertoyudan	Provinsi Jateng	LKS Budidaya Ikan	1	Provinsi
2		SMK N Salam	Provinsi Jateng	LKS Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian	1	Provinsi
		SMK N Salam	Provinsi Jateng	LKS Teknologi Peternakan Unggas	1	Provinsi

Prestasi Tingkat SMP

No.	Nama Siswa	Asal Sekolah	Tingkat	Nama Lomba/Bidang Prestasi	Juara	
1		SMP N 1 Kajoran	Nasional	Lomba Motivasi Belajar Mandiri	2	Nasional
2		SMP N 3 Candimulyo	Nasional	Lomba Penelitian Ilmiah Remaja	2	Nasional
		SMP Muh Plus Gunungpring Muntilan	Nasional	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Cabang Tari	1	Nasional

No.	Nama Siswa	Asal Sekolah	Tingkat	Nama Lomba/Bidang Prestasi	Juara	
1	Alif Luqman	SMA Taruna Nusantara	Provinsi, Nasional	Paskibraka		
2	Chyntia Novalinda	SMA N Grabag	Provinsi	Paskibraka		
3	Ahmad Mujib	Kecamatan Sawangan	Provinsi, Nasional	JPI (Jambore Pemuda Indonesia) dan BPAP (Bakti Pemuda Antar Provinsi) di Gorontalo dan Riau		
4	Ismi Kurnia	Kecamatan Salaman	Provinsi, Nasional	JPI (Jambore Pemuda Indonesia) dan BPAP (Bakti Pemuda Antar Provinsi) di Gorontalo dan Riau		

Siswa Berprestasi Tingkat SD

No.	Nama Siswa	Asal Sekolah	Tingkat	Nama Lomba/Bidang Prestasi	Juara	
1	Kharismawan Hakim	SD Terpadu Ma'arif Gunungpring	Provinsi	Lomba Pantomim	2	Provinsi
2	Wahyu Nurlita	SD N Salaman 1	Provinsi	Lomba Pidato Bahasa Indonesia	1	Provinsi
3	Anindita Indana Zulfa	SD N Bandongan 3	Provinsi	Lomba Lari	1	Provinsi

